

OWL ECONOMY

Ekonomi Kreatif Malam yang Inklusif
Menuju Kota Global



KARSA
CITY LAB

OWL ECONOMY

Ekonomi Kreatif Malam yang Inklusif
Menuju Kota Global

KARSA
CITY LAB

BroadwayMalyan^{BM}





Prakata

Kajian ini lahir dari semangat untuk membaca ulang kota Jakarta bukan sekadar sebagai ibu kota administratif, tetapi sebagai kota hidup yang terus berevolusi. Di tengah dinamika pembangunan dan pergeseran identitas pasca-pemindahan pusat pemerintahan, Jakarta dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana memastikan kehidupan kota tetap berdenyut 24 jam, inklusif, dan berdaya saing global.

Kajian Owl Economy Jakarta ini disusun sebagai upaya strategis untuk memahami potensi ekonomi malam sebagai wajah baru pariwisata dan ekonomi kreatif kota. Melalui pendekatan spasial, regulatif, dan jenama kota, studi ini berupaya merumuskan arah kebijakan yang konkret dan implementatif.

Proses penyusunan kajian ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), serta Kantor Kolaborasi dan Komunikasi Lokal (KCL). Kolaborasi ini mempertemukan pandangan kebijakan, desain, dan praktik lapangan ke dalam satu kerangka pemikiran yang utuh.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Broadway Malyan, yang melalui pengalaman globalnya dalam perancangan kota kreatif, turut memperkaya perspektif spasial dan branding dalam kajian ini. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh peserta Focus Group Discussion pelaku ekonomi kreatif, pengelola kawasan, akademisi, dan komunitas urban yang memberikan pandangan jujur, segar, dan relevan terhadap arah pengembangan Jakarta sebagai kota global berbasis kreativitas.

Kami berharap kajian ini tidak berhenti sebagai dokumen konseptual, tetapi menjadi pijakan nyata untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang hidup siang dan malam, ramah bagi warganya, dan terbuka bagi dunia.

Jakarta, September 2025

Tim Penyusun

KARSA CITY SERIES: OWL ECONOMY

Edisi Pertama - September 2025

Dicetak di Jakarta, Indonesia

Karsa City Series adalah inisiatif jejaring pengetahuan urban yang dikembangkan oleh Karsa City Lab, sebagai ruang kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan praktisi untuk melahirkan gagasan kebijakan publik yang berakar pada realitas kota. Seri ini berfungsi sebagai urban think tank yang memotret dinamika perkotaan Indonesia, dengan fokus pada transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan.

Edisi perdana “Owl Economy” merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Karsa City Lab, yang bekerja bersama Broadway Malyan sebagai co-creator dalam riset dan konsepsi spasial kajian ini.

Broadway Malyan merupakan biro arsitektur dan perancangan kota berskala internasional yang berbasis di Singapura, dengan pengalaman panjang dalam pengembangan kota-kota dunia berbasis kreativitas, budaya, dan konektivitas.

Dalam proyek ini, kolaborasi tersebut menghadirkan perspektif desain yang berpadu dengan strategi kebijakan untuk menjawab tantangan Jakarta malam hari, dari transit, ruang publik, hingga ekonomi kreatif.

Publikasi ini dicetak di Jakarta sebagai cetakan pertama dan menjadi bagian dari upaya membangun pengetahuan kota melalui pendekatan multidisipliner, lintas generasi, dan berbasis praktik.

Seluruh hak cipta publikasi ini merupakan milik Karsa City Lab.

Tidak diperkenankan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Editor Rionaldi

Penulis Dedi Kusuma Wijaya Cerina Niken
Rionaldi Gabriella Samsir
Khalila Lenggogeni Jarrell Tumewa Diets
Monique Sukmaningsih Olivia Gabriella Chandra

Tata Letak Nadia Halim

Grafis dan Sketsa Chintya Fitrianty Farhan Auliya

DAFTAR ISI

05 Prakata

07 Daftar Isi

08 Latar Belakang

12 Kerangka Teori & Kajian

Kerangka Kajian Spasial Kota Malam Hari

Kerangka Kajian Jenama Wisata Kota Malam Hari

Kerangka Kajian Regulasi Wisata Kota Malam Hari

34 Analisis

Definisi Ekonomi Kreatif Malam Hari

Analisis Spasial Ekonomi Kreatif Malam

Analisis Jenama Wisata Kota Malam Hari

Analisis Regulasi Ekonomi Kreatif Malam

Masukan FGD

Perhitungan Dampak Ekonomi Kreatif Malam

138 Rekomendasi

Intervensi Spasial

Rekomendasi Regulasi

Rekomendasi Rencana Aksi

Key Performance Indicator (KPI) Keberhasilan Owl Economy

172 Referensi

174 Dokumentasi



LATAR BELAKANG

Jakarta memiliki visi besar untuk bertransformasi menjadi salah satu dari **20 kota global teratas pada tahun 2045**, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Visi ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta 2025–2045, yang memosisikan Jakarta sebagai kota global yang maju, adil, kompetitif, dan berkelanjutan (Bappeda DKI Jakarta, 2024).

Secara ekonomi, Jakarta memegang posisi yang sangat penting. Pada tahun 2023, Jakarta menyumbang **17% PDB nasional** dan **6% PDB ASEAN**, menjadikannya pusat bisnis utama di kawasan regional. Dalam *Global Cities Index*, Jakarta berada di peringkat **30 dunia pada dimensi bisnis**, ditopang oleh jumlah perusahaan *unicorn*, arus logistik melalui bandara/pelabuhan, serta pertumbuhan pasar modal (Kearney, 2025). Artinya, fondasi ekonomi Jakarta kuat, tetapi untuk naik kelas sebagai kota global, aspek *cultural vibrancy*, *urban livability*, dan *global identity* perlu lebih ditonjolkan.

Salah satu sektor yang diyakini menjadi motor transformasi adalah **ekonomi kreatif**. Kontribusinya melonjak dari Rp 256 triliun pada 2018 menjadi Rp 362 triliun pada 2023, atau **10,5% PDRB kota** (BPS, 2019). Industri kreatif bukan hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga membangun *soft power* Jakarta sebagai kota dengan karakter, daya tarik, dan atmosfer khas.

Namun, masih ada kesenjangan. Aktivitas ekonomi Jakarta didominasi jam kerja siang, sedangkan **malam hari justru potensial namun kurang terkelola**. Padahal, kota-kota dunia seperti **Bangkok, Seoul, Taipei**, hingga **Sydney** sudah mengadopsi model *24-hour city* di mana malam menjadi waktu produktif bagi pariwisata, hiburan, transportasi, dan gaya hidup. Konsep ini dikenal sebagai **Owl Economy**: ekosistem urban yang tetap hidup setelah senja, tidak hanya lewat bar atau klub, tetapi juga **ruang publik aktif malam hari, festival seni, wellness and sport, kuliner jalanan, coworking space, hingga hiburan berbasis komunitas**.



Bagi Jakarta, ekonomi malam bukan sekadar *lifestyle*, tetapi strategi pembangunan. Dengan **4,27 juta pekerja penuh waktu** (BPS, 2023), basis konsumen sudah ada. Pergeseran pola konsumsi warga urban yang mencari rekreasi usai kerja mempertegas urgensi. Jika difasilitasi dengan infrastruktur, keamanan, dan identitas kota yang jelas, maka malam dapat menjadi waktu produksi ekonomi, rekreasi sosial, dan penguatan kohesi komunitas.

Dari sisi spasial, Jakarta menunjukkan geografi malam yang unik. **CBD (Sudirman–Thamrin)** cenderung sepi selepas jam kerja, sementara **koridor suburban-lifestyle** (Blok M, Kemang, Tebet, PIK) justru semakin ramai setelah pukul 19.00. **Kota Tua–Glodok** mulai dihidupkan melalui revitalisasi, berpotensi menyeimbangkan dominasi suburban. Pola ini memperlihatkan

bahwa malam Jakarta bukan sekadar “*after hours*”, tetapi arena kompetisi identitas kawasan: mana yang mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan otentik akan jadi magnet *urban tourism*.

Selain aspek ekonomi dan spasial, ada pula dimensi **sosial-budaya**. Aktivasi malam mendorong keterlibatan UMKM, komunitas seni, hingga *sport enthusiast*. *Night run*, *night ride*, dan *skating* kini menjadi tren rekreasi sehat yang menandai bahwa ekonomi malam tidak melulu konsumtif, tetapi bisa produktif, edukatif, bahkan menyehatkan. Dengan kata lain, *Owl Economy* memberi ruang bagi bentuk *wellness tourism* yang relevan dengan masyarakat urban global.



Secara tata kelola, peluang ini perlu kerangka regulasi yang jelas. Pergub ekonomi kreatif, Kepgub 588/2022, hingga RTRW menjadi fondasi, namun ke depan perlu **standarisasi keamanan, hospitality, tata kelola ruang publik, hingga royalti musik di ruang terbuka**. Semua ini penting untuk menciptakan iklim kondusif dan setara bagi pelaku industri kreatif, investor, serta komunitas lokal.

Dalam horizon **2025–2030**, arah pengembangan wisata urban Jakarta akan fokus pada **tiga polar utama**:

1. **Blok M** – *continuing*, konsolidasi dari ekosistem yang sudah matang.
2. **Sabang–Bundaran HI–Cikini** – *commencing*, tumbuh sebagai pusat kuliner dan event kota.
3. **Glodok–Kota Tua** – *preparing*, siap menjadi ikon pada 2029 seiring selesainya MRT Utara.

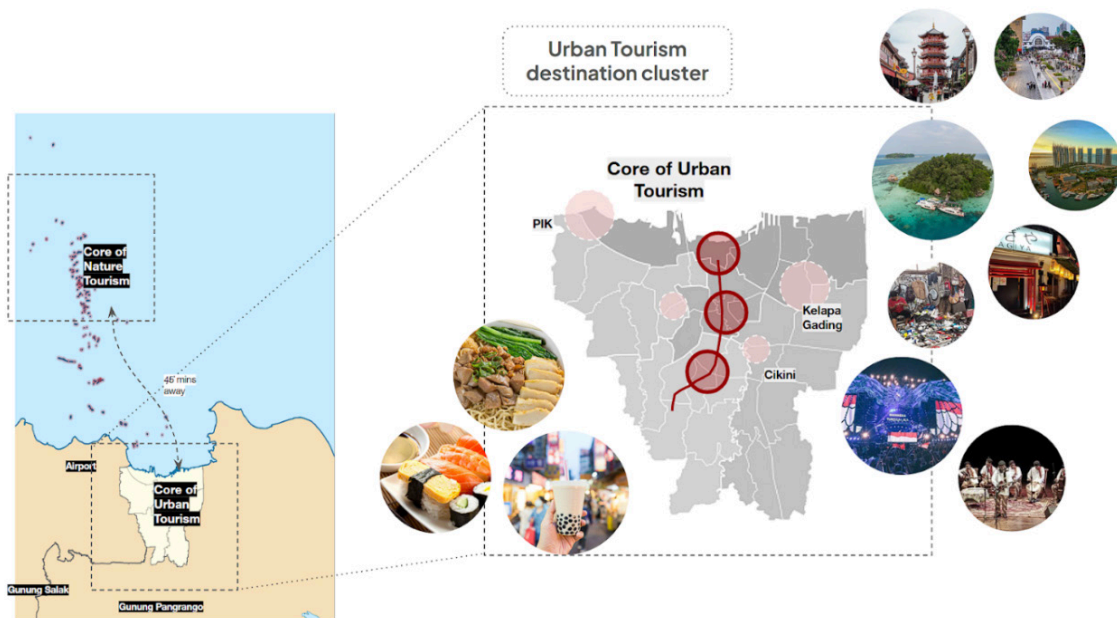
Dengan kerangka **3A+1C (Accessibility, Amenities, Attractions, Community)**, Jakarta dapat menyusun strategi spasial, regulasi, dan *branding*. Implementasi ekonomi malam bukan hanya *booster* pariwisata, melainkan strategi untuk memperpanjang durasi kunjungan wisatawan, memperluas peluang kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat daya tarik global.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana Jakarta dapat menata dan mengembangkan ekonomi malam sebagai **jalan menuju kota global yang inklusif, kompetitif, dan berkarakter**.

KERANGKA TEORI & KAJIAN

Jakarta sebagai kota global memiliki dua basis pariwisata utama: **natural tourism** (pulau, taman, pesisir) dan **urban tourism** (heritage, ekonomi kreatif, kuliner, hiburan). Karakternya berbeda *natural tourism* mengandalkan lanskap dan daya tarik alam, sementara *urban tourism* bertumpu pada konektivitas, aksesibilitas, keamanan, serta atraksi dan kelengkapan kota (*amenity*) perkotaan.

Kerangka teoritis kajian ini merujuk pada Kearney RISE#20, khususnya arahan 4a.3 tentang pengembangan *destination clusters & themed zones* dan 4a.4 mengenai penguatan *night time economy*. Kedua poin ini dipandang relevan untuk Jakarta karena menempatkan pariwisata urban dan ekonomi kreatif sebagai instrumen strategis dalam transformasi menuju kota global.



Figur 1 : Konstelasi basis pariwisata Jakarta

Sejauh ini, berbagai studi dan regulasi telah hadir, mulai dari Grand Design ekonomi kreatif, Jakarta Kota Kuliner, strategi Ruang Kreatif, hingga evaluasi event kreatif. Namun, banyak diantaranya bersifat parsial sehingga belum menghasilkan panduan yang fokus dan menyeluruh. Karena itu, kajian ini berfungsi sebagai ringkasan terstruktur yang melebur temuan-temuan sebelumnya dengan acuan nomor referensi pada dokumen induk.

Untuk menjaga fokus, analisis pada bab 3 diklasifikasikan dalam **tiga hal utama: spasial, branding, dan regulasi**. Ketiganya dipilih karena menjadi fondasi dalam membangun ekosistem *Owl Economy* Jakarta menghubungkan ruang, citra kota (*urban character*), dan kerangka hukum sebagai satu kesatuan. Bagian berikutnya akan menjabarkan masing-masing dimensi secara lebih rinci.

A KERANGKA KAJIAN SPASIAL KOTA MALAM HARI



Teori Pengembangan Zona Pariwisata

Amenities	Attraction (Culture, Nature, Art)	Accessibility	Community & Livelihood
Hotel Restoran & Hangout Place Parks Tourism Information Center Community Center	Heritage space MICE Tourism Art Performance Shopping Street	Jalan Pedestrian Way Public Transport Tourism Trail	Urban Behavior Local Lifestyle Established Community

Figur 2 : Basis Pengembangan Pariwisata Perkotaan

Urban Character – citra, sejarah, & arsitektur kota dibaca melalui:

- *Accessibility* – transportasi publik, *walkability*, konektivitas
- *Amenities* – fasilitas publik, keamanan, penerangan, parkir
- *Attraction* – daya tarik wisata (kuliner, seni, hiburan, olahraga)
- *Community* – aktor lokal, UMKM, komunitas seni & olahraga

Metode Pengembangan Zona Wisata Urban

Zona wisata urban merupakan konsep pengembangan wilayah perkotaan yang mengintegrasikan fungsi wisata, ekonomi kreatif, serta kehidupan sosial masyarakat kota. Dalam konteks Jakarta, pengembangan zona wisata urban menjadi penting karena kota ini berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan pemerintahan yang terus mengalami tekanan urbanisasi. Menurut teori *urban tourism* (Ashworth & Page, 2011), wisata perkotaan tidak hanya berorientasi pada daya tarik fisik, tetapi juga pada pengalaman sosial dan budaya yang diciptakan melalui interaksi komunitas lokal. Selain itu, konsep *place-making* (*Project for Public Spaces*, 2005) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun ruang publik yang hidup dan bermakna. Dengan demikian, pendekatan pengembangan zona wisata urban di Jakarta harus menggabungkan aspek spasial, sosial, dan ekonomi secara simultan.

i. Identifikasi karakter kawasan (heritage, kreatif, pesisir, komersial)

Identifikasi karakter distrik merupakan fondasi awal dalam pengembangan zona wisata urban karena tahap ini menentukan arah intervensi dan strategi pengelolaan kawasan. Menurut teori urban *morphology* yang dikemukakan oleh Conzen (2004), setiap kawasan kota memiliki struktur dan pola yang terbentuk secara historis melalui proses interaksi antara aktivitas sosial, fungsi ekonomi, dan elemen fisik seperti tata bangunan, jaringan jalan, serta ruang publik. Dalam konteks ini, kota dipahami bukan sekadar kumpulan bangunan, melainkan sistem spasial yang mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat di dalamnya. Pendekatan morfologis memungkinkan perencana kota dan pengembang wisata untuk menafsirkan bagaimana ruang terbentuk dan bagaimana maknanya dapat dihidupkan kembali melalui strategi desain maupun revitalisasi berbasis nilai lokal.

Di Jakarta, pendekatan ini menjadi krusial karena kota ini merupakan mozaik dari berbagai lapisan sejarah dan fungsi. Setiap distrik memiliki identitas unik yang lahir dari kombinasi konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan pengamatan spasial dan karakteristik fungsionalnya, kawasan-kawasan di Jakarta dapat dibedakan menjadi empat kategori utama: distrik *heritage*, distrik kreatif, distrik pesisir, dan distrik komersial. Distrik *heritage* seperti Kota Tua dan Pasar Baru memancarkan nilai sejarah kolonial

yang masih kuat, menjadi simbol perjalanan panjang urbanisasi Jakarta. Distrik kreatif seperti Kemang dan Tebet berkembang melalui aktivitas komunitas seni, kuliner, dan budaya independen yang memunculkan identitas baru bagi generasi muda perkotaan. Kawasan pesisir seperti Ancol dan Sunda Kelapa mencerminkan hubungan Jakarta dengan laut dan aktivitas maritim, sedangkan distrik komersial seperti Sudirman–Thamrin menjadi representasi modernitas dan pusat ekonomi global kota.

Untuk memahami dan mengelola keanekaragaman tersebut, pendekatan analitis berbasis spasial seperti *urban character mapping* menjadi alat penting dalam perencanaan. Metode ini berfokus pada pemetaan elemen-elemen kunci yang membentuk identitas kawasan, termasuk pola bangunan, intensitas aktivitas, arus pejalan kaki, dan persepsi masyarakat terhadap ruang. Selain itu, *cultural asset inventory* digunakan untuk mengidentifikasi aset-aset budaya, baik yang berwujud (*tangible*) seperti bangunan cagar budaya, maupun yang tak berwujud (*intangible*) seperti tradisi kuliner, praktik seni, atau festival lokal. Dalam konteks Jakarta, penerapan dua metode ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan laten suatu kawasan yang dapat dikembangkan menjadi nilai tambah dalam ekosistem wisata urban yang berkelanjutan.



Selain analisis spasial, teori *heritage urbanism* yang dikembangkan oleh Pendlebury (2009) menawarkan perspektif penting dalam menjaga relevansi kawasan bersejarah di tengah modernisasi. Teori ini menekankan bahwa pelestarian warisan budaya kota tidak boleh berhenti pada konservasi fisik semata, melainkan perlu dikombinasikan dengan strategi adaptasi fungsi. Misalnya, bangunan kolonial di kawasan Kota Tua dapat diadaptasi menjadi ruang kreatif, galeri seni, atau pusat UMKM yang memadukan nilai historis dengan kebutuhan ekonomi kontemporer. Dengan cara ini, pelestarian menjadi bagian dari strategi regenerasi ekonomi dan sosial, bukan sekadar upaya menjaga masa lalu.

Penerapan pendekatan morfologis dan *heritage urbanism* dalam pengembangan zona wisata urban di Jakarta menuntut sinergi lintas

sektor antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku swasta. Pemerintah berperan sebagai fasilitator regulasi dan infrastruktur, sementara komunitas dan pelaku industri kreatif berfungsi sebagai penggerak yang memastikan kawasan tetap dinamis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kombinasi analisis spasial, pemetaan aset budaya, dan partisipasi publik, identifikasi karakter distrik tidak hanya menghasilkan deskripsi teknis, tetapi juga narasi sosial yang merepresentasikan semangat dan identitas warga Jakarta. Dengan demikian, setiap zona wisata urban yang dikembangkan bukan sekadar destinasi, melainkan ruang hidup yang terus berevolusi seiring dengan denyut kota.

ii. Mapping komunitas & pelaku industri lokal

Mapping komunitas merupakan tahapan penting dalam memahami struktur sosial dan jaringan ekonomi kreatif yang menopang keberlangsungan zona wisata urban. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa kota bukan hanya ruang fisik, tetapi juga jaringan sosial yang hidup, di mana setiap individu dan komunitas memainkan peran dalam membentuk identitas kawasan. Menurut Landry (2000), konsep *creative city* menempatkan kreativitas warga sebagai kekuatan utama pembangunan kota. Kreativitas di sini tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan artistik, tetapi juga kemampuan warga untuk menemukan solusi inovatif terhadap tantangan perkotaan. Dengan demikian, pemetaan komunitas menjadi cara strategis untuk mengenali potensi sosial dan ekonomi yang ada di dalam suatu kawasan wisata.

Proses *mapping* komunitas dilakukan melalui beberapa metode utama: *stakeholder mapping*, *community profiling*, dan *network analysis*. *Stakeholder mapping* bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor utama yang berperan dalam pengembangan kawasan, termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan. Sementara itu, *community profiling* berfokus pada karakteristik sosial-ekonomi masyarakat seperti demografi, pola pekerjaan, dan tingkat

partisipasi dalam kegiatan publik. Metode *network analysis* digunakan untuk memahami hubungan antar-aktor dan tingkat kolaborasi di antara mereka, sehingga dapat diidentifikasi titik-titik kuat dan lemah dalam ekosistem kawasan. Ketiga pendekatan ini jika diterapkan secara integratif dapat menghasilkan peta sosial yang menggambarkan bagaimana kekuatan komunitas dapat dioptimalkan untuk memperkuat daya tarik wisata urban.

Di Jakarta, praktik *mapping* komunitas telah menunjukkan dampak nyata dalam menciptakan kawasan wisata yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Komunitas seperti Ruangrupa di Tebet, misalnya, menjadi pionir dalam menghubungkan seni kontemporer dengan ruang publik kota. Melalui kegiatan pameran, workshop, dan kolaborasi lintas sektor, mereka berhasil mengubah ruang-ruang biasa menjadi arena ekspresi kultural yang menarik wisatawan dan warga lokal. Begitu pula dengan Jakarta Good Guide, komunitas yang berfokus pada tur jalan kaki (*walking tour*) berbasis narasi sejarah dan budaya lokal. Pendekatan mereka memperlihatkan bagaimana partisipasi warga dapat menghadirkan pengalaman wisata yang autentik dan edukatif tanpa memerlukan infrastruktur besar, melainkan melalui pengetahuan dan cerita yang hidup di antara masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam konteks ini tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari kegiatan pariwisata, tetapi juga sebagai aktor penggerak ekonomi lokal. Evans (2009) menekankan bahwa keberhasilan sebuah *creative district* bergantung pada kemampuan komunitas untuk menciptakan nilai ekonomi melalui kreativitas dan jaringan sosialnya. Dalam konteks Jakarta, hal ini tercermin pada kolaborasi antara pelaku UMKM, komunitas kuliner, seniman lokal, dan pengelola ruang kreatif yang saling menghidupi. Misalnya, acara seperti Pasar Santai Kemang atau Tebet Eco Festival memperlihatkan bagaimana kegiatan komunitas mampu menciptakan sirkulasi ekonomi mikro yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga sekaligus memperkuat identitas kawasan.

Lebih jauh, *mapping* komunitas juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan bagi pemerintah kota dalam merumuskan strategi pembangunan berbasis masyarakat. Dengan memahami peta sosial-ekonomi dan jaringan kolaboratif di suatu kawasan, pemerintah dapat merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran misalnya dalam bentuk pelatihan, dukungan promosi, atau kemitraan publik-swasta. Dalam konteks pengembangan zona wisata urban di Jakarta, hasil pemetaan komunitas ini dapat menjadi dasar untuk menciptakan model tata kelola kolaboratif (*co-governance model*) di mana keputusan pembangunan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga lahir dari aspirasi dan kapasitas masyarakat setempat. Dengan demikian, *mapping* komunitas bukan hanya proses teknis, tetapi juga bentuk demokratisasi ruang kota melalui pengakuan atas peran aktif warga dalam membentuk citra dan kehidupan urban.



iii. Rancang aktivasi publik (*pop-up market, car-free night, light festival*)

Perancangan aktivasi publik merupakan tahap krusial dalam proses *place-making*, yaitu upaya menciptakan ruang kota yang memiliki makna sosial, nilai ekonomi, dan identitas kultural yang kuat. Menurut Project for Public Spaces (2005), ruang publik yang hidup tidak terbentuk hanya karena desain fisik yang menarik, tetapi karena adanya peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif di dalamnya. *Place-making* menekankan bahwa ruang publik harus dirancang sebagai wadah interaksi sosial yang memfasilitasi kegiatan ekonomi, budaya, dan rekreasi warga kota. Dalam konteks pengembangan zona wisata urban, aktivasi publik menjadi instrumen untuk mengubah ruang statis menjadi pengalaman dinamis yang mampu menarik wisatawan sekaligus memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*) di kalangan warga lokal.

Aktivasi publik dapat diwujudkan melalui serangkaian kegiatan temporer yang mampu memanfaatkan potensi ruang secara fleksibel. Kegiatan seperti *pop-up market, car-free night, light festival, creative bazaar*, atau pertunjukan seni jalanan merupakan contoh intervensi ringan yang memiliki dampak besar terhadap persepsi publik terhadap ruang kota. Menurut Bishop dan Williams (2012) dalam konsep *temporary urbanism*, ruang sementara memiliki kekuatan untuk menguji ide-ide baru dan menciptakan inovasi sosial tanpa memerlukan investasi besar. Di Jakarta, praktik ini dapat dilihat dari berbagai inisiatif seperti Jakarta Car Free Day yang mengubah jalan protokol menjadi ruang komunitas setiap akhir pekan, atau Jakarta Light Festival yang menghadirkan pengalaman visual dan artistik di ruang terbuka. Kedua program tersebut menunjukkan bagaimana ruang kota dapat berfungsi sebagai platform sosial yang memperkuat konektivitas antarwarga.

Prinsip utama dalam perancangan aktivasi publik meliputi inklusivitas, konektivitas, dan keberlanjutan sosial-ekonomi. Inklusivitas menekankan bahwa ruang publik harus dapat diakses dan dinikmati oleh semua kelompok masyarakat, tanpa memandang usia, gender, atau latar belakang sosial. Konektivitas mengacu pada kemampuan ruang publik untuk menghubungkan orang, tempat, dan aktivitas, baik secara fisik maupun digital. Sementara itu, keberlanjutan sosial-ekonomi menuntut agar setiap kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam konteks Jakarta, prinsip-prinsip ini menjadi penting mengingat heterogenitas sosial yang tinggi serta tantangan urban seperti kemacetan, ketimpangan ruang, dan tekanan terhadap lingkungan.

Lebih jauh, aktivasi publik juga berfungsi sebagai strategi branding kota yang efektif. Menurut Richards dan Palmer (2010), kegiatan berbasis pengalaman (*experience-based events*) mampu meningkatkan daya tarik kota melalui penciptaan narasi emosional yang melekat pada ruang. Ketika warga dan wisatawan memiliki pengalaman positif terhadap suatu kawasan, mereka tidak hanya menjadi pengunjung, tetapi juga duta informal yang memperkuat citra

kota. Di Jakarta, kegiatan seperti Jakarta Creative Festival, Festival Jalan Jaksa, dan City Forest Pop-Up Market merupakan contoh bagaimana peristiwa kultural dan sosial dapat berfungsi sebagai alat promosi destinasi urban. Aktivasi publik semacam ini memperlihatkan pergeseran dari pendekatan pariwisata konvensional menuju model pariwisata berbasis pengalaman (*experiential urban tourism*) yang lebih humanis dan partisipatif.

Agar keberlanjutan aktivasi publik dapat terjaga, diperlukan tata kelola yang kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Pemerintah kota berperan dalam penyediaan infrastruktur dan regulasi pendukung, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui kemitraan dan pembiayaan kegiatan. Di sisi lain, komunitas lokal menjadi aktor utama dalam memastikan relevansi kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan karakter kawasan. Di Jakarta, pendekatan ini telah mulai terlihat melalui inisiatif seperti Jakarta Experience Board yang berupaya menghubungkan potensi pariwisata, seni, dan industri kreatif dengan partisipasi warga. Dengan demikian, perancangan aktivasi publik bukan hanya soal menghidupkan ruang, tetapi juga membangun sistem kolaborasi yang menjadikan kota sebagai ekosistem kreatif yang berkelanjutan.



iv. Pengembangan infrastruktur pendukung (lampu, *signage*, CCTV, transportasi malam)

Infrastruktur pendukung merupakan salah satu komponen utama dalam memastikan keberlanjutan pengembangan zona wisata urban. Dalam perspektif perencanaan kota modern, keberadaan infrastruktur tidak hanya dimaknai sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya di suatu kawasan. Roberts dan Eldridge (2009) menekankan bahwa pengembangan ekonomi malam hari atau *night-time economy* hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh infrastruktur yang aman, nyaman, dan memiliki konektivitas yang baik antarzona. Hal ini mencakup jaringan transportasi yang beroperasi hingga malam hari, pencahayaan jalan yang memadai, serta sistem keamanan publik yang mampu menciptakan rasa aman bagi wisatawan maupun warga lokal.

Dalam konteks Jakarta, keberadaan infrastruktur keras (*hard infrastructure*) seperti penerangan umum, signage yang jelas, dan sistem transportasi malam menjadi elemen fundamental dalam membangun pengalaman wisata yang inklusif. Misalnya, jalur transportasi publik seperti TransJakarta dan MRT yang kini memperpanjang jam operasionalnya hingga malam hari menunjukkan adanya upaya peningkatan aksesibilitas wisata malam. Selain itu, pemasangan CCTV di ruang publik dan penguatan sistem keamanan di kawasan wisata seperti Kota Tua dan Sudirman-Thamrin memperlihatkan bagaimana aspek keamanan diposisikan sebagai faktor krusial dalam menarik wisatawan untuk beraktivitas di ruang publik pada malam hari.

Namun, infrastruktur keras tidak akan efektif tanpa diimbangi dengan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) yang mendukung manajemen dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Infrastruktur lunak mencakup kebijakan tata ruang, sistem regulasi terkait kegiatan ekonomi malam, serta program promosi digital yang mendorong partisipasi masyarakat. Di Jakarta, penerapan sistem *Smart City* menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem wisata urban yang efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui platform digital seperti Jakarta Kini dan Jaki, wisatawan dapat mengakses informasi mengenai acara, transportasi, dan aktivitas publik dengan lebih mudah, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengukur partisipasi dan persepsi publik secara *real-time*.

Selain regulasi dan sistem digital, keberlanjutan infrastruktur wisata juga bergantung pada pola kolaborasi antar aktor. Florida (2002) menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas kreatif dalam membangun *creative infrastructure* yang memperkuat identitas kota. Di Jakarta, kolaborasi semacam ini dapat terlihat melalui pengelolaan ruang publik seperti Taman Ismail Marzuki (TIM) dan kawasan Blok M, yang melibatkan komunitas seni, UMKM, serta sektor swasta dalam menghidupkan kembali kawasan tersebut sebagai destinasi wisata budaya dan hiburan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat basis ekonomi kreatif, tetapi juga membangun rasa memiliki di kalangan warga kota terhadap ruang publik mereka.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur pendukung untuk zona wisata urban di Jakarta tidak dapat hanya berorientasi pada estetika atau fungsi sesaat. Ia harus menjadi bagian dari visi jangka panjang kota yang inklusif, terhubung, dan berkelanjutan. Artinya, desain infrastruktur perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Integrasi antara sistem transportasi JakLingko, penerapan teknologi *smart governance*, dan dukungan komunitas lokal merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa kawasan wisata urban tidak hanya hidup di siang hari, tetapi juga berdenyut sepanjang malam. Dengan demikian, infrastruktur menjadi medium yang menghubungkan antara fungsi kota sebagai ruang hidup dan sebagai destinasi wisata yang dinamis.

v. **Monitoring & evaluasi berbasis data pengunjung**

Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengembangan zona wisata urban. Dalam kerangka tata kelola kota modern, proses ini berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran yang memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil empiris di lapangan. Menurut UNWTO (2018), evaluasi yang efektif harus mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif seperti jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, tingkat kepuasan, serta kontribusi ekonomi dan sosial terhadap masyarakat sekitar. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi tidak sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi juga alat strategis untuk memahami sejauh mana intervensi kebijakan benar-benar menciptakan dampak positif bagi ekosistem pariwisata perkotaan.

Salah satu pendekatan utama dalam proses evaluasi modern adalah penggunaan data dan teknologi digital untuk mengukur kinerja kawasan wisata secara *real-time*. *Visitor analytics* dan *location-based* data memungkinkan pemerintah daerah memperoleh gambaran akurat mengenai pola pergerakan wisatawan, titik kepadatan, dan durasi aktivitas di ruang publik. Misalnya, dengan memanfaatkan data dari jaringan Wi-Fi publik atau aplikasi smart city, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melacak dinamika pengunjung di kawasan wisata seperti Kota Tua atau Setu Babakan tanpa harus mengandalkan survei manual. Pendekatan ini memberikan data yang lebih objektif dan komprehensif, sehingga perencanaan program wisata ke depan dapat dilakukan secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Selain data kuantitatif, evaluasi juga perlu mempertimbangkan aspek persepsi dan pengalaman pengunjung sebagai refleksi dari kualitas destinasi wisata. Survei kepuasan, *focus group discussion* dengan pelaku usaha, serta analisis social media listening dapat menjadi alat penting untuk menangkap sentimen publik terhadap kawasan wisata urban. Melalui analisis media sosial, misalnya, pemerintah dapat memahami tren minat wisatawan, isu kebersihan atau keamanan, serta reputasi digital suatu kawasan. Di Jakarta, praktik ini dapat diterapkan untuk mengevaluasi program-

program seperti Jakarta Light Festival atau Car Free Day, dengan memantau bagaimana masyarakat menilai pengalaman mereka melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter).

Lebih lanjut, *monitoring* dan evaluasi harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam ekosistem pariwisata. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator kebijakan, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui pelaporan data bisnis, seperti tingkat hunian hotel atau penjualan tiket. Komunitas lokal dan pelaku UMKM, di sisi lain, dapat memberikan umpan balik mengenai dampak sosial ekonomi dari peningkatan wisatawan terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Pendekatan kolaboratif semacam ini tidak hanya memperkuat legitimasi hasil evaluasi, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata urban.

Pada akhirnya, tujuan utama dari *monitoring* dan evaluasi bukan sekadar untuk menilai keberhasilan jangka pendek, melainkan untuk membangun sistem adaptif yang mampu merespons perubahan dinamika kota. Jakarta sebagai kota megapolitan dengan karakter sosial yang kompleks memerlukan sistem evaluasi yang fleksibel, integratif, dan berorientasi pada inovasi. Melalui pemanfaatan big data, kolaborasi lintas sektor, dan publikasi hasil evaluasi secara transparan, proses pengembangan zona wisata urban dapat diarahkan menuju tata kelola yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, *monitoring* dan evaluasi berfungsi bukan hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai fondasi menuju perbaikan berkelanjutan dalam pembangunan pariwisata perkotaan Jakarta.

Pengembangan zona wisata urban di Jakarta memerlukan pendekatan multidimensi yang menggabungkan aspek spasial, sosial, ekonomi, dan budaya. Setiap tahap dari identifikasi karakter distrik hingga *monitoring* dan evaluasi harus dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis data. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing pariwisata kota, tetapi juga memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan kreatif.





B KERANGKA KAJIAN JENAMA WISATA KOTA MALAM HARI

Jakarta sudah melahirkan sejumlah slogan seperti Enjoy Jakarta, Kota Kolaborasi, dan Jakarta Hajatan, namun semuanya masih berhenti di permukaan. Yang dibutuhkan bukan sekadar tagline baru, melainkan identitas yang konsisten yang mampu menyatukan energi budaya, pariwisata, dan ambisi global kota. Branding kota adalah infrastruktur lunak, sebagaimana dibuktikan oleh *I amsterdam* atau *Seoul My Soul*, sebuah narasi yang lentur namun kuat yang sanggup menampung industri kreatif, gaya hidup urban, dan daya tarik pariwisata dalam satu bingkai yang mudah diingat.

Jakarta sebenarnya memiliki modal yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir kota ini menjadi tuan rumah *Monocle Conference* di 25Hours Astha, perhelatan seni

seperti Art Jakarta dan ICAD, serta inisiatif kuliner internasional seperti *Indonesia Gourmet* yang menjadikan Jakarta dan Bali sebagai poros utama. Semua ini menunjukkan bahwa panggung global tidak lagi jauh, tinggal bagaimana kota meramu kalender dan identitas bersama agar terasa kohesif. Narasi besar akan semakin kuat jika ditopang oleh program rutin seperti festival malam, pasar kreatif, atau museum *after hours* yang dikaitkan dengan janji *hospitality* yang aman, nyaman, dan kosmopolitan. Ujian terbesarnya sederhana, apakah publik baik warga maupun pengunjung akan secara alami mengaitkan Jakarta dengan pengalaman kota yang layak dituju dan diulang kembali. Saat itu tercapai, jenama Jakarta bukan lagi slogan semata, melainkan sebuah reputasi yang hidup di benak dunia.

Aspek Pengembangan Jenama Pariwisata Kota

Pengalaman

Festival malam, kawasan kuliner yang hidup sampai dini hari, dan *creative district* yang menyalakan aktivitas seni serta desain, semuanya adalah bentuk pengalaman nyata dari jenama kota.

Identitas

Jakarta memiliki sederet identitas resmi yang sudah diperkenalkan, mulai dari Enjoy Jakarta, Kota Kolaborasi, hingga Jakarta Hajatan. Namun, semua masih bergerak dalam orbit yang berbeda-beda. Tantangan utamanya adalah meramu satu identitas payung yang kuat, sederhana, dan mudah diingat di kancah global.

Komunikasi

Kampanye digital, kolaborasi dengan influencer, serta kehadiran di media global akan membantu Jakarta lebih dikenal bukan hanya sebagai ibu kota, melainkan sebagai destinasi urban dengan karakter yang unik.

Narasi

Jakarta punya peluang besar untuk diposisikan sebagai kota diplomasi, pusat bisnis, dan sekaligus laboratorium kreatif yang hidup 24 jam. Narasi ini bisa menempatkan Jakarta setara dengan Seoul, Tokyo, atau Bangkok kota dengan energi malam yang sama kuatnya dengan siang.

Konsistensi

Keselaran antara program pemerintah dan aktivasi swasta menjadi kunci. Dengan penyelarasan, setiap inisiatif baik festival musik, konferensi internasional, maupun pameran seni akan terasa sebagai bagian dari cerita kota yang sama.

Tahapan Pengembangan Jenama Wisata Kota Malam Hari

1. *Analisis Identitas Eksisting*

Mengkaji bagaimana citra Jakarta saat ini, apa yang sudah dikenal di dalam negeri maupun mancanegara, lalu membandingkannya dengan visi kota global 2045.

2. *Sintesis Narasi*

Merumuskan cerita bersama yang mengintegrasikan ekonomi kreatif, pariwisata, gaya hidup urban, dan ekonomi malam. Narasi inilah yang menjadi benang merah bagi semua aktivitas.

3. *Uji Narasi*

Menguji resonansi narasi ini ke publik dan komunitas kreatif lokal. Validasi lapangan penting agar branding tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga hidup dalam keseharian warganya.

4. *Desain Brand Architecture*

Membangun arsitektur jenama, dari identitas kota sebagai payung besar hingga turun ke zona atau klaster spesifik seperti Kota Tua, Blok M, Glodok, dan Kepulauan Seribu.

5. *Kampanye dan Monitoring*

Meluncurkan kampanye digital dan fisik yang terukur, sekaligus melakukan evaluasi berkala untuk menilai dampaknya terhadap awareness global.

C KERANGKA KAJIAN REGULASI WISATA KOTA MALAM HARI

Kajian ini menempatkan regulasi sebagai fondasi utama dalam memahami bagaimana ekonomi malam atau *Owl Economy* dapat tumbuh di Jakarta. Sebagai kota yang tengah menapaki ambisi globalnya, Jakarta memerlukan tata kelola pariwisata yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan gaya hidup urban, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dan terintegrasi. Setiap aktivitas mulai dari kuliner malam, pertunjukan seni, hingga operasional ruang publik di luar jam konvensional terikat pada aturan yang membentuk ekosistem kota. Karena itu, analisis terhadap regulasi menjadi langkah pertama untuk menilai sejauh mana kerangka kebijakan yang ada mampu memberi ruang bagi inovasi, sekaligus menjaga ketertiban sosial dan keberlanjutan ekonomi.



Pendekatan dalam kajian ini menggunakan metode hierarki peraturan, untuk membaca alur dan keterkaitan antar dokumen hukum yang membingkai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta. Kerangka analisis mengikuti asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, di mana aturan yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi implementasi di level teknis. Empat regulasi utama menjadi fokus pembacaan:

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan,
2. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata,
3. Keputusan Gubernur Nomor 588 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Urban
4. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia.

Keempatnya membentuk kerangka vertikal yang merepresentasikan visi, struktur, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan pariwisata di tingkat provinsi.

Analisis terhadap setiap regulasi dibangun melalui tiga dimensi utama: **normatif**, **struktural**, dan **operasional**. Dimensi normatif menelusuri nilai, prinsip, dan arah pembangunan pariwisata yang diatur di tingkat peraturan daerah. Dimensi struktural melihat bagaimana kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan dibagi antar lembaga. Sementara dimensi operasional menelaah regulasi teknis yang memengaruhi kegiatan sehari-hari, mulai dari izin usaha, pembinaan pelaku pariwisata, hingga penegakan sanksi. Ketiga dimensi ini menjadi alat untuk menilai sejauh mana sistem hukum yang berlaku siap menghadapi kompleksitas ekonomi malam yang berlangsung lintas waktu dan sektor.

Dari kerangka ini, kajian diarahkan untuk menemukan **titik integrasi dan potensi celah** antar regulasi, baik antara visi makro yang dirumuskan dalam kebijakan strategis maupun pelaksanaannya di lapangan. Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi penyederhanaan izin melalui *one stop permit system*, mekanisme pembinaan bagi pelaku usaha malam, penataan signage dan reklame, serta perlindungan konsumen dan warga sekitar kawasan wisata malam. Semua aspek ini kemudian akan menjadi dasar untuk merumuskan **rekomendasi kebijakan**, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian analisis dan rekomendasi regulasi.



Aspek Regulasi

1. *Legal Framework:*

UU, Perda, Pergub, Kepgub yang relevan (RTRW, pariwisata, ekonomi kreatif, keamanan).

2. *Governance:*

Koordinasi antar OPD, peran Pemprov vs pemerintah pusat, pembagian tanggung jawab dengan swasta.

3. *Permitting:*

Proses perizinan, *one-stop permit*, izin keramaian, *clear due diligence*.

4. *Safety & Order:*

Aturan keamanan, penerangan, perlindungan konsumen, pengaturan PKL & signage.

5. *Incentives:*

Insentif pajak, subsidi, dukungan promosi, pendanaan komunitas.

Metode atau Tahapan Pengembangan Regulasi

1. *Audit regulasi eksisting:*

Mapping aturan yang relevan dan gap.

2. *Benchmarking:*

Bandingkan dengan kota global (Seoul, Berlin, Sydney).

3. *Konsultasi publik:*

FGD dengan pelaku ekonomi kreatif, komunitas, pengelola kawasan.

4. *Drafting regulasi baru atau revisi:*

Pergub Owl Economy.

5. *Implementasi & enforcement:*

Sistem reward & punishment, monitoring keamanan

BAB 3

ANALISIS

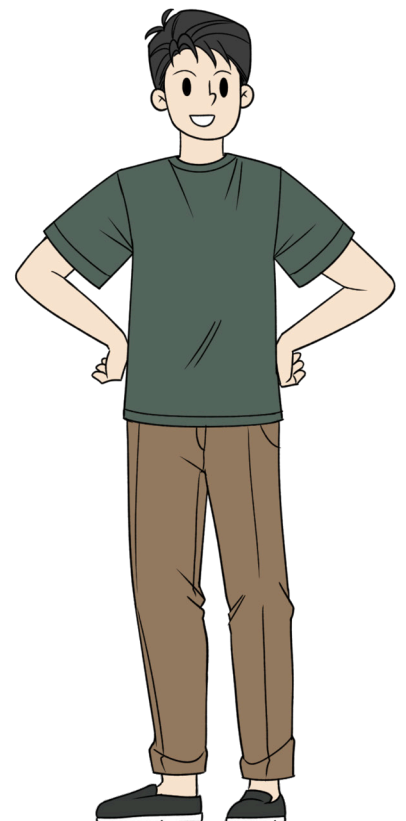


DEFINISI EKONOMI KREATIF MALAM HARI

Owl Economy dipahami sebagai konsep kota yang hidup penuh selama 24 jam, di mana aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya berlangsung terus-menerus tanpa terhenti oleh waktu. Ekonomi malam tidak lagi semata identik dengan hiburan malam, tetapi mencakup ekosistem perkotaan yang utuh: kuliner, musik, seni pertunjukan, olahraga, hingga berbagai bentuk *leisure* lainnya. Seluruh warga kota dapat dipandang sebagai wisatawan urban, entah pekerja kantoran yang singgah menikmati makan malam di Sabang, keluarga yang berkunjung ke festival kuliner, komunitas olahraga yang menggelar *night run* di Sudirman, atau pengunjung museum yang menghadiri pameran *after hours*. Dengan demikian, pariwisata urban tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, melainkan hadir dalam ritme kehidupan kota sehari-hari.

Kajian Kearney menempatkan penguatan *night time economy* sebagai salah satu pilar menuju kota global. Lima instrumen menjadi tumpuannya, yaitu:

1. Penetapan *night time economy zones* di distrik tertentu dengan jam operasional panjang, pencahayaan yang memadai, keamanan, dan event rutin.
2. Diversifikasi atraksi malam yang tidak hanya berfokus pada bar atau klub, tetapi juga kafe larut malam, rooftop, konser musik, pertunjukan seni, hingga bioskop luar ruang.
3. Festival bulanan yang digelar di berbagai kawasan, menghidupkan kota secara merata.
4. Kampanye pemasaran terpadu melalui media sosial, influencer, dan platform pariwisata untuk menegaskan identitas Jakarta sebagai kota 24 jam.
5. Perpanjangan jam operasional MRT, LRT, dan TransJakarta agar mobilitas malam tetap aman dan inklusif.



Melalui instrumen ini, ekonomi malam dipahami bukan hanya sebagai perpanjangan jam aktivitas, melainkan juga ruang tumbuh bagi ekosistem ekonomi kreatif dari kuliner dan musik hingga olahraga dan seni pertunjukan.

Diskusi FGD bersama pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan pengelola kawasan pada 11 September 2025 memperlihatkan kebutuhan konkret yang lebih mbumi. Mereka menekankan bahwa destinasi malam harus benar-benar berfungsi sebagai ruang campuran; *indoor*, *outdoor*, maupun ruang terbuka hijau yang mampu menggabungkan kuliner, musik, olahraga, dan seni. Partisipasi komunitas lokal, warga sekitar, pemilik usaha, dan pemerintah dilihat bukan sebagai tambahan, melainkan fondasi agar kawasan tetap hidup dan berkelanjutan. Keamanan, kenyamanan, pencahayaan, akses transportasi publik, jalur pejalan kaki, serta parkir menjadi syarat mutlak. Selain itu, regulasi yang jelas mengenai jam operasional, batas usia pengunjung, *signage* halal, standar kebersihan, hingga sistem *reward* dan *punishment* dipandang penting untuk menjaga kualitas ekosistem malam dan melindungi konsumen.

Kerangka makro Kearney mengarahkan Jakarta untuk mengembangkan kluster destinasi tematik seperti Kota Tua, Ancol, Glodok, dan Kepulauan Seribu, sekaligus memperkuat ekosistem malam sebagai strategi kota global. Namun, hasil FGD mengingatkan bahwa kebutuhan mikro belum sepenuhnya terjawab. Signage yang jelas, keterlibatan komunitas dalam pengelolaan, perlindungan privasi warga sekitar, serta standar operasional detail merupakan aspek krusial yang perlu diperkuat. Kajian-kajian lokal yang ada sebelumnya, baik tentang ekonomi kreatif, kuliner, maupun event, masih terfragmentasi dan belum menghadirkan integrasi lintas sektor. Di sinilah kajian ini mengambil posisi: menyatukan kerangka global dan masukan lokal, sehingga *Owl Economy* Jakarta tidak berhenti pada wacana hiburan malam, tetapi menjadi ekosistem kota 24 jam yang aman, inklusif, dan berakar pada partisipasi warga.

Analisis pada sub-bab berikut dibedah dalam tiga dimensi utama: pengembangan spasial, penguatan regulasi, dan pembentukan jenama kota. Tiga dimensi ini menjadi pijakan untuk menurunkan kerangka konseptual ke dalam strategi implementasi yang nyata.



Provinsi DKI Jakarta

Jakarta adalah kota dengan denyut ekonomi yang tersebar. Ia tidak tumbuh dari satu pusat tunggal, melainkan dari berbagai simpul aktivitas yang lahir secara organik. Setiap kawasan memiliki ritmenya sendiri, beberapa hidup di siang hari, sementara lainnya justru menemukan energinya saat malam tiba. Kawasan seperti Muara Karang Raya dan Pluit tumbuh sebagai koridor kuliner malam yang padat. Begitu pula dengan Kelapa Gading yang hidup di sepanjang Jalan Boulevard dengan restoran, kafe, dan pusat hiburan keluarga yang ramai hingga larut malam. Sementara itu, Pantai Indah Kapuk termasuk Pantai Maju dan Pantai Kita berkembang menjadi kawasan baru dengan motor penggerak utama sektor swasta, membangun lanskap urban yang modern dan bergaya hidup kosmopolitan.

Seluruh kawasan ini telah terlayani oleh jaringan bus TransJakarta, baik koridor *high deck* maupun *low deck*, namun belum terhubung oleh sistem transportasi berbasis rel. Keterbatasan ini membuat tingkat kenyamanan dan kemudahan konektivitasnya berbeda dengan kawasan yang terintegrasi dengan MRT dan LRT. Karena itu, pengembangan *Owl Economy* atau ekonomi malam berbasis kreativitas

difokuskan pada koridor yang memiliki *backbone* transportasi publik berbasis rel yang andal dan menawarkan *sense of renewal*, baik secara infrastruktur maupun budaya kota.

Dalam konteks perencanaan jangka menengah menuju 500 tahun Jakarta dan akhir RPJMD 2025–2029, tiga polar utama dipilih sebagai laboratorium ekonomi malam kota. Ketiganya tidak hanya strategis secara spasial, tetapi juga merepresentasikan spektrum perkembangan ekonomi kreatif yang saling berkesinambungan antara pusat, selatan, dan utara kota. Ketiga polar ini dirancang untuk bekerja dengan basis ekonomi, terhubung oleh sistem transportasi berbasis rel seperti MRT dan LRT yang menjadi tulang punggung baru kota.

Selain daratan utama, Jakarta memiliki dimensi geografis yang unik karena terhubung langsung dengan Kepulauan Seribu, gugusan pulau-pulau kecil yang berfungsi sebagai *core of natural tourism*. Hubungan darat dan laut ini menjadikan Jakarta satu-satunya ibukota di Asia Tenggara dengan ekosistem pariwisata urban dan bahari yang saling melengkapi.

Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu, yang ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6310/Kpts-II/2002, membentang seluas 107.489 hektar dan mencakup gugusan pulau-pulau kecil serta perairan dangkal di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan ini menjadi wajah alternatif dari Jakarta yang padat dan dinamis, di mana pasir putih, laut biru kehijauan dan kehidupan bahari menjadi ruang bagi pelarian dan keseimbangan.

Beberapa penginapan unggulan di kawasan ini menghadirkan pengalaman yang berbeda. Sebagai contoh, Sepa Island Resort menawarkan paket 2 hari 1 malam mulai dari Rp 2.850.000 per orang (termasuk transportasi laut, penginapan *cottage*, seluruh makan, *infinity pool* dan Wi-Fi) untuk periode reguler. Sementara itu, Pulau Macan Eco Lodge menyediakan paket menginap dengan tarif mulai dari sekitar Rp 1.982.500 per orang untuk satu malam, termasuk speedboat, akomodasi dan kegiatan snorkeling/kanu.

Dengan *range* harga ini terbentang pengalaman dari *luxury eco-retreat* hingga resor yang lebih ramah anggaran namun tetap eksklusif. Bagi wisatawan yang lebih hemat, Pulau Pramuka tetap menjadi

pilihan dengan suasana komunitas lokal yang autentik dan biaya yang jauh lebih ringan.

Dalam konteks pengembangan kota malam yang hidup 24 jam, Kepulauan Seribu menjadi *support polar*, bukan sebagai kawasan ekonomi malam urban, tetapi sebagai *extension* yang memperkuat narasi Jakarta sebagai kota dengan dualitas unik: kota metropolitan dan pulau resort. Sebuah malam di tengah kota yang ramai akan terasa lebih seimbang jika terdapat pagi di pulau tenang yang mudah diakses, dan sebaliknya. Aksesibilitas ke pulau-pulau ini perlu ditingkatkan melalui penguatan kebijakan transportasi laut dan koneksi dermaga alternatif. Dermaga di kawasan Pantai Indah Kapuk dapat menjadi alternatif selain dermaga tradisional di Marina Ancol dan Dermaga Kali Adem, sehingga perjalanan menuju pulau menjadi bagian dari pengalaman kota.

Kepulauan Seribu bukan sekadar destinasi wisata bahari, melainkan bagian integral dari sistem kota yang berdaya saing global di mana malam kota dan pagi pulau bersatu dalam satu lanskap yang berkelanjutan dan inklusif.

Daratan Jakarta

Daratan Jakarta adalah representasi kota dengan kehidupan ekonomi tidak berhenti pada jam kantor. Koridor ekonomi malam yang paling potensial terletak di jalur transportasi berbasis rel, baik MRT maupun LRT yang menghubungkan kawasan kreatif dan komersial seperti Blok M, Bundaran HI, dan Kota Tua. Pendekatan ini mengikuti teori *polycentric urbanism*, di mana kota dikembangkan melalui banyak pusat aktivitas yang saling terhubung.

Jane Jacobs dalam *The Death and Life of Great American Cities* menekankan pentingnya keberadaan “*eyes on the street*,” atau kehidupan malam yang membuat kota terasa aman, aktif, dan menarik. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan kota 24 jam di Jakarta, di mana aktivitas malam bukan sekadar hiburan, tetapi juga bagian dari keseharian warga dan ekonomi kreatif.

Jakarta hari ini masih menghadapi tantangan klasik *urban sprawl*, di mana aktivitas ekonomi terkonsentrasi di pusat kota pada siang hari sementara sebagian besar penduduk tinggal di pinggiran. Ekonomi malam menjadi jawaban agar kota tetap berdenyut di luar jam kerja, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan ruang bagi industri kreatif, kuliner, dan hiburan yang inklusif.

Polar 1:
Blok M – Cipete
(Continuing)

Blok M dan sekitarnya telah tumbuh alami sebagai kutub ekonomi kreatif selatan, tempat berbagai lapisan masyarakat berinteraksi dari siang hingga dini hari. Kawasan ini diarahkan menjadi transportation hub utama, menghubungkan MRT, TransJakarta, serta jalur pedestrian yang hidup di malam hari. Polanya adalah melanjutkan atau *continuing* denyut kehidupan malam yang sudah terbentuk dari ruang publik, bar dan izakaya di Little Tokyo, hingga deretan kuliner Gultik dan restoran omakase yang menjadi simbol budaya urban Jakarta Selatan.

Polar 2:
Bundaran HI –
Dukuh Atas – Sabang
(Commencing)

Kawasan ini akan menjadi zona deklarasi awal atau *commencing* dari ekonomi malam Jakarta. Saat siang hari kawasan ini menjadi wajah resmi kota, malam harinya ia mulai bertransformasi menjadi koridor leisure dan hiburan modern. PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah membangun area komersial bawah tanah yang menghubungkan Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI dengan Plaza Indonesia dan Halte TransJakarta. Area ini akan berisi restoran dan brand ternama, menjadi ruang bawah tanah pertama yang sepenuhnya berfungsi untuk aktivitas komersial publik. Selain itu, koneksi baru juga akan hadir antara Grand Indonesia, Wisma Nusantara, dan Thamrin Nine. Proyek ini dijadwalkan dimulai pada kuartal IV 2025 dan ditargetkan rampung pada 2027, bersamaan dengan pembukaan Stasiun MRT Thamrin dan Monas. Semua ini akan membentuk *urban easement* baru, jaringan bawah tanah yang menghubungkan bangunan-bangunan swasta dengan sistem MRT, menjadikan Bundaran HI dan sekitarnya node utama kota yang hidup 24 jam.

Polar 3:
Glodok – Kota Tua
(Preparing)

Kawasan ini sedang menyiapkan diri untuk kebangkitan baru seiring berjalannya pembangunan MRT Fase 2A dan 2B yang akan mencapai Stasiun Kota dan Ancol pada 2029. Di sinilah warisan kolonial dan budaya Tionghoa Jakarta berpadu. Revitalisasi kawasan oleh pemerintah dan swasta berjalan paralel, mulai dari pembukaan Hotel Tugu Kota Tua, pemulihan Toko Merah, hingga tumbuhnya generasi baru usaha kreatif seperti Lit Bakehouse, MET Glodok, dan Lil Salt Bread. Dalam beberapa tahun ke depan, rencana pemindahan Institut Kesenian Jakarta ke kawasan ini, serta pembangunan kantor baru Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, diharapkan menjadikan Kota Tua sebagai polar utama ekonomi kreatif yang berakar pada sejarah kota.

Tiga polar ini dipilih bukan sekadar karena keunggulan visual atau historisnya, tetapi karena keterhubungannya dengan infrastruktur transportasi modern, dinamika komunitas kreatif, serta potensi untuk merepresentasikan citra baru Jakarta sebagai kota yang hidup, inklusif, dan siap bertransformasi menjadi global tourism hub.

Sementara itu, di luar tiga polar utama tersebut, pemerintah provinsi bersama Suku Dinas Pariwisata wilayah akan mengembangkan polar sekunder secara paralel untuk memperluas manfaat ekonomi malam ke kawasan lain. Polar sekunder potensial ini mencakup Kemang yang dikenal oleh Time Out sebagai kawasan paling trendi di Jakarta dengan deretan bar, galeri, dan kafe ekspatriat, Pantai Indah Kapuk yang tumbuh sebagai poros baru bersama kawasan Banten, Kelapa Gading yang segera terhubung dengan LRT Jakarta Fase 1B hingga Manggarai, serta kawasan Tanjung Duren dan Central Park yang berkembang karena kepadatan mahasiswa dan hunian.

Adapun Kepulauan Seribu memiliki peran yang berbeda. Dengan jarak sekitar 50 kilometer dari daratan Jakarta atau 1,5 jam perjalanan kapal, kawasan ini dikembangkan bukan sebagai bagian dari *linger economy*, melainkan sebagai *resort extension* dari hospitalitas Jakarta. Branding Pulau Seribu akan diarahkan lebih selektif dan premium, dengan dukungan integrasi dermaga baru di kawasan Pantai Indah Kapuk yang sedang disiapkan.

Dengan kerangka ini, tiga polar utama menjadi episentrum pengembangan *Owl Economy* Jakarta, sementara polar sekunder dan kawasan pendukung seperti Kepulauan Seribu menjadi jejaring pelengkap yang memperluas narasi kota 24 jam. Infrastruktur berbasis rel menjadi tulang punggungnya, sementara kreativitas, komunitas, dan kolaborasi menjadi nadinya.

A ANALISIS SPASIAL EKONOMI KREATIF MALAM

Untuk kepentingan studi ini, fokus kajian diarahkan pada **tiga polar utama ekonomi malam Jakarta**, yaitu kawasan **Glodok–Kota Tua, Bundaran HI–Dukuh Atas–Jalan Sabang**, serta **ASEAN–Blok M–Cipete**. Ketiganya dipilih karena mencerminkan tiga fase berbeda dari kesiapan ekosistem kota malam: *continuing*, *commencing*, dan *preparing*.

Di bagian selatan kota, **polar Blok M–Cipete** menjadi contoh nyata dari kawasan yang **telah hidup secara organik (*continuing*)**. Aktivitas malam hari di sini tumbuh alami melalui jaringan kuliner, bar kecil, *Little Tokyo*, dan simpang CSW yang kini menjadi titik temu berbagai moda transportasi publik. Kawasan ini tidak membutuhkan pendekatan intervensi besar, melainkan **penguatan kualitas ruang, penataan signage, dan kebijakan jam operasional yang lebih jelas** agar ekosistem yang sudah mapan dapat terus tumbuh dengan tertib. Blok M dan sekitarnya menjadi model kawasan kreatif yang telah beroperasi penuh sebagai kutub ekonomi malam yang stabil dan berkelanjutan.

Bergerak ke tengah kota, **polar Bundaran HI–Dukuh Atas–Sabang** berada pada tahap *commencing*, yaitu fase yang siap untuk segera dideklarasikan sebagai kawasan ekonomi malam utama Jakarta. Kawasan ini kini mengalami transformasi signifikan melalui inisiatif *urban easement* yang digerakkan oleh **PT MRT Jakarta (Perseroda)**. Proyek baru akan membangun **area komersial bawah tanah** yang menghubungkan **Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI dengan Plaza Indonesia**, menghadirkan jaringan restoran dan merek ritel di koridor pejalan kaki bawah tanah yang juga terhubung langsung ke **Halte Transjakarta**.

Area ini direncanakan mulai dibangun pada **kuartal IV tahun 2025**, dan saat ini tengah dalam tahap penjarangan **mitra pengelola komersial**. Rencana ini tidak berhenti di situ. **Grand Indonesia** dan **Wisma Nusantara** juga akan membangun akses bawah tanah baru menuju Stasiun MRT Bundaran HI. Bahkan **Wisma Nusantara** akan direkonstruksi menjadi gedung yang lebih terintegrasi dengan sistem transportasi bawah tanah. Diharapkan **pada tahun 2027**, jaringan pejalan kaki bawah tanah ini sudah dapat diakses publik, menciptakan ekosistem *mixed-use* yang aktif selama 24 jam.



Inisiatif ini menunjukkan bagaimana infrastruktur kota dapat berfungsi sebagai **tulang punggung (*backbone*)** ekonomi malam. Konektivitas bawah tanah akan mendorong munculnya pola konsumsi baru, makan malam larut di Sabang, berjalan kaki melalui terowongan berlampu hangat menuju Plaza Indonesia, lalu naik MRT untuk kembali ke selatan kota. Ini adalah bentuk pengalaman urban yang menghubungkan mobilitas, gaya hidup, dan ekonomi malam secara utuh.

Sementara itu, di bagian utara, **polar Glodok–Kota Tua** berada pada fase *preparing* fase perencanaan dan penguatan fondasi sebelum peluncuran besar ekosistem malam. Pembangunan **jalur MRT Utara–Selatan** yang ditargetkan selesai **pada tahun 2029** akan menjadi pemicu utama. Jalur ini akan menghubungkan kawasan pusat kota dengan wilayah utara dan membuka peluang besar bagi revitalisasi kawasan bersejarah seperti Kota Tua dan Glodok.

Fase *preparing* berarti membangun kesiapan ruang dan struktur pendukung: memperbaiki infrastruktur dasar, memperkuat tata kelola kawasan, menyiapkan regulasi yang adaptif, dan memastikan keterlibatan komunitas lokal sebagai penggerak utama. Glodok dan Kota Tua bukan sekadar destinasi wisata siang hari, melainkan *living heritage district* yang sedang disiapkan untuk menjadi ruang malam yang berkarakter, aman, dan terhubung dengan infrastruktur metropolitan.

Selain riset *desktop* dan pengamatan spasial, kami juga melakukan **Focus Group Discussion (FGD)** dengan pemangku kepentingan lintas sektor. FGD ini diselenggarakan pada **11 September 2025** di **On3 Senayan, Jakarta Pusat**, pukul **13.00–17.00 WIB**, dan dihadiri oleh **50 peserta**. Para peserta berasal dari kalangan komunitas kreatif, pelaku ekonomi lokal, pengelola kawasan, perwakilan pemerintah, hingga pihak swasta.

Peserta FGD dibagi menjadi **empat kelompok**, masing-masing memberikan masukan berdasarkan kawasan atau topik:

1. **Kawasan Glodok dan Kota Tua,**
2. **Kawasan Blok M dan Cipete,**
3. **Kawasan Bundaran HI dan Dukuh Atas,**
4. **Kelompok Regulasi,** yang memfokuskan pembahasan pada aspek hukum, izin, dan tata kelola untuk mendukung aktivitas malam hari.

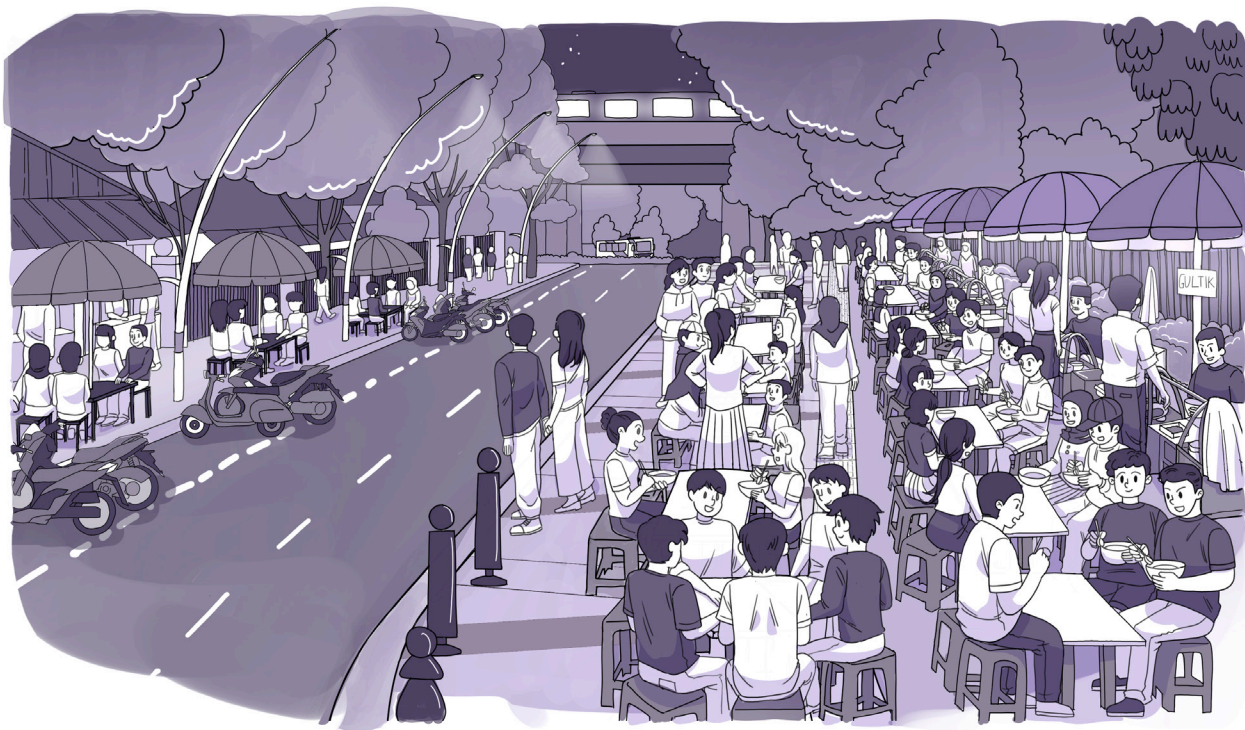
Pendekatan analisis menggunakan kerangka **3A+1C**, yaitu **kelengkapan kota (*amenity*)**, **Atraksi**, **Aksesibilitas**, dan **Komunitas**.

1. **Aksesibilitas** menilai kemudahan mobilitas dan konektivitas transportasi publik, termasuk integrasi antar moda dan akses pejalan kaki.
2. **Kelengkapan kota (*amenity*)** mencakup ketersediaan fasilitas publik, penerangan, keamanan, dan infrastruktur dasar yang menunjang kenyamanan malam hari.
3. **Atraksi** menyoroti keberagaman kegiatan – dari kuliner malam, seni, olahraga, hingga pertunjukan budaya yang menciptakan daya tarik kawasan.
4. **Komunitas** menjadi unsur utama, menekankan pentingnya partisipasi warga, pelaku ekraf, dan pengusaha lokal dalam menciptakan rasa memiliki terhadap kawasan.

Analisis dalam laporan ini disusun secara berurutan: dimulai dari gambaran umum setiap polar, kemudian mengurai temuan berdasarkan empat dimensi 3A+1C, dan dilanjutkan dengan rekomendasi tahapan pengembangan yang realistis. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa **rencana pengembangan ekonomi malam sejalan dengan perkembangan infrastruktur kota**, dengan transportasi publik sebagai pengikat utama dan masyarakat sebagai penggerak kehidupan urban Jakarta yang hidup 24 jam.



i. Polar ASEAN, Blok M, dan Cipete



ASEAN Headquarter (Jl. Sisingamangaraja) pusat diplomasi regional Asia Tenggara; simbol kerja sama antarbangsa. Terdapat beberapa gedung pemerintahan di sekitarnya, antara lain Kejaksaan Agung, Mabes Kepolisian RI, Gedung kementerian PUPR dan Pusdiklat KEMLU. Selain institusi resmi, kawasan sekitarnya mulai tumbuh menjadi area urban yang dinamis berkat MRT ASEAN Station. Meskipun begitu, guna lahan masih didominasi oleh residensial R3 (Rumah Ukuran Sedang) dan Usaha (Perkantoran Pemerintah).

Blok M adalah pusat gaya hidup urban, transportasi, dan pusat UMKM kuliner yang dikenal sejak era 1980-an sebagai sentra belanja, dengan Terminal Blok M sebagai simpul mobilitas utama. Bagian dari rencana kota Kebayoran Baru rancangan Soesilo dan yayasan CSW. Di Blok M terdapat perpaduan antara bangunan lama (Pasaraya, terminal) dan revitalisasi modern seperti **M Bloc Space** (adaptasi kreatif bangunan tua). Saat ini Blok M aktif dengan kegiatan komunitas dan pelaku bisnis kreatif, cafe dan retail. Berevolusi dari Kota Satelit pertama di Indonesia menjadi pusat gaya hidup anak muda (Lintas Melawai pada tahun 90an, hingga kini pusat cafe dan beragam ruang ketiga aktif).

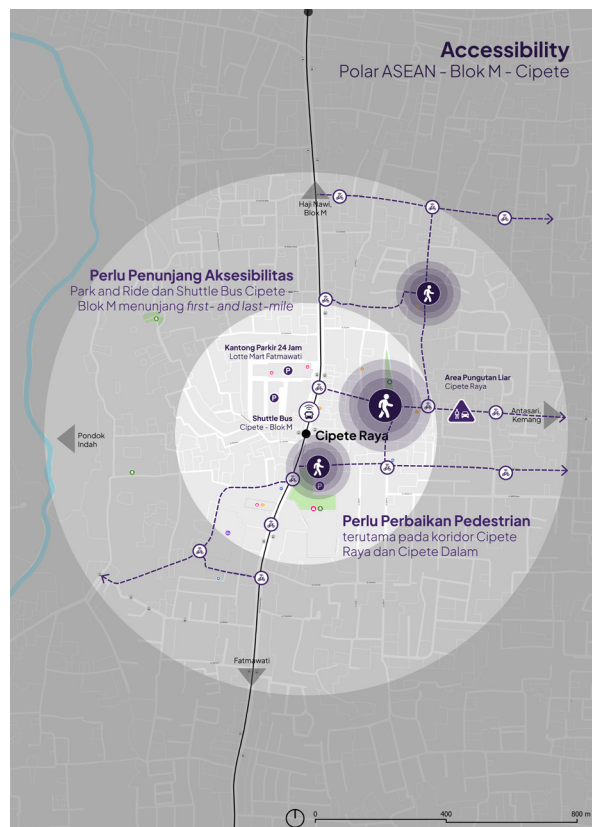
Sedangkan untuk kawasan **Cipete** didominasi dengan kawasan kuliner, *coffee shop artisan*, dan komunitas kreatif. Cipete adalah area permukiman yang berkembang menjadi ruang bisnis rumahan dan *lifestyle*. Banyak spot kuliner dan kafe untuk *coworking*, namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendukung (parkir liar, pencahayaan kurang). Ke selatan sedikit, ada kawasan Kemang, yang dinobatkan sebagai salah satu kawasan terkeren versi majalah TimeOut.

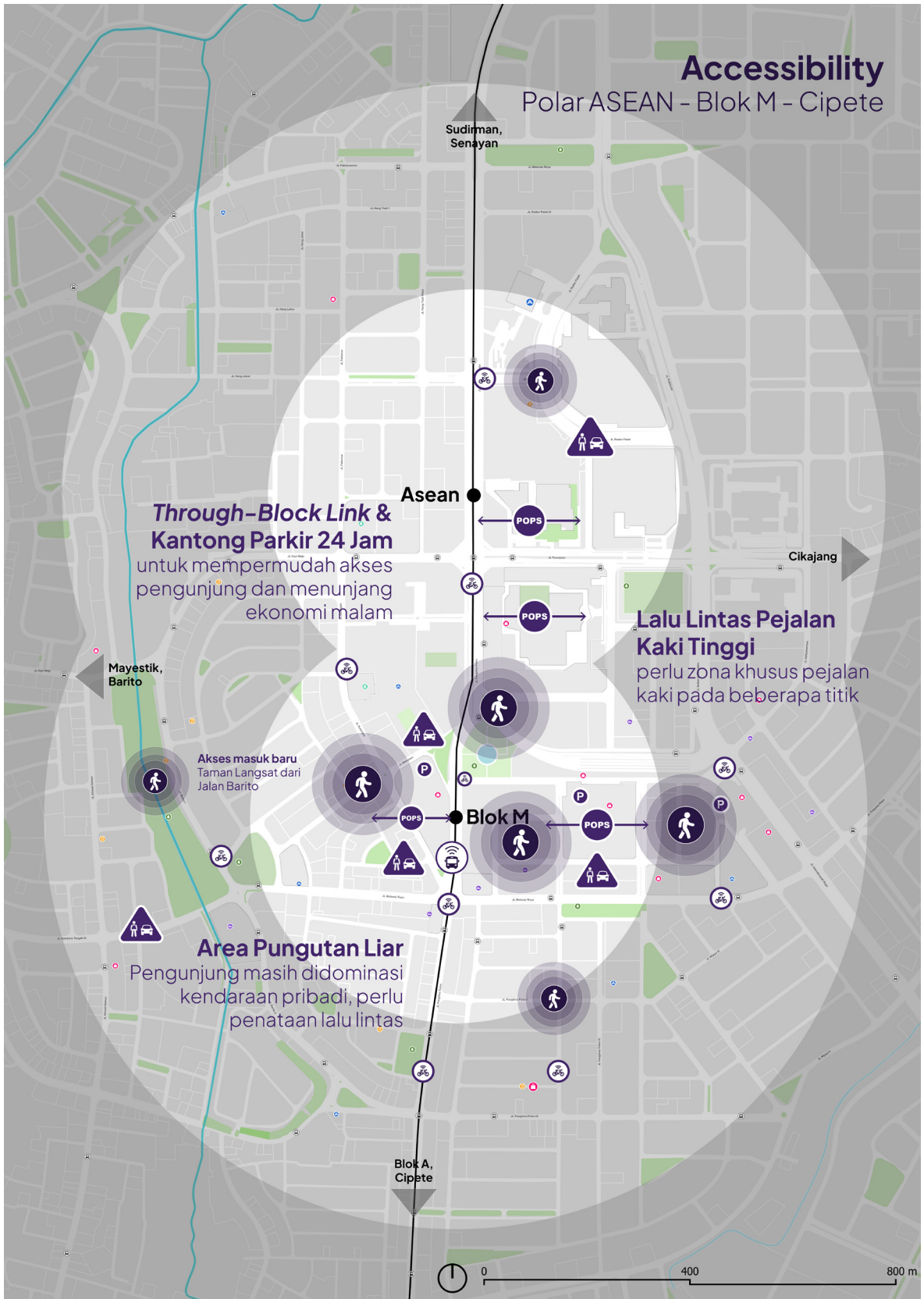
a. Aspek Aksesibilitas (Accessibility)

Transportasi Publik: MRT Jakarta: Stasiun ASEAN, Blok M, dan Cipete Raya memiliki konektivitas tinggi. Terdapat pula TransJakarta & Feeder Bus di ketiga area. Ada Gap layanan karena MRT berhenti dini; *shuttle intra-area* (Blok M–Cipete–HI) dapat diusulkan sebagai solusi. *Bike sharing* atau *free shuttle* direkomendasikan di kawasan padat aktivitas malam (Blok M & Cipete).

Walkability: Untuk kawasan Blok M dan Gedung ASEAN: pedestrian lebar dan tertata, sudah ramah pejalan kaki. Cipete: trotoar sempit, perlu perbaikan jalur pedestrian di ruas-ruas jalan kecil.

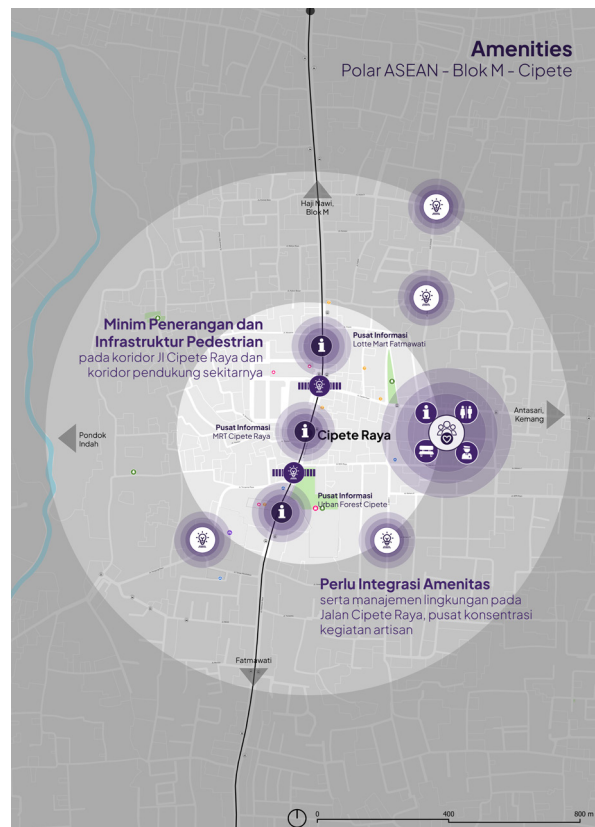
Konektivitas: Antar titik (ASEAN – Blok M – Cipete) sangat terhubung melalui MRT; koneksi lintas MRT ke spot-spot wisata perlu ditunjang *wayfinding & signage*.

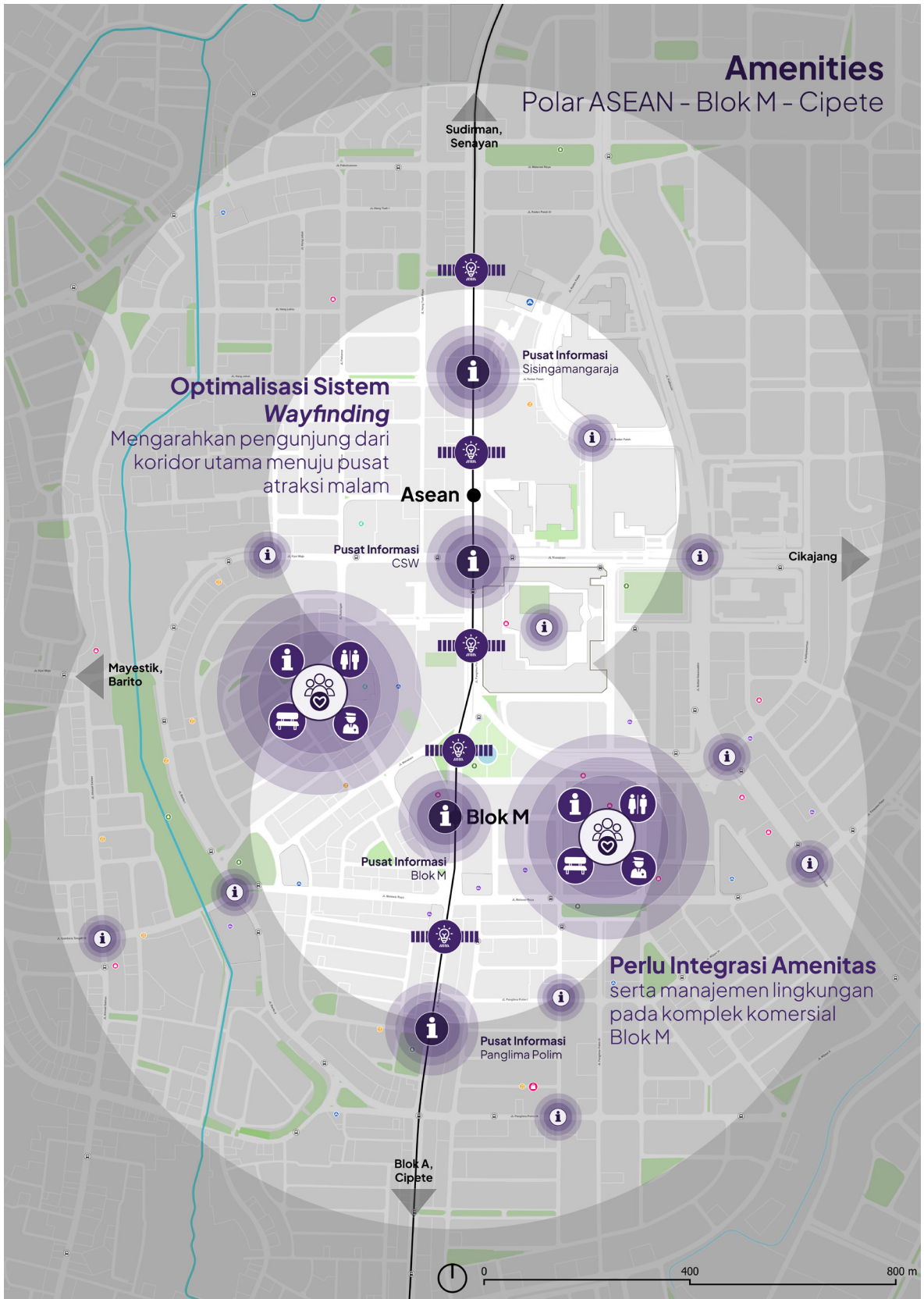




b. Aspek Kelengkapan Kota (Amenity)

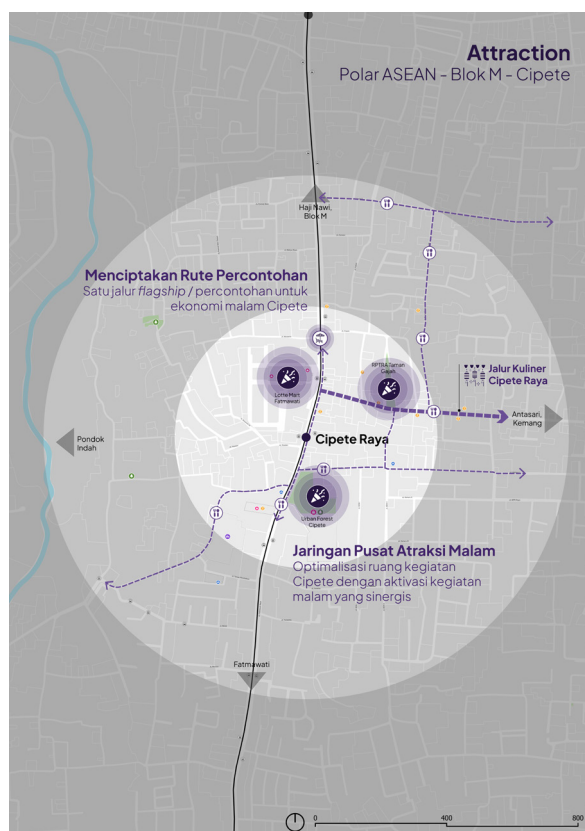
- Fasilitas Publik:** Tersedia halte, musala, toilet umum (terutama di Blok M dan ASEAN). Cipete masih minim toilet umum & ruang duduk publik.
- Keamanan:** Kawasan ASEAN & Blok M memiliki CCTV, satpam kawasan. Cipete relatif aman, tapi pengawasan tidak merata.
- Penerangan:** Baik di jalur utama, namun jalan kecil Cipete & gang sekitar perlu penambahan lampu jalan.
- Parkir:** Blok M tersedia *basement* & parkir umum. Cipete sering terjadi parkir liar di jalan sempit, perlu penataan ulang. Masih banyak pungli parkir, butuh manajemen profesional dan intervensi pemerintah.

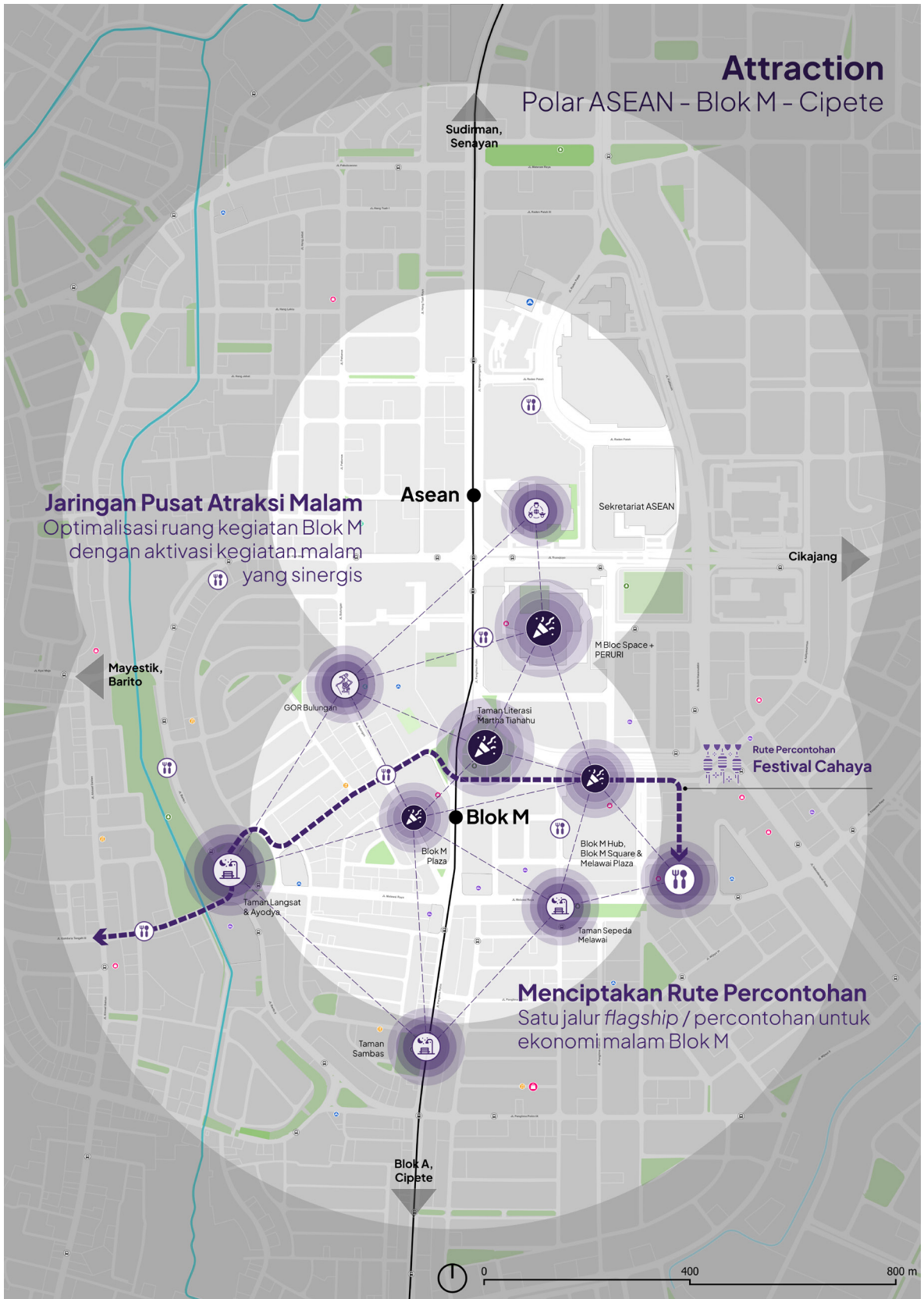




c. Aspek Daya Tarik Wisata (Attraction)

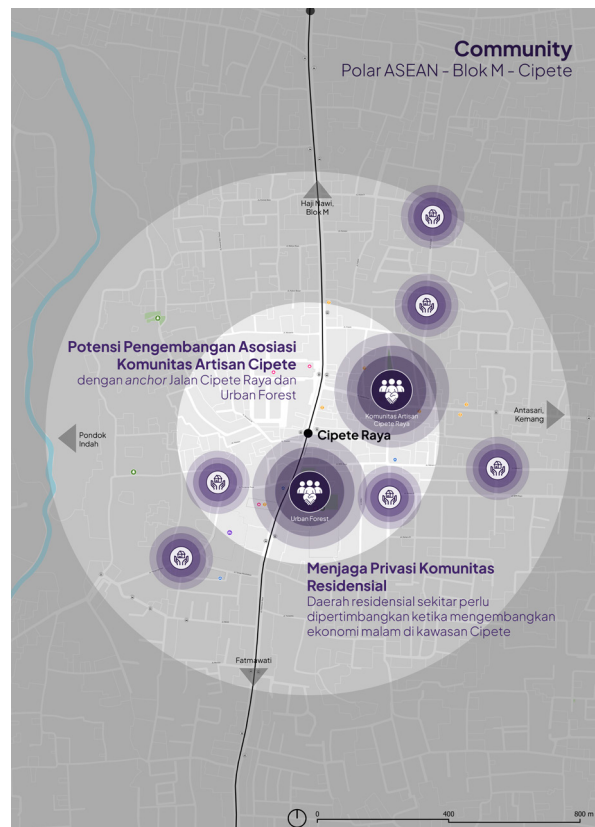
Kawasan	Kuliner	Seni & Hiburan	Olahraga
ASEAN	Restoran internasional sekitar Jalan Sisingamangaraja	Event diplomasi budaya di gedung ASEAN	Taman sekitar, ruang terbuka
Blok M	M Bloc Space, kuliner kaki lima, <i>street food</i>	M Bloc Live, galeri musik, <i>creative market</i>	Jogging di taman area terminal
Cipete	<i>Coffee shop artisan, brunch spots</i>	Galeri kecil, studio kreatif	<i>Studio yoga, gym lokal</i>

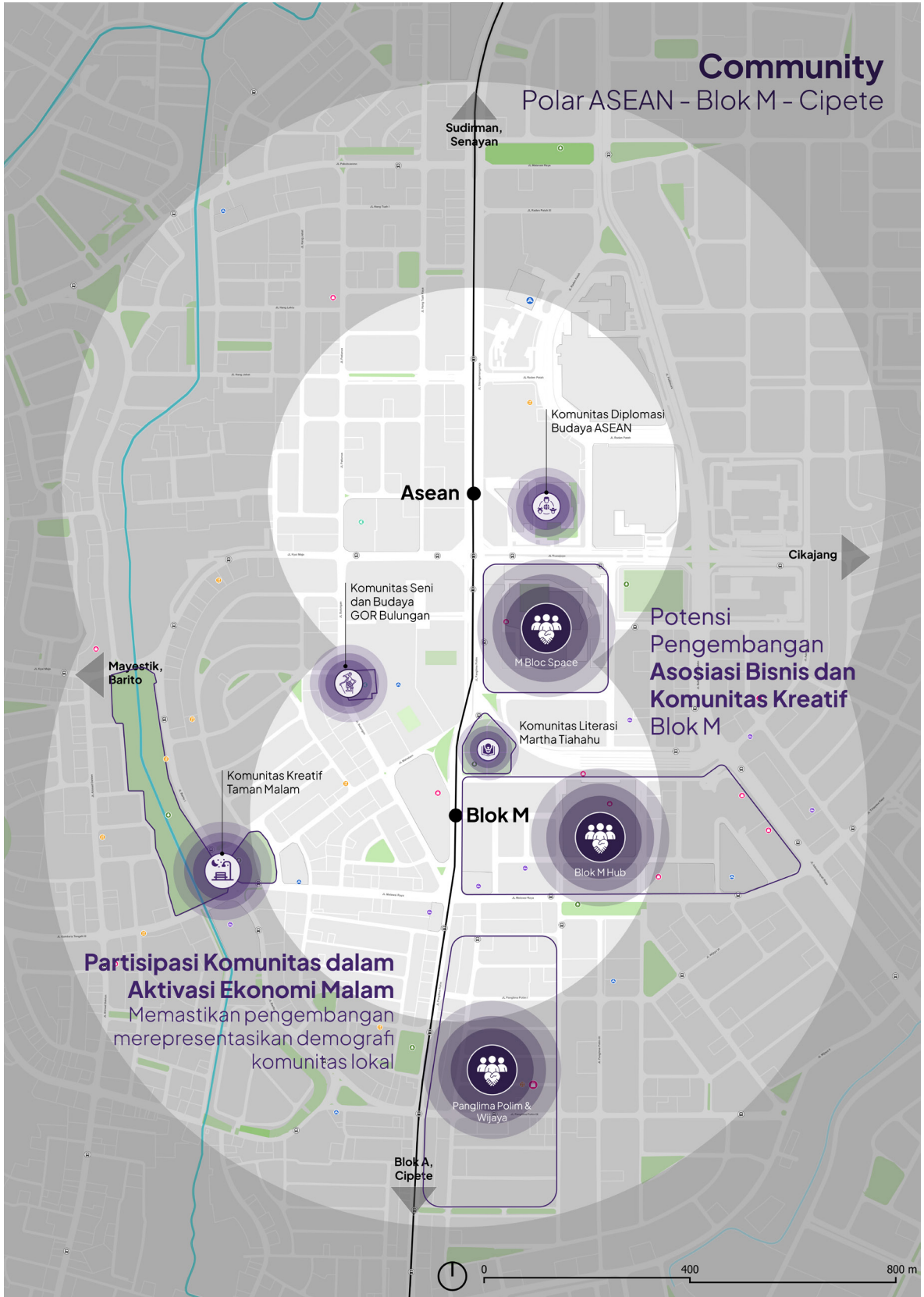




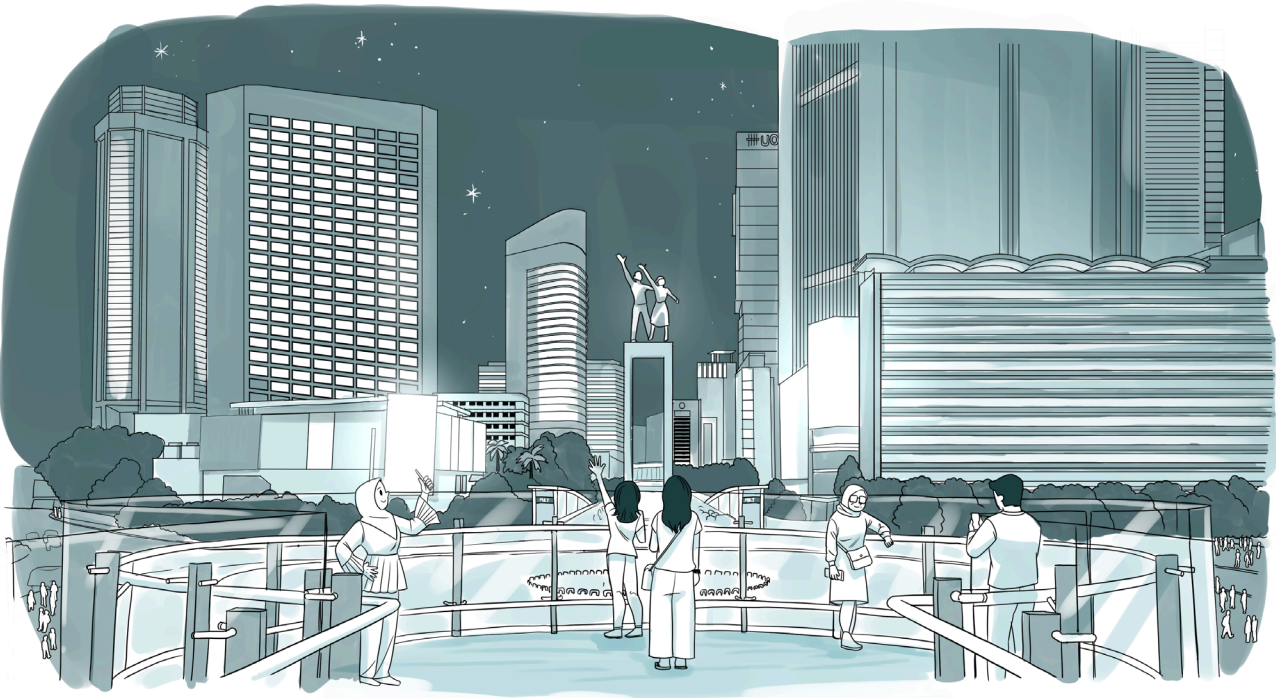
d. Aspek Komunitas dan Aktor Lokal (Community)

- Gedung ASEAN:** Diplomat, pelaku institusi regional, komunitas budaya antarnegara.
- Blok M:** Komunitas musik *indie*, seniman mural, UMKM lokal, tenant kreatif.
- Cipete:** Komunitas *coffee lovers*, pelaku F&B independen, pemilik studio kreatif, seniman ilustrator.
- Peran Asosiasi Komunitas:** FGD menekankan perlunya asosiasi komunitas / badan pengelola kawasan untuk menjembatani kebutuhan warga–pemerintah.

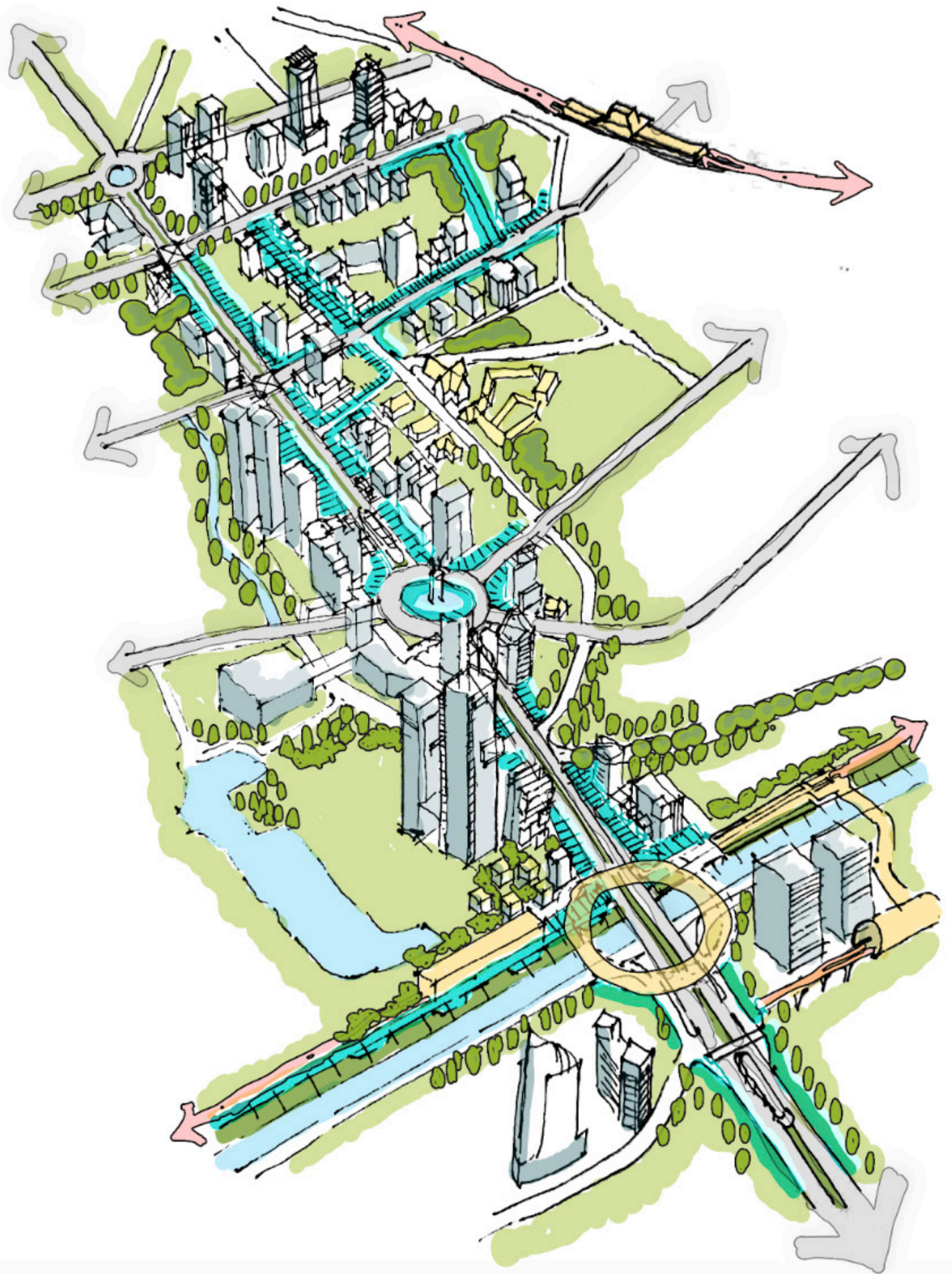




ii. Polar Bundaran HI, Sabang, Dukuh Atas



Bundaran HI memang sudah dikenal sebagai ikon kota Jakarta sejak era Orde Lama. Kawasan ini didominasi oleh bangunan tinggi, hotel bintang lima, dan area bisnis modern yang menjadi representasi perkembangan Jakarta sebagai kota metropolis. **Jalan Sabang** dikenal sebagai sentra kuliner malam legendaris yang memiliki sejarah panjang sebagai area *elite* kolonial sebelum berkembang menjadi pusat perdagangan. Karakteristik arsitektur kawasan ini menampilkan perpaduan unik antara ruko lama bergaya kolonial dengan bangunan komersial modern, menciptakan atmosfer yang khas dan otentik.



a. Aspek Aksesibilitas (Accessibility)

Transportasi Publik:

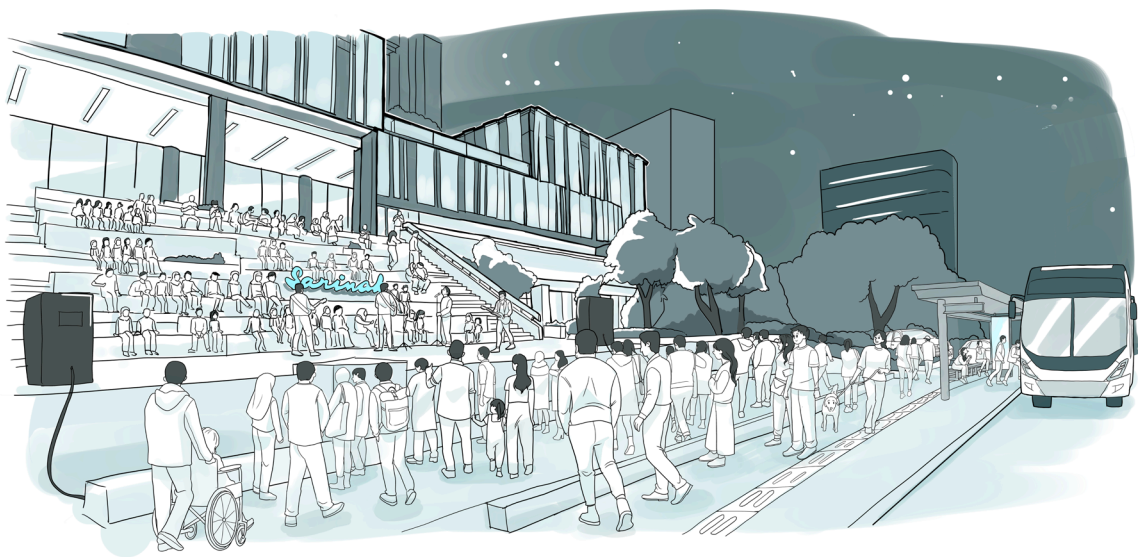
Bundaran HI terintegrasi dengan MRT Jakarta (Stasiun Bundaran HI), TransJakarta, dan *pedestrian underpass*. Sedangkan Jalan Sabang & Cikini dilayani oleh TransJakarta & KRL *Commuter Line* (Stasiun Cikini), meskipun kebanyakan pengunjung menggunakan *ride-hailing*/taksi untuk mengunjungi kawasan ini.

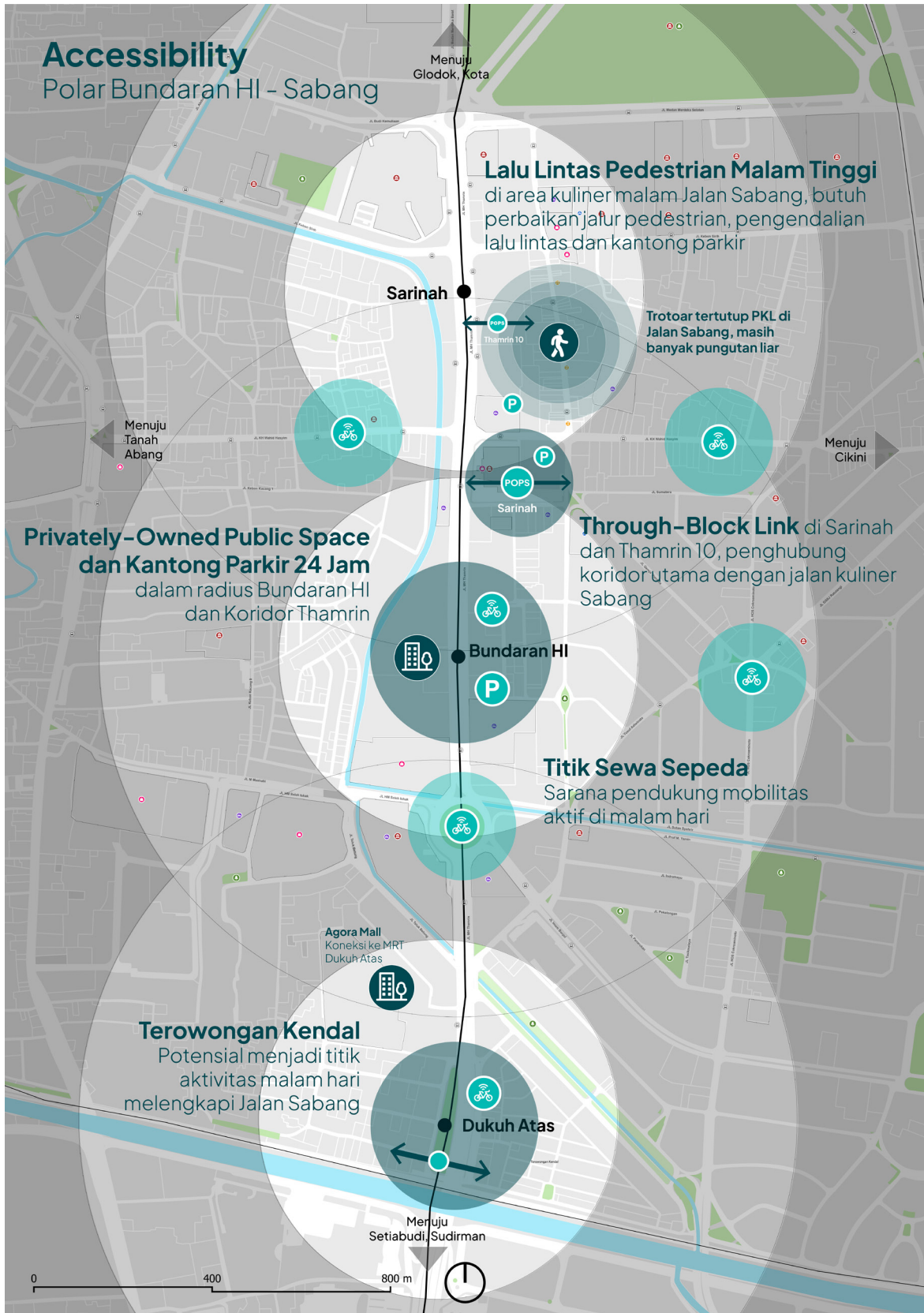
Walkability:

Trotoar luas di HI dan Sabang, namun perlu perbaikan di beberapa titik Cikini. Namun, kualitas berkurang bila menjauh dari koridor utama Bundaran HI (Jalan Sudirman). Kualitas *pedestrian walkway* di Jalan Sabang, yang notabene kawasan turis jauh dari sempurna, kondisi trotoar yang tidak rata, berlubang, kurangnya pencahayaan di malam hari, tertutupnya trotoar oleh PKL.

Konektivitas:

Kawasan cukup terhubung secara visual dan fisik, namun lintasan pejalan kaki dan penunjuk arah (*signage & wayfinding*) perlu ditingkatkan. Hal ini membuat pejalan kaki tidak nyaman dan tidak tergerak untuk berjalan kaki dan eksplor area sekunder dari Bundaran HI.





Accessibility
Polar Bundaran HI - Sabang

Lalu Lintas Pedestrian Malam Tinggi
di area kuliner malam Jalan Sabang, butuh perbaikan jalur pedestrian, pengendalian lalu lintas dan kantong parkir

Trotoar tertutup PKL di Jalan Sabang, masih banyak pungutan liar

Through-Block Link di Sarinah dan Thamrin 10, penghubung koridor utama dengan jalan kuliner Sabang

Titik Sewa Sepeda
Sarana pendukung mobilitas aktif di malam hari

Privately-Owned Public Space dan Kantong Parkir 24 Jam
dalam radius Bundaran HI dan Koridor Thamrin

Terowongan Kendal
Potensial menjadi titik aktivitas malam hari melingkupi Jalan Sabang

b. Aspek Kelengkapan Kota (Amenity)

Fasilitas Publik:

Toilet umum, halte, area pedestrian sudah tersedia namun belum merata. Kualitas spasial di area-area sekunder belum optimal, trotoar yang berlubang dan tidak rata. Khususnya di Jalan Sabang, kondisi trotoar di sepanjang Jalan Sabang tidak kondusif untuk pejalan kaki, karena banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang mengambil area trotoar. Kebersihan trotoar juga menjadi masalah karena adanya PKL ini. Perlunya ada *'guidelines'* untuk PKL supaya kualitas spasial tetap terjaga.

Keamanan:

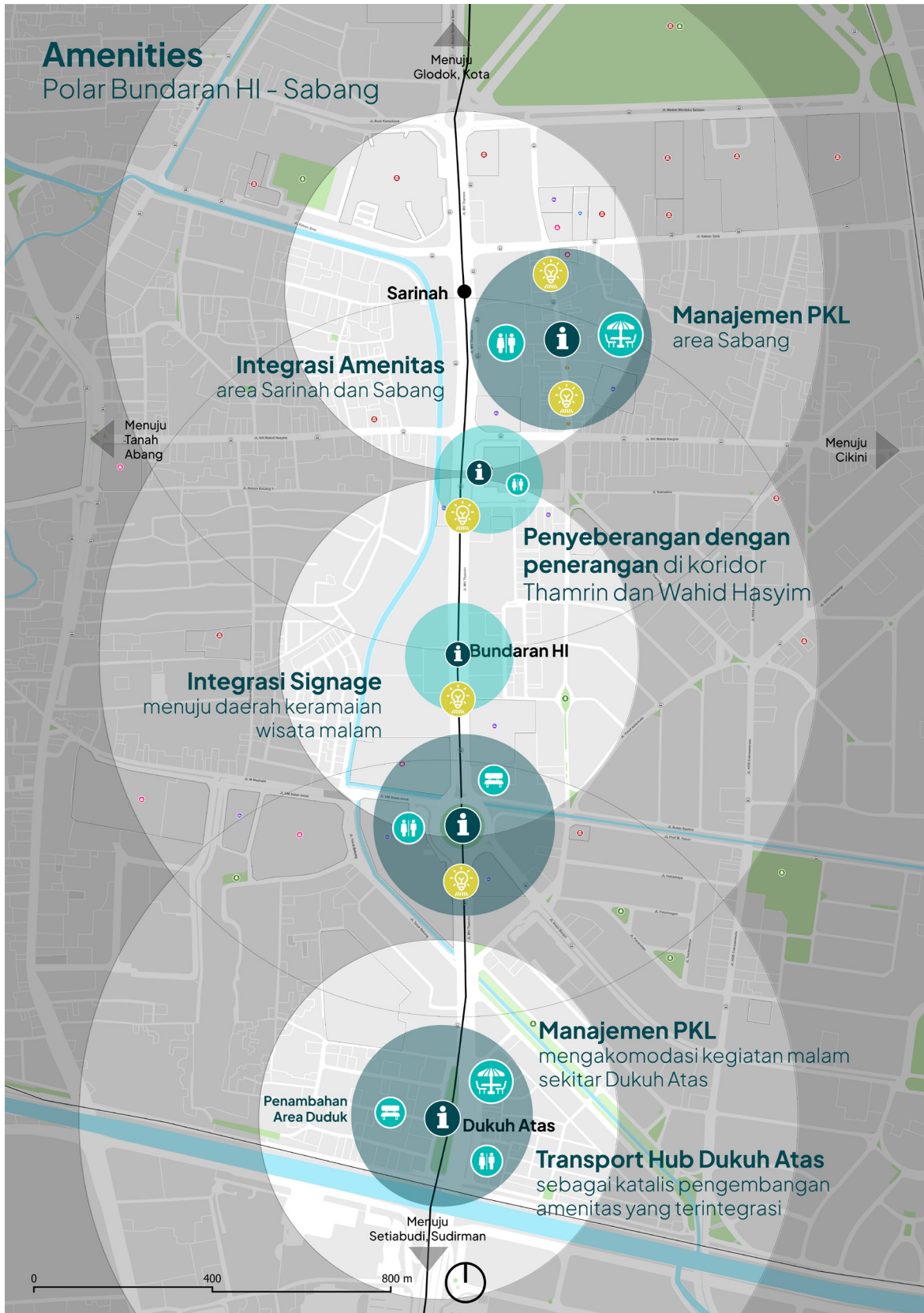
Terdapat CCTV di area Bundaran HI, tapi pengawasan terbatas di Sabang. Banyak kegiatan pungut liar di kawasan ini.

Penerangan:

Terang di HI dan sebagian Sabang. Penerangan terkait juga dengan keamanan, pencahayaan yang kurang membuat area terasa kurang aman.

Parkir:

Sudah tersedia parkir *on street* di Jalan Sabang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Diperlukan penyediaan kantong-kantong parkir atau organisasi yang dapat mengelola parkir dengan lebih baik dan memperbaiki kelancaran lalu lintas di Sabang.

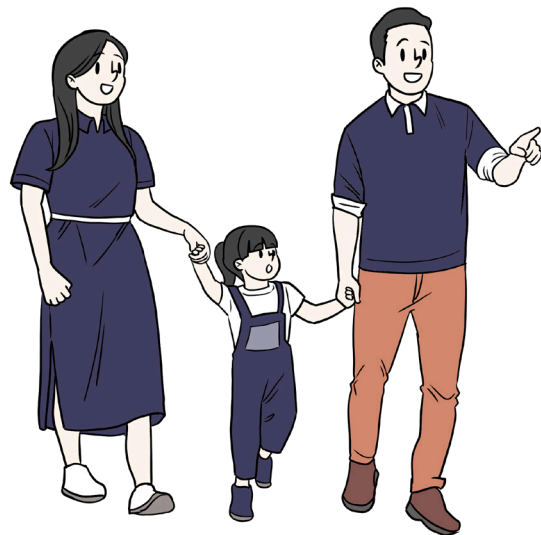


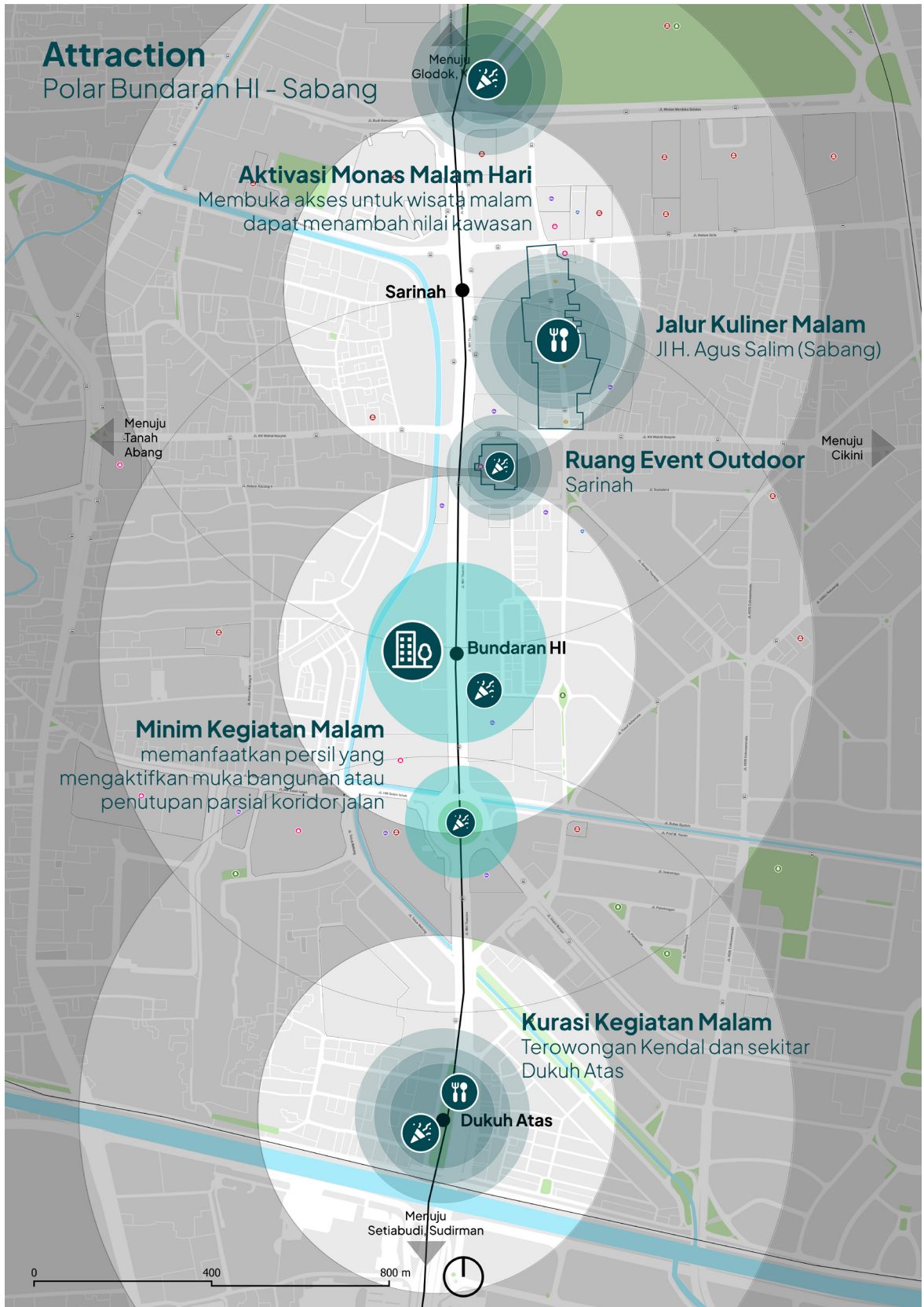
c. Aspek Daya Tarik Wisata (Attraction)

Daya tarik wisata di kawasan Bundaran HI–Sabang sejatinya sudah terbentuk secara organik dan berlapis waktu. Pada pagi hari, kawasan ini hidup dengan aktivitas olahraga dan kebersamaan warga melalui kegiatan *Car Free Day*, *jogging*, serta bersepeda di sepanjang Jalan MH Thamrin. Memasuki sore hingga malam, suasana kota berubah: Bundaran HI menampilkan pesona *city light* yang menjadi ikon visual Jakarta, tempat warga dan wisatawan menikmati panorama gedung tinggi dan air mancur yang berkilau di bawah cahaya kota malam hari.

Kawasan kuliner Jalan Sabang menjadi jantung aktivitas malam, dipenuhi aroma sate, kopi, dan jajanan kaki lima yang tak pernah sepi pengunjung. Di sisi lain, **Gedung Sarinah** kini berfungsi sebagai pusat urban kreatif yang menampilkan *live music*, *pop-up events*, dan **pameran retail lokal** yang memperkaya pengalaman malam kota. Sementara itu, **Observatory Deck di UP Thamrin Nine** menghadirkan pengalaman wisata vertikal, menawarkan pemandangan Jakarta dari ketinggian dengan fasilitas *fine dining* yang modern dan elegan. Koridor **Wahid Hasyim** melengkapi lanskap ini dengan jajaran kafe, hotel dan butik yang hidup hingga larut malam, menghubungkan simpul-simpul kegiatan dengan atmosfer kota yang lebih santai dan kontemporer.

Keseluruhan atraksi ini menunjukkan bahwa Bundaran HI dan sekitarnya memiliki potensi kuat sebagai kawasan *city nightlife experience* yang utuh. Namun, tantangannya terletak pada ketiadaan kurasi program yang terjadwal dan konsisten, serta kurangnya integrasi antar-aktivitas. Jika atraksi yang sudah ada dapat diorkestrasi dalam agenda bulanan atau tematik misalnya HI *Night Run*, Sabang *Street Feast*, atau *City Light Festival*, kawasan ini berpotensi menjadi ikon wisata malam urban Jakarta yang sejajar dengan distrik hiburan di kota-kota global lain seperti Seoul atau Singapura.





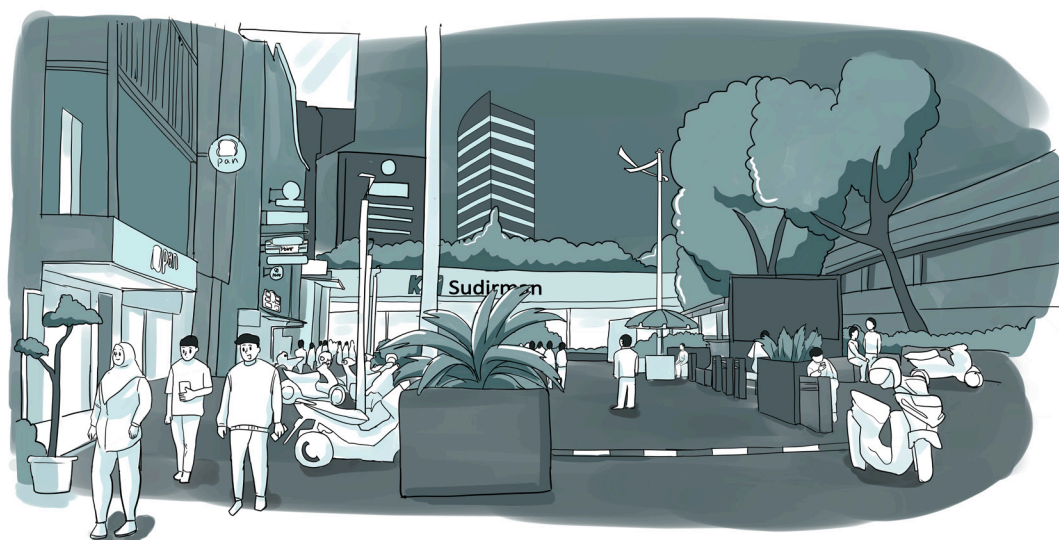
d. Aspek Komunitas dan Aktor Lokal (Community)

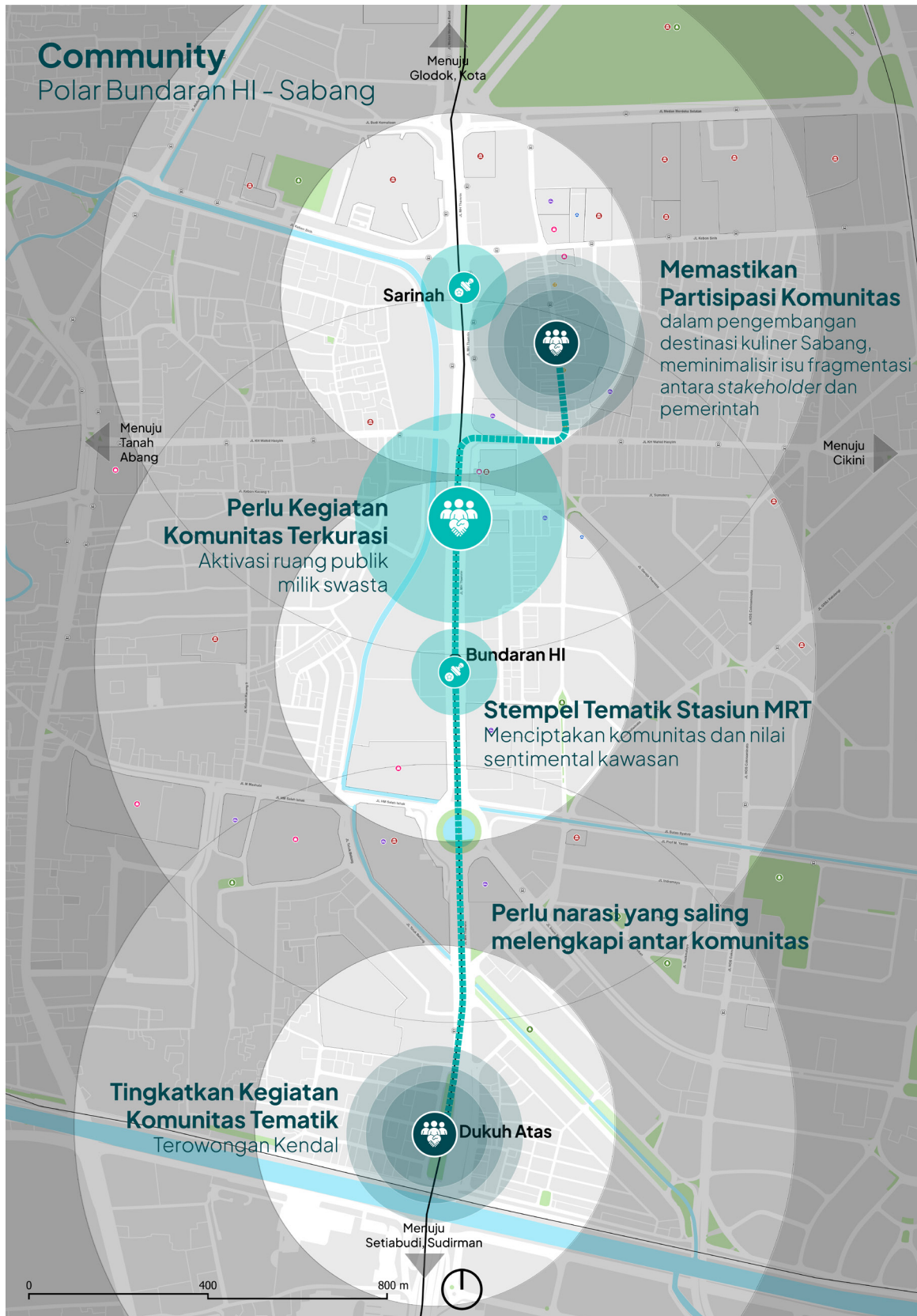
Aktor lokal di kawasan Bundaran HI–Sabang membentuk ekosistem yang hidup dan berlapis, dari pelaku skala mikro hingga penggerak industri kreatif dan bisnis besar. Di tingkat jalan, denyut kehidupan kota dijaga oleh para pedagang kaki lima, pelaku UMKM kuliner, dan warga sekitar yang menjadikan area ini sebagai ruang interaksi harian. Warung sate kambing, restoran Garuda, nasi goreng Kebon Sirih, hingga kedai legendaris seperti Claypot Popo dan Kopitiam menjadi bagian penting dari lanskap sosial kuliner yang memperkuat identitas kawasan ini.

Di lapisan menengah, komunitas ekonomi kreatif informal di sekitar Jalan Sabang turut menambah warna melalui berbagai inisiatif, mulai dari musik jalanan, acara seni kecil, hingga kolaborasi dengan pelaku bisnis setempat. Mereka menciptakan nuansa kota yang spontan namun hangat, di mana ruang publik menjadi panggung ekspresi yang selalu berubah.

Sementara itu, zona Bundaran HI dan sekitarnya dihuni oleh aktor bisnis dan komersial berskala besar yang memberikan daya dorong ekonomi signifikan. Kompleks **Thamrin Nine**, **Plaza Indonesia**, **Grand Indonesia**, dan **Sarinah** bukan hanya pusat perbelanjaan atau perkantoran, tetapi juga simpul penting bagi kegiatan ekonomi malam, dari *fine dining*, *rooftop bar*, hingga acara budaya dan musik yang dikurasi dengan gaya urban kosmopolitan.

Hotel-hotel butik seperti **Morrissey**, **Ashley**, dan beberapa akomodasi menengah lainnya turut memperkaya jejaring sosial dan ekonomi di kawasan ini. Mereka bukan sekadar tempat menginap, tetapi juga rumah bagi pelaku industri kreatif, ekspatriat, dan pebisnis muda yang bekerja, bersosialisasi, dan tinggal di pusat kota. Kombinasi antara pelaku ekonomi informal dan formal ini menjadikan Bundaran HI–Sabang sebagai ekosistem yang seimbang, tempat di mana kota bekerja di siang hari dan bertransformasi menjadi ruang pertemuan kreatif di malam hari, termasuk potensi pengembangan *homestay* Jalan Jaksa.





iii. Polar Glodok- Kota Tua



Kawasan **Glodok dan Kota Tua** merupakan salah satu kawasan dengan karakter urban paling kuat dan berlapis di Jakarta. Di sini, sejarah, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari berpadu dalam satu lanskap kota yang hidup, penuh kontras, dan autentik. Kota Tua berfungsi sebagai “**museum terbuka**”, sebuah kawasan bersejarah yang menampilkan arsitektur kolonial Belanda abad ke-17 hingga ke-19, di mana setiap bangunan, alun-alun, dan lorong seolah menyimpan fragmen perjalanan Batavia. Pusat aktivitas berpusat di **Alun-Alun Fatahillah**, dengan **Museum Fatahillah**, **Museum Wayang**, **Museum Seni Rupa dan Keramik**, serta **Jembatan Kota Intan** sebagai simpul-simpul sejarah yang terus hidup melalui kunjungan wisata, acara komunitas, dan kegiatan publik di akhir pekan.

Di sisi lain, **Glodok** menampilkan wajah yang berbeda, lebih padat, lebih riuh, dan lebih personal. Sebagai kawasan pecinan tertua di Jakarta, Glodok merepresentasikan warisan budaya Tionghoa yang masih terasa dalam

keseharian warganya. Di sepanjang gang sempit dan pertokoan lama, aroma dupa dari **Vihara Dharma Bakti** bercampur dengan wangi masakan dari **Petak Enam** dan **Petak Sembilan**, menciptakan suasana khas urban tropis yang hangat dan tak tergantikan. Di sini, pasar tradisional, toko obat Tionghoa, dan kedai kuliner legendaris seperti bakmi, kue bulan, dan herbal tea berdampingan dengan kafe baru yang mulai bermunculan membawa semangat regenerasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah Glodok dan Kota Tua semakin hidup dengan kehadiran generasi baru pelaku kreatif yang membawa warna segar ke kawasan ini. Tempat-tempat seperti **Lit Bakehouse**, **Met Glodok**, dan **Lil Salt Bread** mulai menarik pengunjung muda dan wisatawan yang mencari pengalaman urban yang autentik namun kontemporer. Kehadiran mereka memberi nafas baru pada bangunan-bangunan lama yang sebelumnya pasif, sekaligus membangun ekosistem kreatif yang menyatukan sejarah dan inovasi.



Momentum kebangkitan kawasan ini semakin kuat dengan dibukanya **Hotel Tugu Kota Tua**, yang menghadirkan pengalaman menginap bergaya heritage di tengah lanskap bersejarah, serta rampungnya revitalisasi **Toko Merah** sebagai ikon arsitektur kolonial yang kembali berfungsi publik. Dua elemen ini menjadi penanda bahwa Kota Tua dan Glodok tengah memasuki fase baru, di mana warisan sejarah dipertemukan dengan semangat kreatif generasi kini.

Ke depan, kawasan ini tengah bersiap menuju babak baru melalui pengembangan jalur **MRT Utara–Selatan**, yang diproyeksikan selesai pada tahun 2029. Infrastruktur ini akan menjadi tulang punggung integrasi kawasan dan membuka peluang bagi lahirnya kembali aktivitas malam di sekitar koridor Kota Tua dan Glodok, mulai dari wisata kuliner malam, pertunjukan budaya, hingga aktivasi ruang publik bersejarah. Dengan kekayaan sejarah dan identitas sosial yang kuat, **Glodok–Kota Tua** berpotensi besar menjadi kawasan *preparing pole* dalam konsep *Owl Economy* Jakarta, sebuah kawasan yang tengah menata diri dan membangun fondasi agar tradisi masa lalu dapat berpadu dengan ritme kota modern yang hidup 24 jam.



a. Aspek Aksesibilitas (Accessibility)

Transportasi Publik:

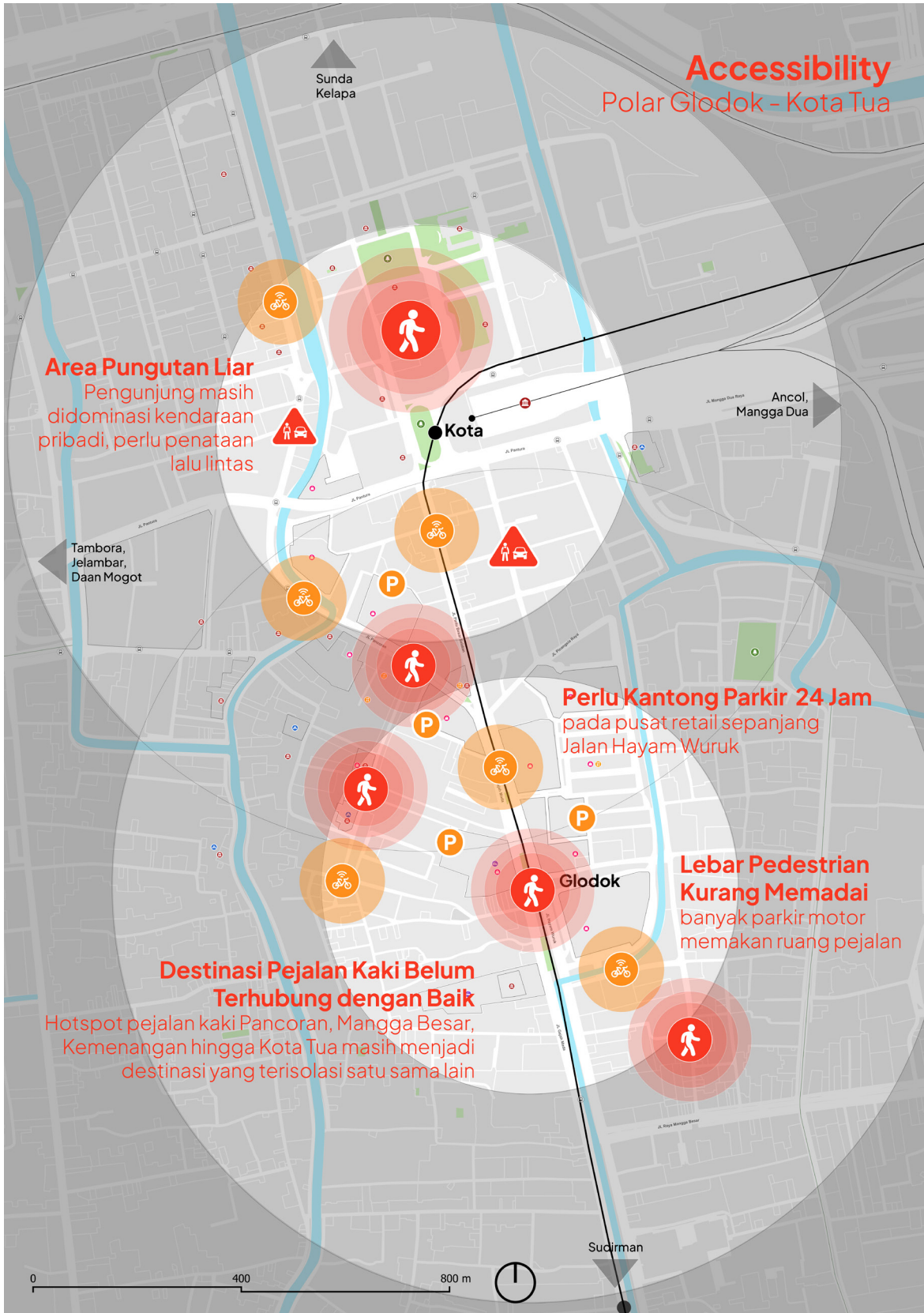
Kawasan Glodok dan Kota Tua memiliki jaringan transportasi publik yang cukup lengkap, namun belum sepenuhnya terintegrasi. Akses utama saat ini dilayani oleh TransJakarta (halte Kota dan Glodok) serta KRL *Commuter Line* melalui Stasiun Jakarta Kota sebagai simpul utama. Dalam beberapa tahun ke depan, kawasan ini akan diperkuat dengan kehadiran MRT Jakarta Fase 2 yang menghubungkan Kota dengan Bundaran HI, memberikan akses langsung bagi wisatawan tanpa perlu bergantung pada kendaraan pribadi. Proyek ini direncanakan rampung pada tahun 2029 dan diharapkan menjadi penghubung penting antara koridor heritage di utara dan pusat bisnis di selatan. Namun, selama masa pembangunan, aksesibilitas kawasan masih cukup terganggu, dan mobilitas malam hari masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi dan ojek daring.

Konektivitas:

Secara makro, Glodok dan Kota Tua memiliki posisi strategis di jantung jaringan kota. Akses dari pusat kota relatif mudah dijangkau di siang hari, baik melalui jalur utama Hayam Wuruk, Pintu Besar Utara, maupun Jembatan Batu. Namun, konektivitas malam hari masih menjadi persoalan. Sebagian besar moda transportasi umum seperti TransJakarta dan KRL berhenti beroperasi lebih awal, membuat kawasan ini relatif terisolasi di malam hari. Pekerjaan konstruksi MRT Fase 2 yang masih berlangsung juga menyebabkan sejumlah jalur dan simpul pejalan kaki tertutup sementara, menghambat integrasi antara kawasan Kota Tua, Glodok, dan Kali Besar. Meski begitu, pembangunan ini membuka peluang besar untuk menjadikan kawasan ini sebagai simpul utama ekonomi malam setelah jalur MRT selesai dan beroperasi penuh.

Walkability:

Dari sisi pejalan kaki, kawasan ini menunjukkan kualitas ruang yang kontras. Di sekitar Alun-Alun Fatahillah, jalur pedestrian tertata rapi, penerangan cukup, dan suasananya ramai dengan wisatawan, musisi jalanan, hingga komunitas kreatif. Namun ketika menyeberang ke arah Glodok dan Petak Sembilan, pengalaman berjalan kaki berubah drastis. Jalan besar seperti Hayam Wuruk dan Pintu Besar Selatan menjadi penghalang alami dengan trotoar sempit yang sering digunakan untuk parkir motor. Di Jalan Kemenangan Raya dan Kemenangan III, yang merupakan pusat kuliner dan budaya Tionghoa, belum tersedia trotoar yang layak sehingga pejalan kaki harus berbagi jalan dengan kendaraan. Kondisi ini semakin terasa pada malam hari ketika penerangan berkurang dan aktivitas mulai menurun, menjadikan kawasan terasa kurang aman dan nyaman untuk eksplorasi malam hari. Aktivasi malam di Glodok harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat kawasan ini juga merupakan permukiman padat dengan karakter sosial yang kuat. Pendekatan yang terlalu komersial dikhawatirkan menimbulkan *over tourism* dan menggeser fungsi hunian warga, sehingga strategi pengembangan ekonomi malam harus berfokus pada keseimbangan antara revitalisasi kawasan dan keberlanjutan kehidupan lokal.



b. Aspek Kelengkapan Kota (Amenity)

Fasilitas Publik:

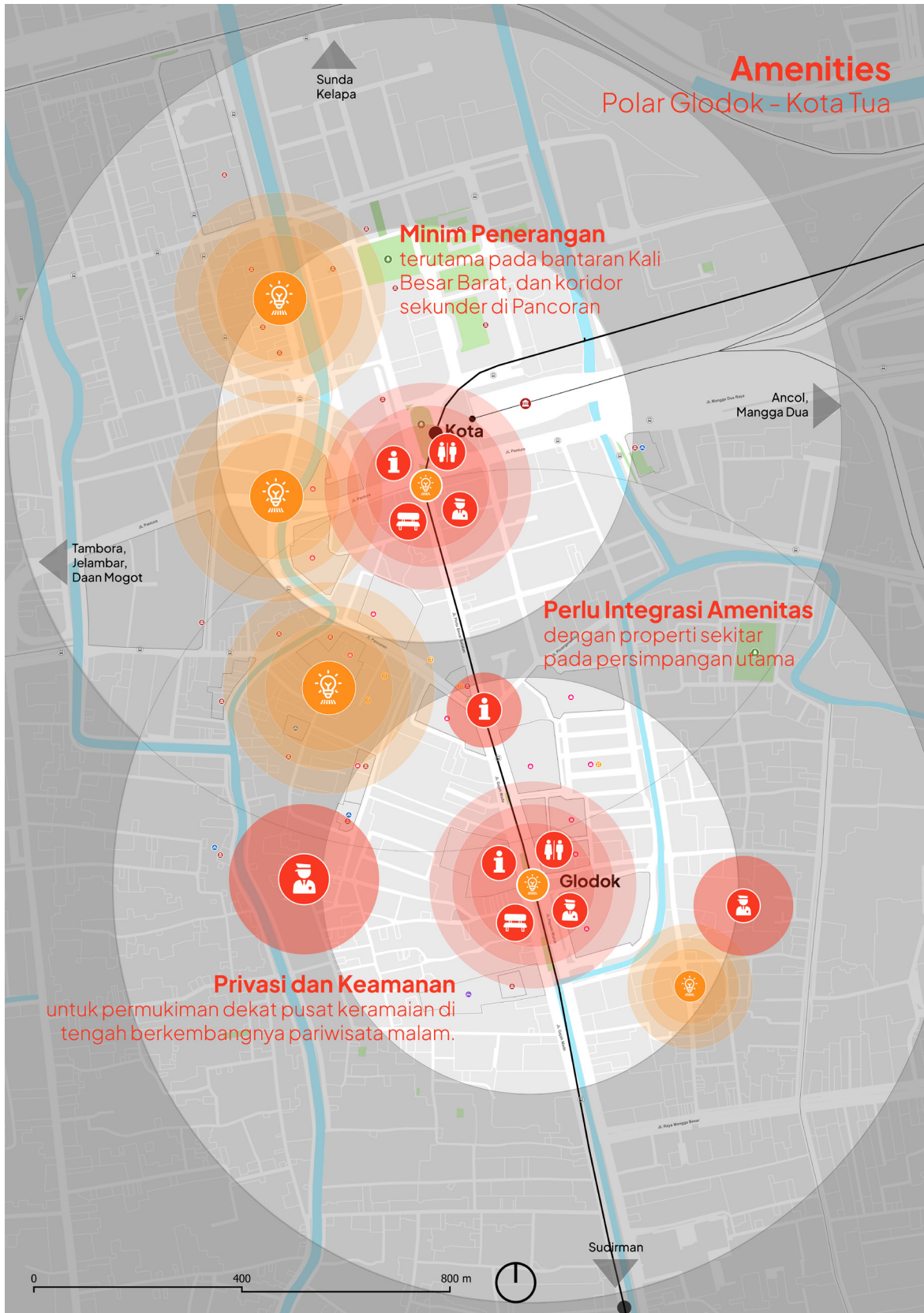
Kawasan Kota Tua memiliki konsentrasi fasilitas publik yang cukup kaya, mulai dari museum, masjid, vihara, gereja, pasar, hingga alun-alun Fatahillah sebagai ruang publik utama yang menjadi titik temu wisatawan, warga lokal, dan komunitas kreatif. Namun, distribusi fasilitas publik ini masih terpusat di sekitar alun-alun. Begitu bergeser ke arah Glodok, kualitas dan ketersediaan fasilitas publik menurun signifikan. Kawasan ini merupakan permukiman padat dengan jaringan jalan kecil dan ruang terbuka yang sangat terbatas. Hampir tidak ada ruang publik yang bisa berfungsi sebagai area interaksi sosial malam hari. Padahal, keberadaan ruang semacam ini penting untuk menjaga keseimbangan antara fungsi komersial dan kehidupan warga. Ke depan, perlu strategi revitalisasi mikro dengan memanfaatkan area semi-publik seperti halaman ruko, teras pasar, atau ruang depan klenteng menjadi kantong aktivitas komunitas malam yang lebih inklusif.

Keamanan dan Penerangan:

Dari sisi keamanan, Glodok dan Kota Tua masih menghadapi isu kriminalitas kecil, parkir liar, serta pungutan informal di area tertentu. Kondisi ini membuat pengalaman wisata malam menjadi kurang nyaman bagi pengunjung. Penerangan di beberapa titik juga belum merata, terutama di lorong-lorong Glodok, bantaran kali, dan area belakang pertokoan yang cenderung gelap setelah toko tutup. Peningkatan penerangan jalan umum (PJU) dan kamera pengawas (CCTV) menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya sebagai elemen keamanan tetapi juga bagian dari estetika malam hari kawasan *heritage*. Penataan cahaya yang baik bisa sekaligus memperkuat karakter visual kawasan dan memperpanjang waktu tinggal pengunjung di malam hari.

Parkir dan Mobilitas Lokal:

Parkir menjadi salah satu isu paling krusial dalam pengembangan ekonomi malam di kawasan ini. Saat akhir pekan, parkir liar sering kali menyebabkan kemacetan di Jalan Pancoran, Hayam Wuruk, dan Kemenangan Raya. Kapasitas parkir publik terbatas, sementara pengelolaan lahan parkir swasta belum terintegrasi. Padahal, beberapa lokasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kantong parkir resmi, seperti Pancoran Chinatown Point, Petak Enam, dan Gedung Chandra. Integrasi sistem parkir ini perlu dibarengi dengan perbaikan *walkability*, terutama dari kantong parkir menuju pusat keramaian seperti Petak Enam, Vihara Dharma Bakti, dan Alun-Alun Fatahillah. Jalur pejalan kaki yang aman, terang, dan nyaman akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sekaligus mendukung mobilitas wisatawan. Pendekatan ini dapat menjadi langkah awal menuju manajemen kawasan terpadu, di mana parkir, transportasi publik, dan pergerakan pejalan kaki saling mendukung dalam satu sistem yang efisien dan ramah kota malam.



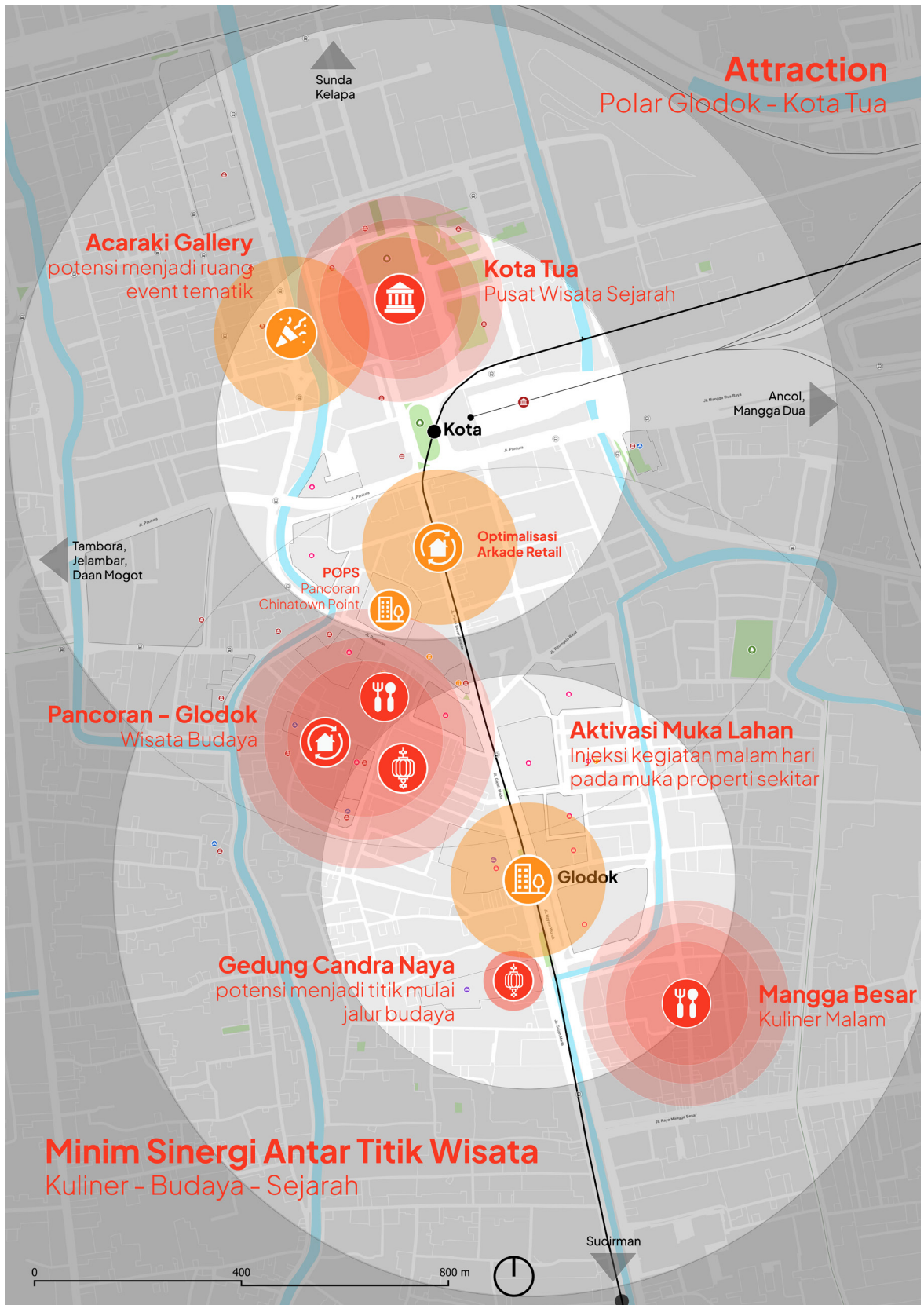
c. Aspek Daya Tarik Wisata (Attraction)

Kawasan Kota Tua dan Glodok memiliki karakter yang unik, perpaduan antara pesona kolonial Batavia dan nuansa pecinan tertua di Jakarta. Di satu sisi, Kota Tua tampil megah dengan arsitektur kolonial abad ke-17 hingga ke-19, bangunan bergaya Eropa dengan fasad tinggi, jendela besar, dan material bata tebal yang kini mulai direstorasi. Di sisi lain, Glodok menyajikan labirin jalan kecil, rumah toko dua lantai dengan arsitektur Tionghoa-Betawi, atap pelana, serta ornamen merah dan emas yang kuat secara visual. Perpaduan dua karakter ini menjadikan kawasan ini bukan sekadar ruang wisata, tetapi *living heritage district* yang merekam perjalanan Jakarta sebagai kota pelabuhan internasional.

Atraksi utama kawasan ini masih berpusat di sekitar Alun-Alun Fatahillah, tempat berdirinya Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Di sore hingga malam hari, area ini mulai ramai oleh wisatawan, fotografer, dan komunitas seni yang menggelar pertunjukan kecil. Pada akhir pekan, suasana semakin hidup dengan kehadiran pasar malam temporer dan penjual makanan kaki lima. Ke depan, area ini berpotensi besar dikembangkan menjadi zona wisata malam kolonial, di mana pencahayaan arsitektur bangunan heritage, musik jalanan, serta aktivitas kuliner dapat menciptakan pengalaman multisensori bagi pengunjung.

Sementara itu, kawasan Glodok menghadirkan daya tarik yang berbeda, lebih intim, hangat, dan sehari-hari. Di sini, budaya Tionghoa terasa hidup dalam ritual, aroma dupa, dan aktivitas pasar. Vihara Dharma Bakti, Petak Enam, dan Chinatown Market menjadi pusat spiritual dan kuliner yang menarik pengunjung dari berbagai latar belakang. Kawasan ini pernah memenangkan penghargaan sebagai desa wisata budaya perkotaan, berkat kekayaan tradisi dan interaksi sosialnya yang kuat.

Kini, generasi baru mulai menambahkan lapisan baru dalam sejarah ini. Munculnya Lit Bakehouse, Lil Salt Bread, dan Met Glodok membawa warna kontemporer ke dalam lanskap klasik. Di antara deretan ruko tua dan lorong sempit, Pancoran Tea House menjadi simbol perpaduan tradisi dan gaya hidup baru. Bangunan bergaya *heritage* yang disulap menjadi ruang teh modern ini menunjukkan bahwa warisan bisa beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Tidak jauh dari sana, Pancoran Chinatown Point berdiri sebagai kawasan *mix-use development* yang menggabungkan fungsi komersial, hunian, dan rekreasi. Integrasi baru ini memperkuat daya tarik kawasan sebagai ekosistem urban yang hidup 24 jam, tempat tradisi dan modernitas berjalan berdampingan.



d. Aspek Komunitas & Aktor Lokal (Community)

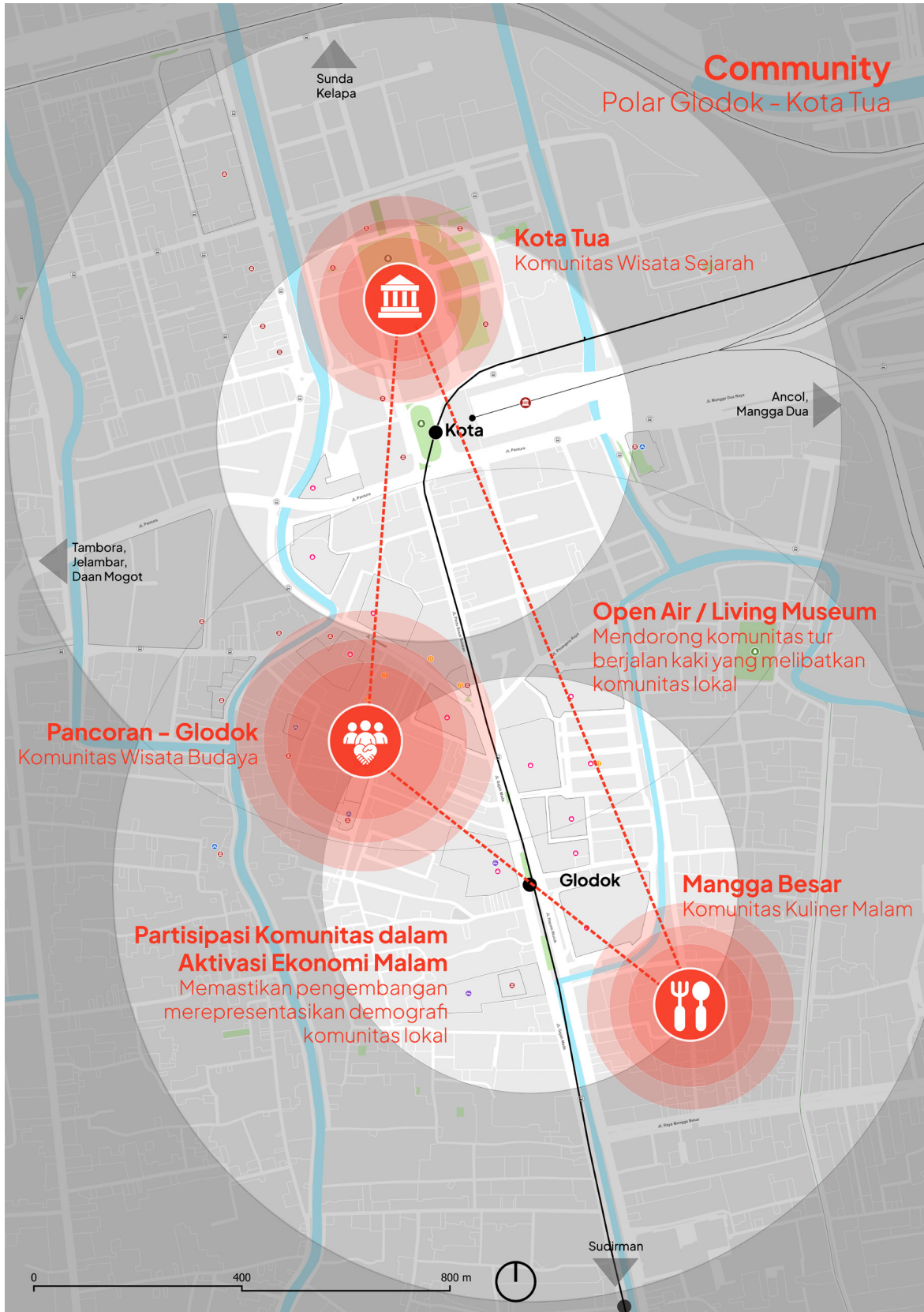
Komunitas di kawasan Glodok dan Kota Tua merupakan jantung dari kehidupan kawasan ini. Mereka bukan sekadar penghuni, tetapi penjaga ritme dan identitas yang membuat kawasan ini hidup dari hari ke hari. Di Glodok, komunitas yang terbentuk berlapis, mulai dari pedagang kaki lima, pemilik toko obat tradisional, penjaga vihara, hingga generasi muda pelaku usaha kreatif yang kini mulai membuka kafe, *roastery*, dan toko roti artisan di ruko-ruko lama. Hubungan sosial antar warga masih kuat; interaksi berlangsung di gang sempit, di depan rumah toko, atau di pasar yang hiruk pikuk sejak pagi. Semua ini menciptakan suasana akrab yang sulit ditemukan di kawasan komersial baru Jakarta.

Komunitas lama, terutama yang terkait dengan budaya Tionghoa, masih menjadi penjaga nilai-nilai spiritual dan sosial kawasan. Mereka aktif dalam kegiatan keagamaan di Vihara Dharma Bakti dan Vihara Toa Se Bio, serta turut menjaga tradisi Imlek dan Cap Go Meh yang setiap tahun menarik ribuan pengunjung. Di sisi lain, komunitas muda membawa energi baru dengan pendekatan yang lebih eksperimental. Mereka mengubah bangunan lama menjadi ruang kreatif yang multifungsi seperti galeri kecil, kafe, studio fotografi, atau tempat pertunjukan musik akustik. Lit Bakehouse, Met Glodok, dan Lil Salt Bread adalah contoh nyata generasi baru yang membangun dialog antara sejarah dan gaya hidup masa kini, menjadikan Glodok lebih terbuka bagi wisatawan muda tanpa menghapus identitas aslinya.

Selain itu, komunitas lintas etnis dan profesi juga tumbuh di sekitar Kota Tua. Pelaku pariwisata lokal seperti pemandu wisata, pegiat sejarah, dan seniman jalanan rutin berkolaborasi dalam aktivitas kreatif di Alun-Alun Fatahillah. Mereka sering menginisiasi tur tematik, pertunjukan musik, dan pameran seni ruang publik yang menghidupkan suasana malam kawasan heritage ini.

Kehadiran Pancoran Tea House dan Pancoran Chinatown Point memperluas jejaring komunitas ini. Di satu sisi, pengusaha lokal dan kreator muda dapat memanfaatkan ruang komersial yang modern. Di sisi lain, warga sekitar tetap terlibat dalam ekosistem ekonomi yang tumbuh dari bawah. Relasi ini memperlihatkan model ideal *urban regeneration*: pertumbuhan ekonomi yang tetap berakar pada komunitas lokal, bukan menggantikan mereka. Secara keseluruhan, aspek komunitas di kawasan Glodok–Kota Tua memperlihatkan transformasi yang harmonis antara pelestarian dan pembaruan.



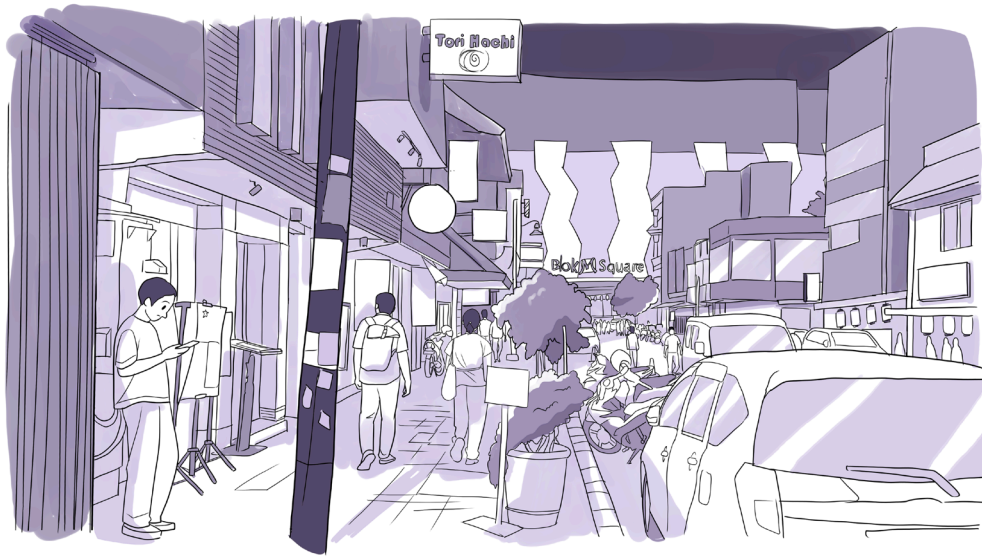


B ANALISIS JENAMA WISATA KOTA MALAM HARI

Jakarta sedang berada di persimpangan penting dalam membangun identitas barunya. Setelah melalui fase panjang dengan slogan-slogan seperti Enjoy Jakarta, Kota Kolaborasi, dan Jakarta Hajatan, kini saatnya kota ini melangkah ke arah yang lebih dalam, membangun jenama pariwisata kota malam yang utuh dan konsisten. Citra baru ini tidak berhenti pada logo atau *tagline*, melainkan bekerja seperti infrastruktur lunak, menata persepsi, memengaruhi perilaku, dan menciptakan rasa memiliki di antara warganya. Belajar dari *I amsterdam* dan *Seoul My Soul*,

Jakarta perlu menjahit ekonomi kreatif, pariwisata urban, dan gaya hidup malam dalam satu narasi yang menggugah.

Dalam konteks tiga polar utama, yaitu Blok M–Cipete, Bundaran HI–Dukuh Atas–Sabang, serta Glodok–Kota Tua, jenama wisata malam Jakarta dapat dibaca sebagai satu sistem konstelasi yang saling melengkapi. Masing-masing polar memiliki karakter, ritme, dan pengalaman yang berbeda, tetapi semuanya berkontribusi pada satu citra besar, ***Jakarta, a global creative night city.***



i. Southern Pole : Blok M – Cipete (Heartland of Jaksel Culture)

Polar ini adalah kutub paling matang dari segi kehidupan malam dan kreativitas. Blok M dinobatkan sebagai *the heartland of Jaksel culture*, tempat skena anak muda berkembang dengan gaya khas Jakarta Selatan yang santai namun penuh energi. Kawasan ini sudah lama menjadi pusat kreativitas yang hidup, dengan kafe independen, bar kecil, toko buku, studio musik, hingga ruang seni yang beroperasi hingga larut malam. Di area Little Tokyo, kehidupan kuliner malam berpadu dengan atmosfer urban yang padat dan ramah pejalan kaki. Simpang Temu CSW memperkuat citra modern dan terintegrasi dengan transportasi publik, sementara kawasan

kuliner seperti Gultik, sushi omakase, dan sederet bar di Cipete menambah warna gaya hidup urban yang otentik.

Dari sisi jenama kota, Blok M–Cipete berfungsi sebagai *continuing polar*, titik di mana *Owl Economy* sudah berjalan dan bisa segera diperluas. *Branding* kawasan ini diarahkan sebagai *Jakarta Creative District*, cerminan energi muda yang spontan, penuh eksperimentasi, dan mendukung UMKM gaya hidup urban. Dalam strategi *global city*, inilah wajah Jakarta yang paling dekat dengan semangat *Seoul My Soul*, kota yang hidup 24 jam di mana kreativitas tidak berhenti saat matahari terbenam.

ii. *Central Pole* : Dukuh Atas -Bundaran HI- Sabang (The Interchange : Nodes Local- Comtemporary Culinary and Fashion)

Polar ini menjadi simbol transisi Jakarta menuju kota global. Area ini menggabungkan pusat bisnis, ruang publik, dan zona kuliner dalam satu lanskap metropolitan yang terhubung dengan infrastruktur bawah tanah. Bundaran HI diposisikan sebagai *nodes of local contemporary culinary and fashion interchange*, menggambarkan dinamika urban di mana bisnis, gaya hidup, dan budaya bertemu dalam satu ruang yang hidup.

Pembangunan urban easement oleh PT MRT Jakarta yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI Bank DKI dengan Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Wisma Nusantara, dan Halte TransJakarta akan menciptakan jaringan komersial bawah tanah yang modern dan futuristik. Proyek yang dimulai pada kuartal IV 2025 ini akan menghadirkan pengalaman berjalan kaki yang aman, nyaman, dan berkelas global.

Area ini memiliki daya tarik wisata malam yang berlapis, mulai dari *city lights* Bundaran HI, kuliner Jalan Sabang, konser dan *live music* di Sarinah POPS, *observatory deck* di Thamrin Nine, hingga koridor Wahid Hasyim yang semakin hidup. Kombinasi ini menjadikan polar tengah sebagai *commencing polar*, wilayah yang siap dideklarasikan sebagai ikon pariwisata urban Jakarta. *Brand positioning*-nya diarahkan ke Jakarta Metropolitan Experience, menghadirkan pengalaman kota malam yang kosmopolitan namun tetap inklusif.

Seperti *I amsterdam* yang menampilkan keseimbangan antara turisme dan kehidupan warga, Bundaran HI dan sekitarnya dapat menjadi cerminan keseharian Jakarta yang modern namun ramah publik, di mana wisatawan, pekerja, dan komunitas lokal berbagi ruang yang sama.





iii. *Northern Pole* : Glodok – Kota Tua (*Melting Pod* : *Soul of Heritage Narrative*)

Polar ini menyimpan fondasi historis Jakarta, sekaligus peluang besar bagi masa depan pariwisata budaya malam. Kawasan ini dikenal sebagai *the soul of heritage melting pot*, skena orang Glodok yang memadukan kekayaan sejarah dan budaya Tionghoa yang masih hidup dengan arsitektur kolonial abad ke-17 hingga ke-19. Kota Tua adalah museum terbuka yang mencakup alun-alun Fatahillah, Museum Wayang, Jembatan Kota Intan, dan Stasiun Kota, sementara Glodok dikenal dengan kuliner, vihara, dan perkampungan padat yang autentik.

Generasi baru pelaku usaha kini ikut menghidupkan kawasan ini dengan sentuhan segar seperti Lit Bakehouse, Lil Salt Bread, dan Met Glodok. Kehadiran Hotel Tugu di Kali Besar dan revitalisasi Toko Merah memperkuat atmosfer *heritage* yang elegan, sementara Pancoran

Tea House dan kawasan Pancoran Chinatown Point menandai arah baru Glodok sebagai destinasi budaya dan kuliner malam. Dengan MRT fase 2 yang ditargetkan selesai pada 2029, konektivitas kawasan ini akan meningkat drastis, membuka peluang bagi wisata malam bertema *heritage revival* seperti pameran luar ruang, pertunjukan seni, dan wisata kuliner malam yang terkurasi.

Sebagai *preparing polar*, kawasan ini diarahkan menjadi Jakarta Heritage by Night, wajah historis kota yang dihidupkan kembali melalui pencahayaan, *storytelling*, dan aktivasi budaya. Dalam konteks branding global, kawasan ini berfungsi seperti *Kyoto after dark* di Jepang atau *Old Quarter Hanoi*, di mana sejarah dan kehidupan malam berpadu alami.

C ANALISIS REGULASI EKONOMI KREATIF MALAM



Kajian mendalam mengenai *Owl Economy* atau ekonomi malam Jakarta, khususnya dalam konteks pariwisata urban, memerlukan pembacaan yang menyeluruh terhadap lanskap hukum yang berlaku. Aktivitas pariwisata malam, mulai dari hiburan, kuliner, hingga atraksi budaya, seluruhnya beroperasi dalam batasan dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jakarta saat ini berada di persimpangan antara regulasi lama yang telah usang dan instrumen hukum baru yang masih mencari bentuk. Beberapa regulasi tingkat nasional memberi konteks penting, meskipun tidak semuanya relevan langsung dengan ekosistem ekonomi malam. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang sempat menjadi simbol deregulasi kini sudah tidak berlaku, meninggalkan kekosongan yang perlu segera diisi oleh aturan baru yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi kreatif.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme dan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal tampak tidak berkaitan langsung dengan dunia pariwisata, namun keduanya mencerminkan arah baru negara dalam mengatur rantai nilai secara detail, mulai dari aspek kesehatan hingga kepercayaan konsumen. Bagi ekosistem malam Jakarta, standar halal dalam *signage* kuliner atau kontrol kebersihan *street food* bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik dan citra kota yang modern namun inklusif.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi fondasi penting. Regulasi ini menetapkan horizon pembangunan kota dua puluh tahun ke depan, mengatur zonasi, fungsi lahan, serta koridor transportasi utama. Koridor MRT Utara-Selatan dan kawasan heritage seperti Kota Tua dan Glodok kini tidak hanya menjadi wacana pengembangan, melainkan sudah tercatat dalam *blueprint* hukum kota. Bagi ekonomi malam, RTRW ini adalah pagar dan panduan, menentukan di mana aktivasi ruang bisa diperluas tanpa benturan fungsi, serta di mana kawasan harus dilindungi dari tekanan komersial berlebihan.

Selaras dengan itu, dua regulasi menjadi jangkar utama pengembangan pariwisata urban di Jakarta, yaitu

Keputusan Gubernur Nomor 588 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Urban dan Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia. Keduanya menegaskan pentingnya penguatan ekonomi malam, dengan fokus pada tiga aspek utama: aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Dokumen ini memberi ruang bagi inovasi seperti taman aktif 24 jam dan skema *car-free night*. Namun, tanpa koordinasi lintas dinas yang jelas, kebijakan ini masih bersifat normatif. Di sinilah Kepgub 294 Tahun 2025 menambahkan dimensi global, menegaskan prioritas Jakarta untuk menembus daftar 20 kota global pada tahun 2045 melalui penguatan ekonomi malam dan pembangunan destinasi tematik yang ikonik.

Kajian-kajian sebelumnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seperti Strategi Ruang Kreatif dan Kajian Kota Kuliner, juga menekankan perlunya regulasi yang lebih cair. Pelaku usaha dan komunitas menuntut izin keramaian yang mudah, model perizinan terpadu, insentif pajak bagi UMKM malam, serta jaminan keamanan dan kebersihan yang sesuai dengan standar internasional. Jika dirangkai, semua ini menunjukkan arah yang sama: kota malam hanya bisa hidup jika regulasi memberi kepastian, sekaligus cukup lentur untuk menampung spontanitas komunitas kreatif.

i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata

i.i. Konteks dan Prinsip Utama

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 merupakan kerangka hukum tertinggi di tingkat provinsi yang mengatur industri pariwisata Jakarta dan merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004. Regulasi ini memberi kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pemerataan manfaat dan kesempatan berusaha. Jika regulasi sebelumnya menekankan pada pengembangan usaha, maka Perda 6 Tahun 2015 berorientasi pada pertumbuhan dan produktivitas ekonomi daerah, serta peningkatan citra dan daya saing global melalui pengelolaan sumber daya yang sistematis, terencana, dan bertanggung jawab.

Tiga pilar utama yang menjadi landasan adalah:

- Ekonomi, mendorong pertumbuhan masyarakat dan produktivitas ekonomi daerah.
- Citra dan Daya Saing, memanfaatkan sumber daya manusia dan budaya untuk memperkuat posisi Jakarta di tingkat global.
- Sosial Budaya, memperkuat jati diri, rasa cinta tanah air, dan kesatuan bangsa.

i.ii. Implikasi terhadap Owl Economy

Perda 6/2015 memperkenalkan prinsip keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai moral serta sosial budaya. Dua pilar penting terbentuk:

- **Pilar Ekonomi dan Pembangunan.**
Prinsip ini menegaskan bahwa kepariwisataan, termasuk ekonomi malam, bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan memperluas kesempatan berusaha sebagaimana tertulis pada Pasal 2 huruf a: mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia, lingkungan, dan hasil budaya menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Jakarta di tingkat global.
- **Pilar Moral dan Sosial Budaya.**
Peraturan ini memastikan agar pertumbuhan pariwisata tidak mengorbankan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Jakarta. Pasal 3 menegaskan penghormatan terhadap norma agama, hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Prinsip ini menjadi kontrol moral yang penting bagi ekonomi malam agar tetap selaras dengan nilai masyarakat dan menjaga keharmonisan antar warga kota.

i.iii. Mandat Implementasi dan Pengawasan

Sebagai payung hukum daerah, Perda 6/2015 memberikan mandat implementasi kepada pemerintah dalam beberapa aspek utama:

- **Kewajiban Pengusaha dan Pelarangan.**

Pasal 14 mengatur agar pengusaha menghormati nilai agama dan budaya, memberi pelayanan non-diskriminatif, mengembangkan kemitraan dengan UMKM, menjaga lingkungan, dan melaporkan kegiatan terlarang seperti penggunaan narkoba.

- **Mandat Perencanaan Strategis.**

Pasal 8 ayat (1) dan (2) mewajibkan pemerintah membuat Rencana Aksi Daerah Kepariwisata untuk jangka lima tahun, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

- **Mandat Regulasi Teknis Operasional.**

Pasal 15 ayat (1) sampai (4) mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi setiap pengusaha pariwisata yang wajib dianggarkan sebagai biaya usaha.

- **Sanksi dan Pengawasan.**

Pasal 97 menegaskan peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan lapangan, evaluasi, pelaporan, serta penindakan sanksi administratif bagi usaha yang melanggar.

ii. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

ii.i. Konteks dan Fungsi Implementasi

Pergub 18 Tahun 2018 berfungsi sebagai turunan teknis dari Perda 6 Tahun 2015. Regulasi ini menerjemahkan prinsip moral dan kewajiban pengusaha ke dalam mekanisme operasional, mulai dari klasifikasi usaha hingga tata cara pengawasan dan sanksi. Pergub ini memperkuat Pasal 15 tentang tanggung jawab sosial lingkungan serta Pasal 97 tentang tata cara penindakan dan pengawasan administratif.



ii.ii. Klasifikasi Usaha dalam Konteks Owl Economy

Pasal 3 Pergub 18 Tahun 2018 menjabarkan tiga belas bidang usaha pariwisata, antara lain:

- Usaha daya tarik wisata
- Usaha kawasan pariwisata
- Usaha jasa transportasi wisata
- Usaha jasa penyediaan akomodasi
- Usaha jasa makanan dan minuman
- Usaha penyediaan akomodasi
- Usaha hiburan dan rekreasi
- Usaha penyelenggaraan pertemuan dan pameran
- Usaha jasa informasi pariwisata
- Usaha jasa konsultan pariwisata
- Usaha jasa pramuwisata
- Usaha wisata tirta
- Usaha spa

Dalam konteks ekonomi malam, subsektor yang paling relevan adalah jasa makanan dan minuman serta hiburan dan rekreasi. Bidang makanan dan minuman mencakup restoran, rumah makan, bar, kafe, pusat penjualan makanan, jasa boga, bakeri, kedai kopi, kantin, penjualan makanan bergerak, dan penjualan makanan terapung. Sementara usaha hiburan dan rekreasi meliputi gelanggang olahraga, pemutaran film, arena seni, taman rekreasi, karaoke, promotor acara, hingga jasa perawatan rambut dan spa.

Usaha jasa makanan dan minuman meliputi bidang berikut menurut Pasal 11:

- Restoran
- Rumah makan
- Bar/rumah minum
- Kafe
- Pusat penjualan makanan
- Jasa boga
- Bakeri
- Kedai kopi (*coffee house*)
- Kantin/kafetaria
- Penjualan makanan dan minuman bergerak
- Penjualan makanan dan minuman terapung.

iii. Kepgub 588 Tahun 2022 dan Kepgub 294 Tahun 2025

Kepgub Nomor 588 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Urban menekankan tiga aspek utama: aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Dokumen ini membuka peluang bagi Jakarta untuk mengembangkan ruang publik malam seperti taman 24 jam dan car-free night. Namun, tanpa koordinasi antar dinas yang efisien, visi ini masih belum konkret di lapangan.

Kepgub Nomor 588 Tahun 2022 mewakili lapisan kebijakan paling operasional, bertindak sebagai pedoman pelaksanaan aksi yang nyata. Berbeda dengan Perda yang berfokus kepada visi dan Pergub yang berfokus pada aturan, Kepgub lebih berfokus kepada integrasi dan sinergi lintas sektor guna mewujudkan pengembangan pariwisata, termasuk sektor malam hari *Owl Economy*.

iii.i. Konteks Pariwisata Urban

Kepgub Nomor 588 Tahun 2022 didasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan Jakarta sebagai destinasi wisata berkelas dunia melalui pengembangan konsep Pariwisata Urban. Landasan filosofis ini menjadi fokus pada fasilitasi dan Pembangunan citra global. Dalam konteks *Owl Economy*, Kepgub ini menetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi malam tidak dapat ditangani oleh satu dinas saja, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur dan keamanan kolektif dari seluruh dinas terkait.



iii.ii. Mandat Keterpaduan Lintas Sektor dan Konsep 3A

Poin krusial dari Kepgub Nomor 588 Tahun 2022 adalah pembagian tugas kepada sejumlah 23 Perangkat Daerah untuk memastikan penyelenggaraan pariwisata berjalan secara maksimal. Keterlibatan berbagai dinas dan multi sektor ini mengikat aspek *Owl Economy* ke dalam kerangka pembangunan kota, khususnya melalui konsep aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A).

- **Aksesibilitas**

Implikasi aksesibilitas terhadap *Owl Economy* adalah adanya mandat untuk mengembangkan sistem transportasi umum yang aman, terintegrasi, dan nyaman bagi warga maupun wisatawan untuk mendukung mobilitas mereka.

- **Amenitas**

Fokus pada penyediaan dan pemeliharaan fasilitas publik seperti kebersihan dan utilitas termasuk dukungan bagi pengembangan ruang publik yang menyokong *Owl Economy* yang layak dan bersih.

- **Atraksi**

Adanya mandat untuk mempercepat pengembangan produk pariwisata, yang membuka peluang bagi kreasi destinasi dan acara malam hari baru, misalnya *car-free night*.

Adapun penyelenggaraan pariwisata urban menjadi tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai bidang masing-masing. Contohnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Menyusun program pariwisata urban serta mengoordinasikan konsep dan tema kawasan wisata urban sesuai karakteristik masing-masing kawasan. Contoh lainnya adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang bertugas untuk mengatur ketentuan pemanfaatan kawasan-kawasan pariwisata urban dalam Rencana Detail Tata Ruang.

iii.iii. Implikasi Celah Kebijakan

Pada Kepgub Nomor 588 Tahun 2022 telah tertuang ketentuan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata urban karena adanya penugasan kepada 23 Perangkat Daerah. Namun hal tersebut justru secara inheren menimbulkan celah implementasi yang penting untuk dikaji ulang, contohnya skala koordinasi dibandingkan dengan efektivitas. Skala koordinasi yang besar dan luas, yaitu berupa 23 Perangkat Daerah menimbulkan adanya risiko konflik prioritas dan birokrasi yang lambat. Contohnya, visi pembangunan infrastruktur transportasi masif untuk mendukung *Owl Economy* dapat terhambat oleh perbedaan prioritas antar dinas.

iv. Kepgub Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia

Kepgub Nomor 294 Tahun 2025 menambahkan bobot global melalui agenda Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia. Dokumen ini, yang lahir dari kajian *Kearney Global Cities Index*, menempatkan penguatan ekonomi malam dan pengembangan destinasi tematik sebagai prioritas strategis menuju 2045.

Keputusan ini mewakili berbagai lapisan kebijakan visioner yang menjadi landasan filosofis bersamaan dengan arah kebijakan seluruh pembangunan hingga tahun 2045, termasuk tercantum di dalamnya secara eksplisit untuk mengakselerasi perwujudan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Posisi *Owl Economy* kini diangkat ke tingkat strategi global, yang berarti kegiatan malam hari harus sesuai dengan standar global dan menjadi branding kota Jakarta. Strategi dan realisasinya harus diukur berdasarkan kualitas, keamanan, dan keragaman yang setara dengan kota-kota besar dunia dan mengharumkan citra global Jakarta.

Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia tersusun ke dalam 8 (delapan) buku strategis yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan A. T. Kearney, firma konsultan yang mempublikasikan *Global Cities Index (GCI)*. Analisis terhadap implementasi *Owl Economy* harus melibatkan seluruh buku strategis tersebut.



iv.i. Mandat Keterpaduan Lintas Sektor dan Konsep 3A

Buku 1 merupakan fondasi yang memberikan urgensi institusional terhadap pengembangan *Owl Economy* sebagai prasyarat Jakarta mencapai visi 2045. Visi Jakarta adalah termasuk ke dalam 20 kota besar dunia pada tahun 2045, dengan delapan prioritas utama yaitu:

- Pertumbuhan kota yang dinamis, tangguh, dan berkelanjutan
- Ekonomi yang terdiversifikasi, kuat, dan inklusif
- Masyarakat dan tenaga kerja yang diberdayakan
- Destinasi budaya dan kreatif yang terkenal
- Ramah lingkungan dan tahan iklim
- Infrastruktur dan konektivitas kelas dunia
- Pusat litbang dan inovasi
- Tata Kelola yang gesit dan adaptif

Adapun visi ini dipandu oleh North Star: kota global yang progresif, adil, kompetitif, berkelanjutan, dan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Ambisi ini didasarkan pada penilaian Kearney Global Cities Index (GCI) yang diluncurkan pada tahun 2008. Namun, Jakarta mengalami penurunan peringkat GCI yang semula berada pada posisi ke 54 pada tahun 2015 menjadi posisi ke 74 pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan karena adanya kesenjangan pada dimensi sumber daya manusia, pertukaran informasi, dan pengalaman budaya. Ketiga dimensi tersebut merupakan rumah bagi sektor pariwisata, hiburan, dan ekonomi malam. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun sudah ada *Owl Economy* Jakarta, namun belum mencapai kualitas dan daya saing yang diakui secara global dibandingkan kota-kota dunia lainnya. Hal ini menjadi ancaman terhadap visi 2045 sehingga sektor *Owl Economy* seharusnya menjadi prioritas strategis nasional. Dengan itu, untuk membalikkan tren penurunan ini, Buku 1: Visi dan Misi menetapkan program katalis yang secara langsung berpengaruh kepada sektor *Owl Economy*, khususnya yang tercantum pada Buku 4: Pariwisata & Penjenamaan Kota (Branding), Buku 6 Infrastruktur & Mobilitas, dan Buku 8: Tata Kelola, Kelembagaan, & Pembiayaan.

iv.ii. Analisis Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia Buku 2: Bisnis & Ekonomi

Buku 2: Bisnis & Ekonomi berguna sebagai landasan misi strategis yang mendukung Jakarta sebagai kota global dalam aspek bisnis dan ekonomi. Jakarta telah menjadi pusat ekonomi Indonesia selama hampir lima abad lamanya dengan kontribusi sejumlah 6% terhadap PDB ASEAN dan berkontribusi sejumlah 17% terhadap PDB nasional pada tahun 2023. Maka dari itu, Buku 2: Bisnis & Ekonomi berfokus untuk memberikan landasan bagi Jakarta untuk menjadi *economic growth engine* atau motor penggerak utama, dengan bertepatan kepada elemen strategis “Ekonomi yang Terdiversifikasi, Kuat, dan Inklusif”. Terdapat beberapa program kerja utama yaitu:

a. Fokus Industri Vertikal

Jakarta sebagai Pusat Industri Maju (Advanced Industries)

Jakarta menjadi pusat perekonomian Indonesia, yang berasal dari empat sektor utama, yaitu perdagangan (18% dari PDRB), manufaktur (12%), jasa keuangan (11%), dan konstruksi (11%) (BPS, 2024), dengan pertumbuhan CAGR yang stabil sebesar 3,1-6,4% pada periode 2019-2023 (BPS, 2024). Untuk mencapai tujuan Jakarta masuk ke dalam 20 besar kota global, Jakarta perlu menyeimbangkan sektor-sektor lain dan menciptakan pemerataan ekonomi kota. Urgensi akan hal ini semakin tinggi karena rasio Gini Jakarta mengalami kenaikan dari semula 0,39 menjadi 0,43 pada periode 2018-2023, dibandingkan dengan rasio Gini nasional yang stabil di 0,39. Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia lebih pesat, industri manufaktur di Jakarta merupakan salah satu elemen kunci, mencakup sektor seperti tekstil,

otomotif, elektronik, serta makanan dan minuman. Industri ini tidak hanya terpusat di satu titik, namun tersebar di berbagai kluster di Jakarta serta wilayah aglomerasi yang meluas, mencakup Tangerang, Bekasi, dan Karawang, dengan kontribusi cukup signifikan sebesar 12% pada tahun 2023. Namun, walaupun beberapa industri tersebut di Jakarta telah mengadopsi teknologi, rata-rata masih banyak yang berada di tahap adopsi awal, dibandingkan dengan beberapa pusat manufaktur di Tiongkok seperti Shenzhen, Guangzhou, dan Guangdong yang telah mengintegrasikan teknologi lebih maju seperti analitik data, Internet of Things (IoT), dan robotika ke dalam proses produksi. Selain itu, ada faktor eksternal yaitu infrastruktur yang menyebabkan kemacetan dan inefisiensi logistik. Hal ini mendorong relokasi industri

ke wilayah lain. Faktor lainnya adalah biaya operasional di Jakarta yang tinggi, sehingga apabila tidak diimbangi dengan produktivitas dan efisiensi akan memperlambat investasi asing. Dari faktor sumber daya manusia (SDM) sendiri juga masih kurang memadai, karena mayoritas 50% tenaga kerja tidak

memiliki keterampilan teknis tingkat lanjut. Jakarta harus melakukan diversifikasi ke arah manufaktur yang lebih maju, mendorong transformasi digital, modernisasi infrastruktur, dan berinvestasi pada pelatihan tenaga kerja.

Jakarta sebagai Pusat Keuangan

Sektor keuangan di Jakarta berpotensi untuk meningkatkan layanan secara holistik, termasuk menjadi pusat perbankan Syariah yang terkemuka. Data per November 2023, Jakarta memiliki distribusi pembiayaan Syariah tertinggi di seluruh kategori utama dengan total pembiayaan mencapai Rp 221,2 triliun (OJK, 2023). Posisi ini didukung oleh infrastruktur Jakarta, dukungan pemerintah, dan tidak terlepas Jakarta adalah rumah bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI memiliki peluang untuk memperluas jangkauannya, secara khusus pada pasar karbon, sebuah layanan keuangan yang lebih maju yang saat ini belum dimanfaatkan

secara maksimum. Bursa karbon BEI memiliki 48 pengguna berlisensi dengan total volume perdagangan sebesar 501.910 tCO₂e (Ton Karbon Dioksida Ekuivalen) senilai Rp 31,4 miliar, menjadikan pasar karbon ini cukup menjanjikan. Dengan kata lain, Jakarta memiliki potensi sebagai pusat keuangan global yang memiliki ekosistem keuangan yang modern, efisien, dan inklusif, agar dapat terus menarik investasi dan pelaku regional maupun internasional. Dengan posisinya sebagai pemimpin keuangan Syariah, Jakarta juga dapat memperluas inisiatif keuangan seperti perdagangan karbon untuk memperluas pasar keuangan.

Jakarta sebagai Pionir Sektor TIK di Indonesia

Sektor TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Jakarta didorong secara signifikan oleh perdagangan elektronik, dengan pemain dominan seperti Tokopedia dan Shopee yang berkontribusi terhadap USD 65 miliar pada 2024, atau 72% dari total ekonomi digital Indonesia. Di samping itu, berdasarkan data dari Google (2024), Jakarta menjadi provinsi yang penduduknya memiliki minat dan peminatan tertinggi terhadap *Artificial Intelligence (AI)* di Indonesia. Namun demikian pemanfaatan AI di Jakarta masih tertinggal dibandingkan kota berbasis teknologi lain yang telah memanfaatkan AI untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di negara-negara maju. Jakarta juga belum berhasil menarik investasi dengan skala besar untuk mengembangkan infrastruktur TIK, lain halnya dengan kota maju seperti Kuala Lumpur yang telah berhasil menarik investasi besar yaitu pendanaan sebesar USD 14,5 miliar dari Google, Microsoft, dan Amazon pada tahun 2024 silam. Investasi ini disokong oleh kebijakan

pemerintah, yaitu contohnya adalah Rencana Fiberisasi dan Konektivitas Nasional (NFCP), Peta Jalan Strategis eCommerce Nasional, serta inisiatif Kota Cerdas Malaysia yang memadukan teknologi dan kehidupan urban. Selain itu, Jakarta juga mengalami kekurangan tenaga kerja digital siap pakai. Permintaan tenaga kerja digital sebesar 10,6 juta pada tahun 2023, sementara di Indonesia sendiri hanya memiliki 6 juta tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan kota lain seperti Bengaluru, di mana talenta digital di Bengaluru berkembang lima kali lebih cepat dibandingkan sektor lain dengan jumlah lulusan STEM sebanyak lebih dari 2 juta talenta. Maka dengan demikian, kota Jakarta dapat memaksimalkan potensi dan peluang untuk meningkatkan daya tarik investasi, mempersiapkan keterampilan dan kesiapan tenaga kerja, dan memperkuat konektivitas serta infrastruktur digital untuk memastikan kesiapan kota Jakarta untuk bersaing dan memenuhi tuntutan ekonomi digital.

Jakarta sebagai Pusat Pengembangan Jasa Perhotelan

Sektor jasa di Jakarta, khususnya perhotelan serta makanan dan minuman menyumbang 5% dari PDRB kota pada tahun 2023. Sektor ini memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi karena profil penduduknya yang masih muda dan produktif, didominasi oleh Gen Z sebesar 25% dari populasi Indonesia. Di negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan, sektor perhotelan dan ritel masing-masing berkontribusi sebesar 10,8% dan 7,5% dari total lapangan kerja. Demografi ini membuka peluang untuk ekspansi sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi secara langsung terhadap perekonomian kota. Sektor jasa juga akan memainkan peran strategis dalam konteks *Owl Economy*.

Jakarta sebagai Pusat Bisnis

Visibilitas Jakarta di kancah global masih terbatas karena hanya memiliki satu perusahaan yang terdaftar di Fortune 500, jauh tertinggal dari Tokyo yang memiliki 28 perusahaan, dan Shanghai yang memiliki 13 perusahaan. Kesenjangan ini harus diatasi dengan meniru keberhasilan Singapura yang unggul dengan posisi peringkat pertama ada Indeks Peluang Global oleh Milken Institute, berkat adanya kerangka peraturan yang jelas dan efisien, yang memfasilitasi penegakan kontrak dan penyelesaian sengketa dalam berbisnis. Kebutuhan akan kerangka peraturan yang efisien ini secara langsung menekan konflik mandat yang ada dan menuntut penyederhanaan regulasi untuk memfasilitasi bisnis. Celah konflik mandat ini akan menjadi penghalang utama bagi Jakarta untuk menarik investasi global, terutama di sektor *Owl Economy* dan mencapai visi 2045.

b. Pembangunan pesisir

Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menyumbang sebesar 48% dari PDRB kota pada tahun 2023. Wilayah tersebut sudah mencapai potensi maksimal karena pembangunan yang telah mencapai titik jenuh dan tidak ada lahan tersisa untuk ekspansi. Sedangkan wilayah lainnya seperti Jakarta Utara, termasuk Kepulauan Seribu, memiliki potensi yang sangat besar dan belum dimanfaatkan.

Wilayah pesisir Jakarta Utara dapat menjadi pendorong untuk fase pertumbuhan karena memiliki tiga tujuan wisata utama yaitu Ancol, Sunda Kelapa, dan Kepulauan Seribu yang terkenal akan kekayaan budaya dan keindahan alamnya. Ancol telah menarik 11,4 juta wisatawan dengan pendapatan tahunan mencapai Rp1,3 triliun. Namun sebagai tempat rekreasi, potensi Ancol masih belum maksimal karena masih terbatasnya fasilitas untuk kegiatan MICE (*meetings, incentives, conferences, dan exhibitions*).

Wilayah Sunda Kelapa sebagai pelabuhan bersejarah juga berhasil menarik 50.000 pengunjung setiap tahunnya sebelum pandemi, dan menurun menjadi 12.000 pengunjung pada tahun 2022 setelah pandemi. Pelabuhan Sunda Kelapa memiliki potensi pengembangan yang besar, dan PT Pelabuhan Indonesia II telah merencanakan rencana induk untuk merevitalisasi Sunda Kelapa sebagai Pelabuhan Warisan. Revitalisasi ini merupakan upaya transformasi untuk meningkatkan daya tarik wisata dan investasi.

Wilayah Kepulauan Seribu memiliki potensi yang tidak kalah besarnya dengan wilayah lain. Tetapi, wilayah Kepulauan Seribu masih kekurangan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi. Hal ini merupakan tantangan yang menyebabkan penundaan, kepadatan kapal, dan tantangan logistik bagi pengunjung wisata. Walaupun banyak hotel dan resor premium di seluruh pulau, tetap ada kesenjangan dalam hal standarisasi kualitas.

Program pembangunan pesisir diarahkan untuk merevitalisasi dan menangkap potensi besar wilayah Ancol, Sunda Kelapa, dan Kepulauan Seribu, yang saat ini potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk sektor pariwisata. Tujuan strategisnya adalah mengubah wilayah ini menjadi wilayah dengan penawaran komersial dan rekreasi bernilai tinggi. Visi ini meniru keberhasilan global seperti pengembangan tepi laut Minato Mirai di Yokohama. Model Minato Mirai ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan pesisir harus mengintegrasikan konektivitas yang efektif dan berorientasi pada transit, dan mengutamakan pejalan kaki, angkutan umum, dan MICE. Integrasi seperti ini akan meningkatkan daya tarik *Owl Economy* di kawasan tersebut dan menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai prasyarat keberhasilan zona ekonomi malam.

c. Pusat Ekonomi dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang ditetapkan oleh negara dengan peraturan ekonomi khusus yang diimplementasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan menarik investasi, menggerakkan inovasi, dan menjadikan kota sebagai pusat industri utama. Program pusat ekonomi dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengakui potensi pengembangan ekonomi pada lokasi dekat dengan simpul transportasi utama (*Transit Oriented Development/TOD*) seperti area Manggarai, Gambir, Dukuh Atas, dan Monas. Area-area tersebut memiliki aset pemerintah yang belum dimanfaatkan yang dapat diubah menjadi pusat komersial yang dinamis, seperti ritel, ruang perkantoran, dan

industri jasa. Model pembangunan seperti ini dapat meniru keberhasilan global seperti pembangunan kembali Stasiun Shibuya di Tokyo, Jepang, yang bertransformasi dengan adanya penambahan area signifikan dagedung perkantoran. Dengan mengubah area di dekat pusat transportasi utama, didukung oleh perumahan dan ruang ritel, dapat memanfaatkan lalu lintas pejalan kaki yang tinggi dan aksesibilitas untuk mendorong *Owl Economy* yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Selain pertumbuhan ekonomi, strategi pusat ekonomi ini juga menciptakan ruang komunitas yang dinamis, menawarkan berbagai peluang usaha baru, menarik penghuni dan juga investor.

d. Pengembangan UMKM dan Sektor Informal

Dalam konteks *Owl Economy*, pengembangan UMKM dan sektor informal sangat krusial karena merupakan tulang punggung, mengingat UMKM menyumbang 61% dari PDB nasional dan mendominasi 94% perekonomian Jakarta yang meliputi 1,1 juta UMKM. Pertumbuhan dalam sektor UMKM dan sektor informal harus bersifat inklusif. Adapun tantangan utama

dalam sektor ini adalah keterbatasan modal (32%), pemasaran dan akses pasar yang terbatas (28%), dan adanya kesukaran untuk memperoleh bahan baku (22%). Hal ini menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing di skala nasional, padahal UMKM adalah penggerak motor utama ekonomi dan penting bagi Jakarta untuk mencapai status 20 besar kota global.

e. Pengembangan Start-up

Jakarta memiliki ekosistem *start-up* yang terus menerus berkembang, dengan industri yang beragam mulai dari *fintech*, logistik, *e-commerce*, sampai transportasi. Akan tetapi, sumber dari Jakarta Globe (2023) menyatakan banyak *start-up* atau perusahaan rintisan yang belum berhasil sukses dan malah memiliki umur yang pendek, dikarenakan kesenjangan kapabilitas internal, tantangan pendanaan, dan keterbatasan infrastruktur. Sedangkan kota global seperti San Fransisco, New York, London, Berlin, dan Beijing telah menjadi contoh kota dengan ekosistem *start-up* yang memadai. Contohnya New York dan London memiliki sektor keuangan yang kuat dan didukung oleh regulasi relevan, sehingga munculnya banyak perusahaan rintisan di bidang *fintech*. Contoh lainnya adalah Beijing

dengan ekosistemnya yang sangat mendukung perusahaan rintisan berbasis teknologi, khususnya pada lingkup AI (*artificial intelligence*), sistem pembayaran digital, dan perdagangan elektronik. Jakarta dapat mengambil contoh kota global lain untuk membangun ekosistem yang mendukung pengembangan *start-up* yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain memperkuat infrastruktur, diperlukan juga perluasan program inkubator yang memperkuat ekosistem *start-up* di Jakarta, serta menjalin hubungan dengan investor dan pemangku kepentingan lain, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

f. Iklim Bisnis

Indonesia menduduki peringkat ke 73 dalam Peringkat Kemudahan Berusaha dari Bank Dunia pada tahun 2020, mengalami kenaikan dari peringkat 106 pada tahun 2016 (World Bank, 2020). Peningkatan ini menunjukkan bahwa adanya pelebaran peluang bagi pelaku bisnis untuk berbisnis di Jakarta. Namun, terdapat tiga area utama untuk meningkatkan lingkungan bisnis di Jakarta, yaitu pengurusan izin

konstruksi, pendaftaran properti, dan penegakan kontrak. Ketiga hal ini akan mendukung sistem manajemen dan membangun iklim bisnis yang positif. Jakarta dapat mencontoh Singapura, yang mempunyai lingkungan regulasi yang pro-bisnis, sederhana, dan efisien, didukung oleh infrastruktur digital terpadu yang dibangun oleh pemerintah.

iv.iii. Analisis Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia Buku 3: Masyarakat & Tenaga Kerja

Dimensi sumber daya manusia merupakan dimensi krusial yang menyumbang bobot sebesar 30% Global Cities Index (GCI) dari Kearney, yang menilai bagaimana sebuah kota mempekerjakan sumber daya manusianya. Kota lain yang memiliki bobot tinggi memiliki tenaga kerja yang produktif, berdaya saing tinggi, mendorong inovasi, dan mampu menarik investasi global. Tetapi, Jakarta mengalami penurunan peringkat GCI yang semula berada di posisi 54 pada tahun 2015 menjadi posisi 74 pada tahun 2024. Adanya penurunan signifikan sebanyak 20 peringkat ini mencerminkan bahwa kota lain maju lebih pesat dan sumber daya manusia di Jakarta belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, Jakarta memprioritaskan beberapa program utama dalam 20 tahun ke depan, yaitu:

a. Edukasi & pola pikir

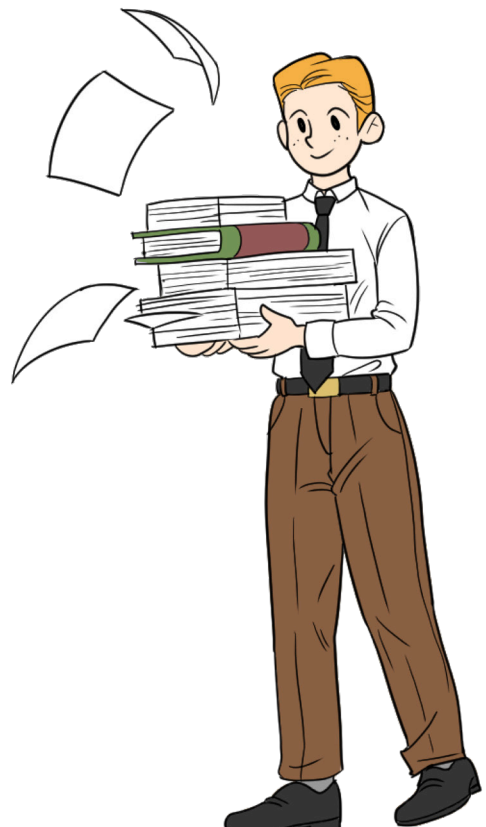
Padasektor pendidikan, Jakarta belum mengoptimalkan transformasi digital seperti kota lain, contohnya dari pemerintah Seoul yang menerapkan “*Seoul Learn*”, yaitu sebuah program yang menyediakan sumber daya pendidikan gratis bagi siswa berusia 6-24 tahun yang berpenghasilan rendah. Program ini telah terbukti berhasil karena sebanyak 74% peserta dari program berhasil masuk ke universitas. Kota New York memberlakukan Pusat Keberhasilan Siswa yang mempersembahkan dukungan personalisasi seputar bimbingan akademik, konseling karier, dan menerapkan “Sistem Peringatan Dini” untuk membantu siswa yang berisiko putus sekolah. Jakarta dapat meniru kota-kota yang telah berhasil menerapkan program untuk memastikan kualitas pendidikan yang tinggi dan merata, mulai dari dukungan finansial,

dukungan infrastruktur sekolah, program magang dengan industri, kelas mandiri dan pembelajaran fleksibel secara daring, pelatihan akan keterampilan yang dibutuhkan, serta penerapan pembelajaran yang menerapkan transformasi digital. Selain itu, Jakarta juga perlu meningkatkan ketersediaan dan kualifikasi pengajar, contohnya dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Pasal 29 yang membuka peluang bahwa Jakarta dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing untuk mengadopsi kurikulum internasional atau membuat inovasi dalam jangka panjang. Jika diterapkan dengan baik, hal-hal tersebut akan meningkatkan standar pendidikan di Jakarta yang akan meningkatkan edukasi & pola pikir sumber daya manusia di Jakarta.

b. Tenaga kerja yang siap mengalami masa depan

Populasi usia kerja di Jakarta menggapai 8,34 juta jiwa, dengan 5,43 juta orang yang di dalam rentang usia kerja pada Februari 2024. Meskipun demikian, angka pengangguran masih besar yaitu sebanyak 327.000 orang. Lulusan universitas tidak menjamin segera mendapat kerja, dibuktikan dari tingkat pengangguran yang stagnan yaitu mulai dari 5,9% pada tahun 2018 hingga 5,2% pada tahun 2023 (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dan ketimpangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan kebutuhan dari industri. Terdapat empat pertimbangan utama bagi Jakarta agar dapat meningkatkan

kualitas tenaga kerja, yaitu perlunya upaya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, perlunya program pendidikan yang lebih modern untuk mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, mereformasi pendidikan jangka panjang, serta menarik talenta global dan membalikkan brain drain. Dengan melakukan upaya ini, Jakarta dapat membentuk tenaga kerja yang siap mengalami masa depan.



c. Kesehatan

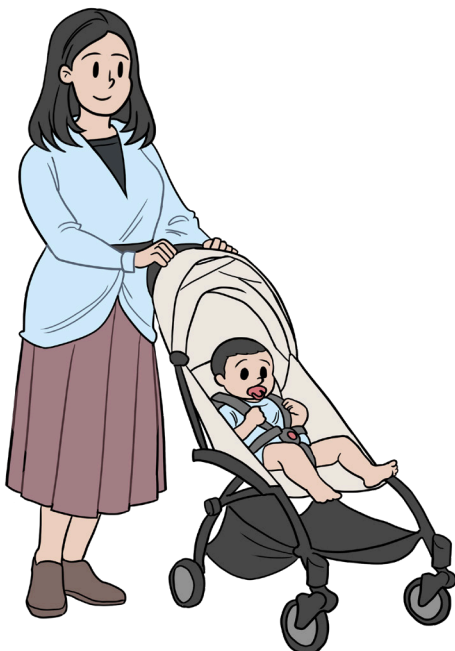
Jakarta memiliki Cakupan Kesehatan Universal (*Universal Health Coverage* (UHC)) mencapai 98,5% pada tahun 2023. Hal ini melambangkan kemajuan dalam sektor kesehatan, walaupun belum sepenuhnya seperti Singapura yang mencapai 100% (BPS, 2023). Secara sistem, Jakarta memiliki kapasitas yang moderat dalam hal jumlah praktisi medis, yaitu dengan rasio 1,2 dokter per 1.000 orang. Rasio ini masih jauh tertinggal dengan kota lain seperti Singapura yang memiliki rasio 2,8 dokter per 1.000 orang (Kementerian Kesehatan, 2023). Infrastruktur rumah sakit Jakarta juga masih memerlukan peningkatan, yaitu sekarang 2,6 tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang, jumlah yang sedikit di bawah rekomendasi WHO yaitu sebanyak 3 tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang. Dalam sektor kesehatan, Jakarta harus meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan publik dan swasta. Jakarta dapat mencontoh dari kota lain

seperti Bangkok, yang memastikan akses bagi seluruh penduduk Bangkok dengan pendekatan berbasis komunitas yang menerapkan prinsip keadilan, efisiensi, dan tanpa diskriminasi. Sebagai prestasinya, Bangkok berhasil mencapai Cakupan Kesehatan Universal (*Universal Health Coverage* (UHC)) 99,99% cakupan penduduk pada tahun 2024. Dapat disimpulkan untuk meningkatkan tingkat kesehatan di Jakarta, Jakarta dapat berkonsentrasi untuk meningkatkan rasio dokter terhadap populasi, menyediakan infrastruktur medis yang layak, dan menyederhanakan proses administrasi dan distribusi layanan kesehatan. Rumah sakit juga dapat bekerja sama dengan universitas kedokteran internasional, dengan membangun program kolaborasi dan memperluas jaringan, serta membangun kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk meningkatkan kualitasnya.

d. Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Kesetaraan gender di Jakarta memiliki kemajuan namun belum cukup signifikan. Pada tahun 2022-2023, Indeks Ketidaksetaraan Gender (*Gender Inequality Gender/GII*) di Jakarta turun dari sebesar 0,32 menjadi 0,26. Sementara itu, bagi penyandang disabilitas, terdapat peningkatan partisipasi penyerapan tenaga kerja yang signifikan yaitu dari 277.000 orang pada tahun 2021 menjadi tahun 720.000 orang pada tahun 2022. Serta dari inklusi sosial, rasio Gini di Jakarta mengalami peningkatan dari yang semula 0,39 menjadi 0,42 antara tahun 2018

hingga tahun 2024. Sementara, rasio Gini Indonesia sebesar 0,38, yang menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan di Jakarta. Untuk meningkatkan inklusivitasnya, Jakarta dapat melakukan empat inisiatif utama yaitu menutup kesenjangan gender dalam sektor pendidikan, mengurangi diskriminasi pada partisipasi tenaga kerja, meningkatkan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia melalui layanan sosial yang lebih holistik.



e. Perumahan terjangkau dengan ruang publik terpadu

Masalah yang terus dihadapi oleh Jakarta adalah populasi yang bertambah, namun kepemilikan rumah di Jakarta belum menunjukkan kemajuan. Jakarta memiliki tingkat kepemilikan rumah sebesar 51% pada tahun 2022 (BPS, 2023), sementara sebagai perbandingan, Singapura memiliki tingkat kepemilikan rumah sebesar 91% karena program *Housing Development Board* (HDB) yang diinisiasi oleh pemerintah. Dalam kualitas perumahan, Jakarta juga masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura. Hanya sebanyak 34% rumah tangga di Jakarta dianggap layak huni pada tahun 2019, sementara di Singapura, sebanyak 80% warga Singapura bertempat tinggal di rumah susun dengan kualitas tinggi yang dibangun oleh pemerintah. Melalui program *Housing Development Board* (HDB), pemerintah Singapura menghibahkan pembeli rumah pertama serta menerapkan kebijakan perumahan agar warganya dapat memiliki akses pada perumahan yang terjangkau. Jakarta telah berupaya untuk menyediakan perumahan yang terjangkau bagi

warganya, dengan membuat inisiatif seperti rumah susun (rusun) untuk penduduk berpenghasilan rendah yang telah membangun lebih dari 28.000 unit pada tahun 2021 (BPS, 2022). Akan tetapi, masih ada celah untuk meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau, seperti memilih lokasi yang lebih strategis, memperkuat struktur transportasi, dan menyediakan layanan pendukung berupa fasilitas kesehatan serta pelatihan kerja untuk mendukung masyarakat Jakarta. Di samping meningkatkan ketersediaan perumahan, pemerintah Jakarta juga dapat mengutamakan pembangunan pusat komunitas di area sekitar pemukiman, di mana area ini dapat diarahkan oleh sektor publik dan atau swasta untuk menyediakan berbagai macam fasilitas, layanan, serta sarana berbagai bidang seperti olahraga, pertemuan, acara, taman bermain, perpustakaan, dan lainnya. Jakarta dapat mencontoh Singapura yang berhasil mengintegrasikan area pemukiman dengan pusat komunitas, seperti area Our Tampines Hub, Kampung Admiralty, dan Heartbeat@Bedok.

Buku 3: Masyarakat dan Tenaga Kerja menceritakan tentang tuntutan sumber daya manusia kelas dunia, namun sumber daya Jakarta mengalami ketimpangan keterampilan yang parah terbukti dari banyaknya jumlah pengangguran. Sektor *Owl Economy* terutama pada bidang pariwisata dan jasa harus memiliki sumber daya manusia yang berketerampilan tinggi. Jakarta harus melatih talenta dan mempersiapkan sumber daya manusianya terutama di bidang perhotelan, pariwisata, F&B, dan jasa untuk mendukung investasi dan inovasi Owl Economy. Untuk mendukung hal tersebut, regulasi tidak boleh menghambat operasional industri tersebut. Kualitas tenaga kerja juga menuntut fleksibilitas jam kerja dan kepastian hukum operasional 24 jam di tempat bekerja. Buku 3: Masyarakat dan Tenaga Kerja menuntut peran regulator berubah yang semula adalah mandat penertiban dan pengusiran, seperti Satpol PP menurut Perda lama, untuk berubah menjadi mandat pengaturan dan perlindungan pekerja di sektor ini, termasuk kuliner malam, yang harus dilindungi secara sosial. Ruang publik dan transportasi malam juga harus dibuat dan diatur secara aman dan dapat diakses oleh semua kelompok, terutama perempuan dan penyandang disabilitas. Hal ini memaksa regulator dan aparat keamanan untuk beralih fungsi dari kontrol yang kaku kepada fungsi perlindungan di zona ekonomi malam.



*iv.iv. Analisis Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia
Buku 4: Pariwisata & Penjenamaan Kota (Branding)*

Buku 4: Pariwisata & Penjenamaan Kota (*Branding*) merupakan edisi yang paling kritis bagi studi *Owl Economy*. Kota-kota memegang peran krusial bagi pertumbuhan ekonomi, budaya, dan inovasi. Global Cities Index (GCI) dari Kearney menilai kota berdasarkan lima dimensi utama, yaitu aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik. Jakarta cukup unggul di skala Asia Tenggara, namun Jakarta mengalami penurunan peringkat GCI yang semula berada di posisi 54 pada tahun 2015 menjadi peringkat 74 pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh adanya kelemahan di dimensi sumber daya manusia, pertukaran informasi, dan pengalaman budaya. Jakarta cukup tertinggal dibandingkan kota lain di kawasan Asia Pasifik. Walaupun ekonomi kreatif di Jakarta menyumbang 10,5% terhadap PDRB, Jakarta masih memiliki potensi yang belum dioptimalkan. Oleh karena

itu, Buku 4: Pariwisata & Penjenamaan Kota membahas elemen destinasi budaya dan kreatif yang terkenal, yang berfungsi sebagai deklarasi krisis dan tuntutan reformasi kelembagaan untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat pariwisata yang terdepan, dan dapat mendukung *Owl Economy* secara optimal.

Jakarta berhasil mendatangkan sebanyak 1,9 juta wisatawan internasional pada tahun 2023. Namun angka ini masih tertinggal dibandingkan kota tetangga, Bangkok, yang berhasil menarik sebanyak 28 juta wisatawan internasional. Hal ini membuktikan bahwa sektor pariwisata di Jakarta belum dimanfaatkan secara optimal dan belum mencapai skala seperti kota global. Dalam hal pariwisata dan investasi pembangunan nasional, pemerintah memposisikan budaya sebagai aset strategis menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Prinsip

ini membuat rumusan pembangunan ekonomi dan sosial harus mengacu dan berakar pada elemen budaya. Hal ini mendorong ekonomi kreatif untuk berkembang. Dengan ekonomi kreatif di Jakarta yang telah berhasil menyumbang 10,5% terhadap PDRB kota yang bernilai mencapai Rp 362 triliun, nilai ekonomi kreatif Jakarta membentuk sebesar 22% dari nilai ekonomi kreatif nasional. Akan tetapi, masih banyak yang harus dimaksimalkan untuk kemajuan yang lebih baik, contohnya upah rata-rata yang rendah, sebesar Rp 2,2 juta per bulannya yang di bawah rata-rata industri nasional, kesenjangan pendanaan, dan keterbatasan pengakuan global.

Dalam sektor pariwisata, ekonomi kreatif, termasuk *Owl Economy*, penjenamaan (*branding*) merupakan aspek krusial untuk membuat identitas dan ciri khas Jakarta menjadi berbeda, menarik, dan melekat bagi wisatawan

internasional. Contohnya, kampanye “Enjoy Jakarta” yang telah dilakukan untuk meningkatkan citra di kancah global, akan tetapi hasil yang didapat masih belum optimal. Terdapat tantangan di bidang lain seperti infrastruktur yang belum memadai, akses transportasi yang sulit, dan kemacetan, yang masih membuat citra Jakarta menjadi negatif.

Untuk mencapai visi Jakarta sebagai kota global, Jakarta memiliki program utama yang terbagi ke dalam empat kelompok yang harus dilakukan dalam 20 tahun ke depan, yaitu pariwisata, ekonomi kreatif, situs budaya & artefak, serta penjenamaan kota (lokal & internasional).

a. Pariwisata

Dengan jumlah wisatawan internasional sebanyak 1,9 juta pada tahun 2023, Jakarta mewakili 16% dari total kedatangan wisatawan internasional di Indonesia (BPS, 2024). Meskipun demikian, lebih dari 50% wisatawan internasional datang hanya untuk keperluan bisnis. Fenomena ini menunjukkan adanya peluang yang terlewatkan dari pariwisata Jakarta, di mana seharusnya wisatawan datang untuk berlibur. *Global Cities Readiness Index for Tourism Growth* dari *World Travel & Tourism Council* dan JLL menyatakan bahwa Jakarta adalah “*Emerging Performer*”, yaitu kota yang memiliki momentum pariwisata yang terus berkembang namun di saat yang sama menghadapi tantangan akibat ekspansi perkotaan. Maka dari itu, Jakarta harus fokus pada pembaharuan infrastruktur kota, meningkatkan konektivitas transportasi, aksesibilitas, menyediakan akomodasi yang layak, dan mengatasi isu lingkungan dan kebersihan.

Dalam rangka meningkatkan pariwisata Jakarta, diperlukan konektivitas transportasi yang memadai, mulai dari jalur udara dan darat menuju dan keluar kota Jakarta. Bandara Soekarno-Hatta sekarang memiliki penerbangan langsung ke 90 bandara di seluruh dunia, yaitu 82 kota di 24 negara, dengan 44 rute internasional yang menghubungkan langsung dari dan ke Jakarta. Sebagian besar kedatangan berasal dari Kuala Lumpur dan Singapura. Dibandingkan dengan Singapura yang yang melayani

150 tujuan yaitu 46 negara, Jakarta masih cukup tertinggal. Jakarta harus meningkatkan jaringan konektivitas transportasi agar dapat mendukung pariwisata yang berkelanjutan, dengan cara melakukan diversifikasi moda transportasi, manufaktur yang lebih ramah lingkungan, merelokasi industri dengan emisi tinggi ke luar kota, mendukung transformasi digital, memodernisasi kawasan industri, serta melakukan investasi dalam sektor transportasi agar dapat menciptakan jaringan transportasi yang efisien, bersamaan dengan tenaga kerja yang terampil untuk menarik investasi tinggi dan memulai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dari segi ketersediaan dan kualitas akomodasi, BPS mencatat pada tahun 2024 terdapat total 870 akomodasi di Jakarta. Di antaranya adalah 448 hotel berbintang (51,5%) dan 422 akomodasi non-bintang (48,5%), seperti hostel, homestay, perkemahan, wisma, dan penginapan lain, dengan total kamar sejumlah 65.843 kamar. Hotel berbintang memiliki tingkat hunian sebesar 61,5% dan akomodasi hunian sebesar 35,4% (BPS, 2024), hal ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat hunian di Bangkok (72%) dan Singapura (80%). Jakarta harus meningkatkan daya saingnya sebagai destinasi wisata global, Jakarta harus melakukan perluasan akomodasi, mulai dari akomodasi bujet maupun hotel mewah, tetap menjaga standar kualitas,

dan memperkuat penawaran premium agar dapat memberikan kualitas tinggi dalam industri perhotelan yang akan menarik pertumbuhan di sektor pariwisata.

Kunjungan wisatawan internasional Jakarta sangat beragam, mulai dari berkunjung ke pusat perbelanjaan, wisata rekreasi, dan lainnya. Jakarta juga mulai dikenal dengan kehidupan malamnya, seperti restoran dan tempat hiburan, namun potensi ekonomi malam ini belum dimanfaatkan secara optimal. Jakarta dapat mencontoh Bangkok, yang memiliki inisiatif pemerintah untuk mendukung sektor ekonomi malam dengan menerapkan regulasi perpanjangan jam operasional, yang semula pukul 2 pagi menjadi pukul 4 pagi, melakukan pemasangan CCTV dan penempatan banyak CCTV dan polisi untuk menciptakan keamanan dan rasa aman wisatawan, serta menerapkan tarif pajak cukai yang lebih rendah untuk tempat hiburan, sebanyak 5% lebih rendah dari yang semula 10% sampai dengan tahun 2025. Jakarta juga dapat mencontoh London yang ekonomi malamnya terbukti berhasil, contohnya dengan inisiatif *Night Tube* pada akhir pekan selama 24 jam dan kawasan yang meriah, seperti Soho dan Shoreditch yang dipandu oleh *Night Czar*. Inisiatif ini memberikan perubahan suasana London menjadi kota yang dinamis dengan variasi pilihan hiburan, mulai dari klub, pub, teater, dan pasar malam. Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi

malam, Jakarta harus melakukan peningkatan atraksi wisata agar dapat memenuhi berbagai macam minat dari wisatawan, mulai dari landmark bersejarah, museum, pusat perbelanjaan, kuliner malam, restoran, arena rekreasi, sampai aktivitas keluarga. Di samping itu, Jakarta juga dapat menyelenggarakan acara budaya untuk menarik wisatawan sembari tetap mempertahankan warisannya, menjadikan Jakarta menjadi kota yang hidup namun tidak lupa akan sejarah.

Karena lebih dari 50% wisatawan internasional berkunjung ke Jakarta dengan tujuan bisnis, Jakarta juga harus mengambil potensi ini. Jakarta harus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis di Indonesia, dengan cara berinvestasi dalam fasilitas konferensi yang lebih canggih, meningkatkan jaringan transportasi, menyediakan layanan bagi wisatawan yang memiliki tujuan bisnis, dan membangun kemitraan dengan jaringan wisata bisnis di kancah internasional. Jakarta dapat mencontoh Berlin, yaitu kota konvensi tersohor yang mempunyai lebih dari 400 lokasi acara, dibandingkan dengan Jakarta yang saat ini memiliki 32 lokasi acara, yang beragam mulai dari pusat konvensi besar, situs bersejarah, hotel, dan MICE. Berlin memiliki ruang pameran sebesar 192.000 m², dibandingkan dengan Jakarta yang hanya memiliki ruang sebesar 51.500 m².

b. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif di Jakarta menyumbang kontribusi sebesar 10,5% terhadap PDRB kota dengan total nilai Rp 362 triliun pada tahun 2023. Dibandingkan dengan Rp 256 triliun pada tahun 2018, sektor yang berkembang pesat adalah makanan & minuman, TV & radio, dan penerbitan. Walaupun adanya kemajuan yang substansial, Jakarta tetap harus memaksimalkan potensi ekonomi kreatifnya, dengan cara:

- Melakukan peningkatan perlindungan tenaga kerja, memberikan upah yang adil, dan memberikan keterampilan khusus bagi tenaga kerja
- Melakukan pendanaan dan mendukung industri kreatif
- Melakukan penciptaan nilai dalam merampingkan proses acara publik
- Melakukan pengembangan pusat kuliner di Jakarta
- Memosisikan Jakarta sebagai pusat syuting dan penyiaran

Jakarta dapat mencontoh London dalam pengemembangan industri sektor kreatif. London memiliki upah rata-rata yang tinggi yaitu rata-rata EUR 786 per minggu untuk tenaga kerja di sektor kreatif, dibandingkan dengan sektor lain sebesar EUR 700 per minggu. Jakarta juga dapat melakukan adopsi pendekatan investasi terstruktur, seperti program dukungan keuangan dari pemerintah untuk mendukung industri kreatif. Dalam hal proses acara publik, Jakarta memiliki proses perizinan yang

rumit untuk menyelenggarakan acara publik. Padahal, penyelenggaraan acara dapat berkontribusi strategis dan signifikan ke dalam ekonomi kreatif. Jakarta dapat merampingkan proses perizinan acara dengan cara kebijakan yang lebih terarah, praktis, dan cepat. Dalam segi kuliner, Jakarta memiliki beragam kuliner tradisional yang unik, seperti Soto Betawi, Kerak Telur, dan Ketoprak. Jakarta dapat mencontoh kota besar seperti Bangkok, yang membayar *Michelin Travel Partner France Ltd* sebesar USD 820.000 pertahunnya untuk mempromosikan *Michelin Guide Thailand*, melalui Tourism Authority of Thailand. Selain itu, industri film dan televisi di Jakarta kerap menjadi kontributor penting dalam ekonomi kreatif. Jakarta dapat mencontoh Seoul, yang memiliki *Korea Creative Content Agency* (Kocca) yang berhasil melakukan pendanaan drama OTT sebesar KRW 3 miliar, atau setara dengan USD 200.000 per proyek, yang membuat konten lokal agar meningkatkan daya tarik global dan citra Seoul di kancah internasional.

c. Situs Budaya dan Artefak

Budaya di Jakarta sangatlah kaya, dibentuk dari pengaruh Cina, Arab, Eropa, dan berbagai bangsa serta etnis di Jakarta. Jakarta sendiri memiliki 60 museum, 880 objek pemajuan kebudayaan, dan 641 situs cagar budaya. Jakarta dan budayanya yang sangat kaya dapat menjadi potensi besar bagi pengembangan pariwisata dengan cara mengembangkannya sebagai berikut:

- Membangun sumber pendanaan yang beragam dengan pelaporan yang transparan
- Melakukan revitalisasi situs warisan budaya
- Melakukan pemanfaatan teknologi digital modern

Di era teknologi digital ini, Jakarta dapat mencontoh kota-kota global yang telah berhasil menerapkan teknologi dalam situs budayanya. Contohnya adalah Roma dan Florence di Italia, yang memiliki teknologi *Augmented Reality* (AR) yang memberikan wisatawan pengalaman untuk melihat rekonstruksi sejarah dan visualisasi 3D situs sejarah, serta tur virtual yang dapat diakses dari gawai.



d. Penjenamaan Kota (*Branding*)

Penjenamaan kota bukanlah sekadar nama, namun merupakan alat pemasaran bagi Jakarta agar dapat dikenal luas, baik secara regional dan global, untuk mencapai tujuan ekonomi, politik, dan sosial. Meskipun Jakarta adalah kota berwujud, namun melalui penjenamaan, wisatawan dapat mendapatkan identitas Jakarta melalui pengalaman yang dirasakan. Penjenamaan “Enjoy Jakarta” telah menjadi upaya untuk menciptakan identitas dan persepsi kota dalam skala global, dengan memberikan posisi sebagai kota metropolitan namun tetap kaya akan budaya dan peluang ekonomi, contohnya dengan acara besar seperti Asian Games (2018), Konferensi G20 (2022), dan Java Jazz Festival yang dilakukan secara tahunan telah menjadi katalis untuk meningkatkan profil global Jakarta. Namun, Jakarta kerap dibandingkan dengan kota lain yang lebih maju di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Kuala Lumpur. Adapun beberapa aspek bagi Jakarta agar dapat memperkuat penjenamaannya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan anggaran penjenamaan
Kota London memiliki kampanye “Let’s Do London” pada tahun 2022 untuk meningkatkan pariwisata pasca pandemi. Kampanye ini memiliki anggaran sebesar GBP 7 juta (USD 9 juta) dan berhasil meningkatkan pengeluaran pengunjung sebesar GBP 81 juta (USD 103 juta), dengan tambahan 330.000 pengunjung pada tahun 2022. Jakarta dapat mencontoh London dalam bagaimana investasi anggaran penjenamaan dapat menghasilkan kualitas pariwisata dan keuntungan yang signifikan.
- Membangun citra yang strategis untuk meningkatkan kinerja penjenamaan kota Jakarta
Penjenamaan kota terdiri atas tiga segmen utama yaitu: (i) pembangunan identitas, (ii) arsitektur dan desain khas, dan (iii) penandaan acara dan aktivitas. Adapun contoh pembangunan identitas yang mencakup penciptaan kepribadian unik pada kota, seperti kota fashion di Paris, arsitektur dan desain khas mengacu pada bangunan ikonik, seperti distrik Upper East Side di New York, dan penandaan acara dan aktivitas menandakan acara tertentu dengan kota, seperti Notting Hill Carnival di London. Ketiga segmen ini dapat digabungkan untuk membentuk identitas kota yang lebih menarik dengan penuh dengan kepribadian yang unik.

- Membuat merchandise dan cendera mata berbasis Jakarta

Merchandise dan cendera mata dapat berfungsi sebagai identitas dan sebagai bentuk penerjemahan citra kota kepada sebuah barang. Jakarta dapat membuat cendera mata yang menarik bagi masyarakat lokal dan global, seperti produk camilan khas yang unik, dan berkolaborasi dengan seniman lokal untuk membuat cendera mata dengan desain yang unik, mudah diingat, dan penuh daya tarik, dengan citra yang konsisten.

Dengan tujuan akhir Jakarta sebagai 20 besar kota global dunia, Buku 4: Pariwisata dan Penjenamaan Kota (*Branding*) menuntut adanya reformasi kebijakan, untuk menghidupkan dan mendukung kegiatan 24 jam. Aktivitas *Owl Economy* berlangsung hingga larut malam dan diperlukan kebijakan untuk mendukungnya.



iv.v. Analisis Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia Buku 5: Lingkungan & Keberlanjutan

Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki tantangan lingkungan dan keberlanjutan. Sebagai kota yang modern dan bertumbuh pesat, Jakarta berada pada titik kritis karena adanya keterbatasan pada ruang hijau, pengelolaan sampah dan air yang belum memadai, rentan terhadap banjir, dan rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Hanya sebanyak 5,35% dari total wilayah kota Jakarta yang dialokasikan pada ruang terbuka hijau. Angka ini masih jauh di bawah target tahun 2030 yaitu sebesar 30%. Selain itu, Jakarta memiliki kualitas udara yang buruk, suhu tinggi, dan kurangnya ruang rekreasi. Lingkungan dan keberlanjutan harus lebih diperhatikan agar Jakarta dapat menjadi kota global terkemuka, dengan fokus pada strategi ramah lingkungan dan tahan iklim agar menjadikan Jakarta sebagai model pembangunan kota yang berkelanjutan. Agar dapat mencapai visi tersebut, Jakarta harus mengedepankan program utama yaitu:

a. Ruang terbuka hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta hanya sebesar 5,36% dari total luas wilayah, yaitu sekitar 3.363 hektar. Angka ini masih jauh di bawah target tahun 2030 yaitu sebesar 30%, dengan pertumbuhan RTH yang lambat, yaitu hanya 6,7 hektar ditambahkan pada tahun 2023 dan rencana penambahan seluas 5,1 hektar pada tahun 2024. Angka ini masih jauh dibandingkan dengan Singapura, yang memiliki 40% ruang terbuka hijau, dan Kuala Lumpur yang memiliki 20% ruang terbuka hijau. Maka dari itu, diperlukan upaya yang disiplin baik dari sektor publik dan swasta untuk mengembalikan ruang terbuka hijau di Jakarta dengan menggabungkan penegakan regulasi tegas, insentif sektor publik yang efektif, dan kolaborasi aktif antara sektor swasta dan LSM.

b. Operasi yang berkelanjutan

Hanya sebanyak 49% dari masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya keberlanjutan. Angka ini cukup tertinggal dibandingkan dengan Thailand yaitu sebesar 64% dan Tiongkok yang telah mencapai 75%. Untuk memulai operasi yang berkelanjutan, Jakarta harus menerapkan peraturan dan standar keberlanjutan yang lebih tegas dan kuat di seluruh entitas sektor, termasuk sektor swasta mencakup penetapan harga karbon untuk perusahaan energi, pelaporan ESG yang transparan, dan menegakkan standar bangunan hijau untuk pembangunan baru.

c. Pengelolaan air

Hanya sebanyak 66,7% penduduk Jakarta yang memiliki akses terhadap air leding. Jakarta harus memperluas akses air bersih, mengatasi defisit air, dan memastikan akses yang adil, melalui program inovatif seperti pemanenan air hujan, daur ulang limbah, dan sistem pengolahan air yang optimal. Selain itu, untuk melindungi sumber daya air, Jakarta dan wilayah sekitar Jabodetabek harus memperkuat pengendalian pencemaran air, dengan cara mengembangkan infrastruktur pembuangan limbah, menegakkan peraturan pengelolaan limbah, dan melakukan restorasi sungai.

d. Pengelolaan limbah

Setiap harinya, Jakarta menghasilkan 8.600 ton sampah. Hal ini merupakan tantangan besar, dengan aktivitas rumah tangga yang merupakan penyumbang utama sampah sebesar 61%, diikuti oleh kawasan perkantoran dan komersial (28%), dan fasilitas umum (11%). Sebagai langkah awal, Jakarta harus memulai upaya pemilihan pemilahan dan pengurangan sampah dan dapat belajar dari kota lain di dunia yang telah berhasil mendorong keberlanjutan. Selain itu, pemerintah Jakarta harus berinvestasi pada infrastruktur daur ulang dan memajukan praktik ekonomi sirkular.

e. Ketahanan bencana

Sekitar 40% dari wilayah Jakarta berada pada ketinggian 1-1,5 meter di bawah permukaan laut, serta iklim yang dipengaruhi oleh angin laut dan angin darat membuat Jakarta diklasifikasikan sebagai kota dengan risiko bencana sedang menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia. Diperlukan pendekatan terpadu untuk pengelolaan banjir, yang memadukan infrastruktur yang kuat dan sistem penampungan air. Selain itu, Jakarta dapat mementingkan integrasi teknologi yang akan membantu langkah preventif dan penanggulangan bencana, seperti sistem pemantauan canggih, perangkat IoT (Internet of Things), dan analisis data real-time.

iv.vi. Analisis Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia Buku 6: Infrastruktur & Mobilitas

Dalam lima tahun terakhir ini, Jakarta memiliki kemajuan di bidang infrastruktur, mobilitas, dan transformasi. Kemajuan ini dibuktikan dari pembangunan MRT, LRT, dan perluasan rute bus Transjakarta. Modernisasi pelabuhan juga telah dilakukan. Proyek LRT juga telah berhasil menghubungkan Jakarta dari bagian timur hingga utara kota Jakarta. Selain itu, Commuter Line juga diperluas cakupannya dan berhasil menghubungkan Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya.



Dari segi infrastruktur digital, Jakarta telah memiliki program Jakarta Smart City, dengan penggunaan aplikasi Jakarta Kini atau JAKI yang dapat diakses oleh publik untuk memberikan layanan publik seperti informasi lalu lintas real-time, rute transportasi umum, dan layanan administratif daring. Hal ini juga didukung oleh ketersediaan Wi-Fi publik di seluruh kota, hasil kerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan konektivitas digital.

Walaupun begitu, Jakarta tetap harus memprioritaskan pertumbuhan infrastruktur dan mobilitasnya dan mengembangkannya lebih lanjut. Kemacetan masih menjadi masalah utama di Jakarta yang mencapai kerugian sebesar Rp 100 triliun per tahun, dan masih sebanyak 54% jaringan jalan yang dijangkau oleh transportasi umum. Sehingga infrastruktur dan mobilitas transportasi harus diprioritaskan, termasuk koneksi antar moda. Jakarta harus mendahulukan program dalam bidang berikut:

a. Transportasi dan mobilitas

Jakarta adalah pusat ekonomi di wilayah Jabodetabek dengan total populasi sekitar 30 juta jiwa. Adapun 11 juta jiwa adalah bagian dari penduduk Jakarta, sementara aktivitas ekonomi di Jakarta menarik 1,5 komuter setiap hari yang berasal dari Depok (371.000), Bekasi (318.000), dan Tangerang (192.000). Arus yang besar ini menuntut adanya peningkatan integrasi penuh moda transportasi publik, pengembangan Transit Oriented Development (TOD), dan menerapkan sistem manajemen lalu lintas yang layak, memisahkan jalur untuk orang dan mobilitas barang. Selain itu, Jakarta harus memprioritaskan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda.

b. Infrastruktur digital

Saat ini, Jakarta berada pada peringkat 115 di dunia pada kecepatan internet seluler, dengan kecepatan rata-rata 35,3 Mbps, dan peringkat 139 pada kecepatan broadband dengan kecepatan rata-rata 43,2 Mbps. Jakarta harus memperkuat infrastruktur digital, seperti memperluas cakupan 5G yang pada tahun 2024 baru mencapai 2024, dan serat optiknya melalui pembagian infrastruktur, insentif, atau tunjangan fiskal. Namun hal ini harus dimbangi oleh kematangan keamanan siber untuk mencapai ketahanan yang lebih tinggi terhadap ancaman siber.

c. Infrastruktur & aset fisik

Aset pemerintah daerah (BMD/Barang Milik Daerah) Jakarta cukup besar, yaitu tanah dan bangunan senilai Rp 513 triliun. Aset ini dapat dimanfaatkan termasuk untuk komersialisasi. Untuk meningkatkan nilai asetnya, Jakarta dapat melakukan sertifikasi, mengidentifikasi aset, dan mengkomersialisasikan aset, termasuk melakukan kolaborasi dengan mitra baik publik dan swasta untuk membiayai dan menggunakan kembali aset tersebut. Hal ini akan meningkatkan peningkatan pendapatan daerah.

*iv.vii. Analisis Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia
Buku 7: Litbang & Inovasi*

Lanskap ekosistem penelitian dan pengembangan (litbang) di Jakarta mengalami titik kritis, dengan peluang transformasi tetapi tetap memiliki kesenjangan dibandingkan dibandingkan dengan kota global terkemuka lainnya. Pengeluaran litbang pada tahun 2023 di Jakarta mencapai Rp 826 miliar, yang tidak lebih dari 0,1% dari PDRB kota. Berbeda jauh dengan kota global seperti London yang mencapai GBP 13,7 miliar (USD 17,4 miliar) pada tahun 2022, yang sebanding dengan 2,4% dari PDRB-nya. Jakarta hanya memiliki 3.375 peneliti per satu juta penduduk pada tahun 2023, dan hal ini juga menunjukkan kurangnya diversifikasi industri dan konsentrasi penelitian di berbagai sektor. Untuk meningkatkan pengeluaran litbangnya, Jakarta dapat meningkatkan ukuran dan efektivitas pendanaan kelembagaan, dengan cara melakukan reformasi pendanaan litbang dengan mengutamakan pendanaan kompetitif multi-tahun, mengurangi beban administratif, dan memberikan insentif untuk kemitraan publik-swasta. Selain itu, Jakarta dapat meningkatkan insentif penelitian dengan menambah manfaat finansial dan non-finansial, dan juga mendukung keterlibatan sektor swasta untuk mendukung inovasi.

Jumlah tenaga kerja di bidang litbang di Indonesia adalah sebanyak 440.000 tenaga kerja, dengan penyaluran terbesar berasal dari universitas (95%), lembaga pemerintah pusat seperti BRIN (3%), dan sektor swasta (2%). Litbang terkonsentrasi pada sektor industri makanan (20%), farmasi (17%), dan bahan kimia (12%). Jakarta perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan membuat program insentif terukur, seperti beasiswa dan magang penelitian untuk mempersiapkan talenta litbang yang siap di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga dapat membangun dan memperkuat ekosistem lembaga pemikirnya dengan menanggulangi masalah keberlanjutan pendanaan, mendorong kolaborasi internasional, dan meningkatkan kualitas penelitian. Ditambah lagi dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan akademisi akan menarik talenta global terbaik dan meningkatkan hasil publikasi internasional yang mendukung litbang.

Dalam bidang litbang, kolaborasi merupakan hal penting karena adanya korelasi erat antara berbagai sektor, industri, dan peranan seperti akademisi, pemerintah, peneliti, dan pemangku kepentingan. Kemitraan merupakan salah satu upaya agar dapat memajukan litbang di Jakarta dan membangun sinergi yang baik antara lembaga publik, sektor swasta, dan universitas. Jakarta dapat belajar dari Tokyo dan Singapura, yang kerap aktif melibatkan sektor swasta dalam penelitian dan pengembangan kolaboratif. Sebagai tambahan, ekosistem Silicon Valley juga dapat menjadi contoh bagi Jakarta, di mana di Silicon Valley terdapat sinergi kolaboratif antara universitas tersohor, seperti Stanford dan UC Berkeley, perusahaan teknologi, dan pemodal ventura. Adanya keterlibatan perusahaan besar seperti Google, Apple, dan Meta juga menciptakan lingkungan yang dinamis.

Dengan membangun kemitraan internasional, Jakarta dapat memperkuat hasil penelitian, pengembangan, dan manfaat. Contohnya adalah adanya peningkatan produktivitas penelitian, publikasi berkualitas, dan peningkatan peringkat akademis global. Jakarta dapat belajar dari kota-kota seperti London, Berlin, dan Melbourne yang memiliki kemitraan lintas batas dan pendanaan bersama. Contohnya, Berlin mempunyai Einstein Foundation yang memiliki hibah lebih dari EUR 20 juta per tahunnya untuk mendukung penelitian kolaborasi internasional, dan Melbourne memiliki pusat inovasi yang didukung oleh lembaga seperti University of Melbourne yang memiliki skema pendanaan bersama untuk menggerakkan kemitraan dan kolaborasi antara akademisi dan industri. Pusat penelitian interdisipliner dan kolaborasi lintas sektor juga berguna untuk memajukan Jakarta dalam hal litbang dan inovasi.

iv.viii. Analisis Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia Buku 8: Tata Kelola, Kelembagaan, & Pembiayaan

Buku 8: Tata Kelola, Kelembagaan, & Pembiayaan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan Jakarta sebagai 20 kota global dunia di masa depan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang menitikberatkan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global, Jakarta berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta). Ditambah dengan adanya penurunan peringkat Jakarta dalam Global Cities Index (GCI) Kearney, yang menurun dari peringkat 54 pada tahun 2015 menjadi peringkat 74 pada tahun 2024, semakin menambah urgensi mendesak untuk meningkatkan daya saing dan citra Jakarta di kancah global. Maka dari itu, diperlukan tata kelola yang gesit dan adaptif, kelembagaan yang kuat, serta pembiayaan yang efisien sebagai alat pertumbuhan transformasi untuk mewujudkan visi Jakarta menjadi 20 besar kota global. Dalam hal tata kelola, kelembagaan, dan pembiayaan, Jakarta dapat menerapkan program utama sebagai berikut:

a. Organisasi & tata kelola

Tata kelola pemerintahan Jakarta terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pengembangan kebijakan dan perencanaan, serta Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk implementasi layanan di lapangan. Agar dapat memperkuat organisasi dan tata kelolanya, Jakarta dapat membentuk tim strategi dan unit khusus dengan profesional yang relevan. Contohnya membentuk divisi keberlanjutan, divisi perubahan iklim untuk mendukung Dinas Lingkungan Hidup, serta unit ekonomi malam hari untuk mengembangkan segala sesuatu tentang ekonomi malam hari agar dapat lebih maju dengan cepat dan terstruktur. Selain itu, Jakarta dapat mempererat kolaborasi dan koordinasi regional dengan melalui badan tata kelola terpusat, agar dapat menjembatani berbagai entitas pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Hal ini memastikan adanya harmonisasi kebijakan dan distribusi sumber daya bersama. Selanjutnya, Jakarta dapat mencontoh Singapura, London, dan Tokyo yang telah memiliki satu operator perkotaan terpadu, contohnya Singapura yang memiliki Operator Transportasi Darat yang mengatur perencanaan, pengembangan, pengelolaan sistem transportasi darat, transportasi umum, infrastruktur bersepeda, jalan raya, dan manajemen lalu lintas. Dengan memiliki operator perkotaan terpadu, manajemen perkotaan Jakarta akan lebih terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi.

b. Kelincahan & pelacakan kelembagaan

Kelincahan dan pelacakan kelembagaan adalah kemampuan sebuah kota untuk beradaptasi dan merespon urbanisasi sebagai kota metropolitan. Inisiatif yang telah dilakukan contohnya adalah Jakarta Smart City, yang meningkatkan responsivitas kelembagaan, yang berupaya untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas, pengelolaan limbah, dan keselamatan publik. Upaya ini merupakan upaya digitalisasi layanan pemerintah, sebagai contohnya adalah aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang mengintegrasikan berbagai layanan publik yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Jakarta. Jakarta dapat belajar dari Singapura, yang memiliki aplikasi OneService, sebagai contoh manajemen pengaduan efisien bertenaga Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence / AI). Di samping memanfaatkan teknologi AI, sistem Customer Service Management atau CRM juga dapat diintegrasikan untuk mengatasi layanan masalah layanan publik. Selain dengan program digital, sistem pelacakan dengan visualisasi data yang dapat diakses oleh publik juga akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

c. Pengembangan BUMD

Pemerintah Jakarta memiliki dan mengelola sebanyak 22 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang termasuk ke dalam 9 klaster industri, yakni transportasi, properti, keuangan, infrastruktur, kawasan industri, makanan, utilitas, dan jasa industri. BUMD di Jakarta memiliki total aset sebesar Rp202 triliun dengan lebih dari 27.000 tenaga kerja, menjadikan BUMD di Jakarta sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mendukung pengembangan BUMD, Jakarta dapat melakukan efisiensi operasional dengan cara optimalisasi biaya, ekspansi strategis, meningkatkan kinerja keuangan, serta meningkatkan kontribusi terhadap anggaran pemerintah. Transparansi BUMD juga tidak kalah penting untuk membangun kepercayaan publik dan investor. Partisipasi BUMD juga dapat diperluas, terutama di pasar modal dengan IPO dan penerbitan obligasi, sehingga dapat mengawali pendanaan untuk proyek berskala besar yang pada akhirnya dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan profesionalisme manajemen BUMD.

d. Pendanaan & pembiayaan

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Jakarta termasuk besar dalam konteks Indonesia, yaitu mencapai Rp80 triliun per tahunnya. Anggaran ini didistribusikan untuk berbagai bidang kebutuhan, seperti transportasi umum, pendidikan, kesehatan, program sosial, dan pembangunan infrastruktur. Namun, selama 20 tahun ke depan, diproyeksikan bahwa Jakarta membutuhkan tambahan anggaran sebanyak Rp1.950 triliun, yang berarti anggaran tradisional tidak akan cukup untuk mendukung skala investasi proyek-proyek besar. Maka dari itu selain dari APBD yang ada, Jakarta dapat mencari sumber pendanaan dan pembiayaan lain, contohnya dari obligasi, keterlibatan sektor swasta, kampanye berbasis masyarakat, pengambilan nilai lahan, dan skema pembiayaan lainnya. Di samping itu, Jakarta dapat melakukan optimasi pemanfaatan aset publik dengan cara inventarisasi strategis, skema penyewaan yang inovatif, serta

kemitraan. Hal-hal tersebut membuka potensi pendapatan lain yang akan mendorong pembangunan perkotaan yang maju dan berkelanjutan. Ditambah lagi, Jakarta dapat memanfaatkan dana abadi untuk berbagai macam kebutuhan publik. Jakarta dapat mencontoh dari kota London, yang memiliki The City's Clash, dana abadi yang dikelola oleh City of London yang sudah diwariskan lebih dari 800 tahun. Dana The City's Clash diinvestasikan di sektor properti, saham, dan lainnya untuk mendukung operasi dan inisiatif kota London, dengan pendapatan tahunan sebesar GBP 186 juta.



e. Kebijakan & peraturan

Dari sisi kebijakan dan peraturan, perlu dilakukan pembaruan peraturan agar regulasi tetap relevan dengan kondisi yang terjadi sekarang dan tidak berbenturan dengan visi misi Jakarta. Masih banyak peraturan yang tidak lengkap, atau bahkan belum ada. Contohnya, tentang infrastruktur digital yang sebenarnya akan mendukung Jakarta untuk mendorong tata kelola AI yang menggunakan layanan berbasis data serta etika AI, yang pada saat ini belum ada regulasi yang memformalkan peraturan penerapan AI di dalam institusi pemerintah. Adapun yang sudah ada peraturannya namun perlu pembaruan adalah di sektor pariwisata, yaitu tidak ada peraturan pendukung yang secara khusus mendukung ekonomi malam hari di Jakarta, seperti klub malam, dan penunjukan walikota malam hari. Peraturan yang ada saat ini yaitu Pergub No. 179 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata memerlukan koordinasi lebih lanjut antara Dinas Pariwisata agar dapat mengembangkan sektor ekonomi malam, serta otoritas penegak hukum untuk memastikan keamanan karena jam operasional yang hingga larut.

f. Asosiasi global & regional

Jakarta merupakan anggota organisasi aktif pada organisasi tersohor seperti United Cities and Local Governments (UCLG), C40 Cities Climate Leadership Group, dan Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, serta forum internasional yakni ASEAN Smart Cities Network (ACN). Jakarta dapat memanfaatkan kemitraan dalam asosiasi global dan regional untuk mendukung kolaborasi lintas atas batas. Jakarta juga dapat menjadi tuan rumah lebih banyak konferensi, forum global, dan acara-acara lain, agar dapat meningkatkan visibilitas Jakarta di kancah internasional. Hubungan diplomatik Jakarta juga dapat diperkuat dengan meningkatkan jumlah kedutaan besar, agar dapat meningkatkan kolaborasi global serta menarik investasi internasional.

MASUKAN FGD

Regulasi Mikro dan Implementasi

Hasil FGD menunjukkan bahwa pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan pengelola kawasan menuntut regulasi yang lebih praktis dan langsung dirasakan. Proses izin beroperasi dan izin keramaian saat ini dinilai berbelit, memakan waktu panjang, dan sering menghambat momentum kreativitas. Model one-stop permit diusulkan untuk mempercepat izin acara, penggunaan ruang publik, serta aktivitas kuliner malam.



Aspek Kolaborasi dan Insentif

Para peserta FGD menekankan bahwa pembuatan regulasi harus melibatkan pihak swasta, pengusaha, pengelola kawasan, komunitas setempat, pemilik properti, dan warga. Mekanisme kolaboratif ini akan menghasilkan regulasi yang realistis dan kontekstual.

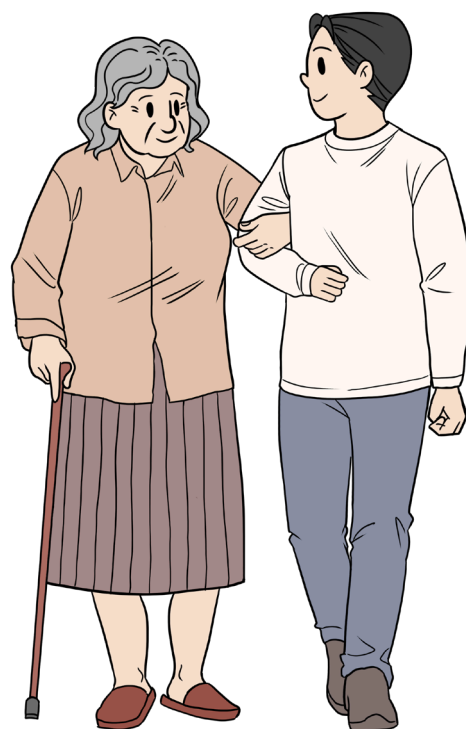
Usulan lain mencakup percepatan proses clear due diligence, perpanjangan jam operasional malam, serta jaminan keamanan dari ormas yang diatur secara formal. Perlindungan hak penyewa dan konsumen juga dianggap perlu, termasuk penataan signage usaha dan penertiban PKL agar lebih tertib dan aman.

FGD juga menyoroti pentingnya pembatasan kendaraan pribadi, penataan parkir, standar penerangan publik, serta peraturan kebersihan dan pengelolaan limbah. Regulasi harus mendorong inovasi seperti cross-function area yang berganti fungsi antara siang dan malam, pengaktifan dead space, dan percepatan pembangunan amenities tanpa disrupti besar bagi warga. Insentif usaha dan pajak, funding untuk komunitas, promosi usaha, serta kompensasi untuk properti terdampak penutupan jalan menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi malam. Bahkan detail kecil seperti standar street food dan pembebasan bersyarat perubahan eksterior bangunan dinilai perlu diatur agar sesuai dengan semangat kota global yang adaptif.

Interpretasi dan Arah Reformasi Regulasi

Analisis regulasi memperlihatkan satu hal penting: Jakarta sudah memiliki kerangka hukum makro yang solid, mulai dari RTRW hingga Kepgub Global City, namun mekanisme mikro di lapangan masih tertinggal. Tanpa penyederhanaan izin, jaminan keamanan, dan insentif konkret, cita-cita Owl Economy hanya akan berhenti pada dokumen kebijakan.

Regulasi ke depan perlu disusun dengan dua arah simultan. Pertama, memperkuat kepastian hukum melalui instrumen makro yang konsisten. Kedua, mengembangkan instrumen mikro yang fleksibel, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika kota malam. Hanya dengan keseimbangan itu Jakarta dapat tumbuh sebagai kota 24 jam yang aman, inklusif, dan kompetitif di tingkat global.



PANDUAN PERHITUNGAN DAMPAK EKONOMI KREATIF MALAM

Simulasi Perputaran Ekonomi Malam (Owl Economy Index) Sebagai kota dengan ritme ganda siang yang padat dan malam yang produktif Jakarta memiliki potensi ekonomi malam yang belum sepenuhnya terukur. Aktivitas di lima polar utama (Blok M, Sabang–HI–Dukuh Atas, Glodok–Kota Tua, Kemang, dan Pancoran–PIK) membentuk jaringan konsumsi yang bergerak setelah jam kerja, menghidupkan rantai ekonomi mikro di sektor makanan, hiburan, retail, transportasi, dan jasa kreatif. Untuk memperkirakan skala dampaknya terhadap perekonomian kota, digunakan pendekatan sederhana berbasis jumlah pengunjung, pengeluaran rata-rata, dan frekuensi kegiatan.

$$E = (V \times S \times F) + H + A$$

Keterangan:

E = total perputaran ekonomi malam (Rp/tahun)

V = rata-rata pengunjung per bulan

S = rata-rata pengeluaran per orang

F = jumlah event aktif per tahun

H = nilai transaksi sektor hospitality

A = pengeluaran tambahan (retail, transport, hiburan)

Di mana seluruh variabel (jumlah pengunjung, pengeluaran rata-rata, jumlah event aktif, transaksi sektor hospitality, dan pengeluaran tambahan) berbasis asumsi konservatif yang diadaptasi dari data sekunder. Hasil nilai E yang disajikan merupakan estimasi atau simulasi dan bukan berasal dari hasil pengukuran data primer atau survei di lapangan langsung. Karena hal tersebut, angka pada kajian ini digunakan untuk memberikan gambaran dari potensi ekonomi malam secara konseptual dan bukan sebagai data empiris aktual. Pengembangan dan model matematika terhadap pengukuran ini dikerjakan di luar kajian ini.

Pendekatan Perhitungan untuk memahami dampak ekonomi dari kegiatan ekonomi malam di Jakarta, kajian ini menggunakan model estimasi berbasis direct expenditure dan economic multiplier. Pendekatan ini mengukur sejauh mana aktivitas ekonomi yang dipicu oleh kunjungan wisatawan atau pengunjung malam hari menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian lokal, baik secara langsung, tidak langsung, maupun melalui efek turunan (induced effect). Dalam simulasi ini, satuan analisis digunakan per polar prioritas, dengan satuan waktu tahunan. Setiap polar diasumsikan menjadi tuan rumah bagi 12 event utama per tahun baik yang berskala komunitas, festival musik, pasar malam kreatif, maupun aktivasi publik lain yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif.

Konteks Kebijakan dan Narasi Kota

Model sederhana ini bukan sekadar hitung-hitungan ekonomi, tetapi juga narrative tools kebijakan. Ia menggambarkan bahwa ruang malam Jakarta bukan beban sosial, melainkan **mesin ekonomi urban baru** yang menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi domestik, dan memperkuat pajak lokal.

Contoh Aplikasi Taman Martha Tiahahu sebagai Pilot Owl Economy

Sebagai contoh penerapan model makro, Taman Martha Tiahahu dipilih sebagai lokasi simulasi karena posisinya yang strategis di kawasan Blok M, sebagai simpul transportasi antara MRT, TransJakarta, dan kawasan pejalan kaki Melawai. Kawasan ini telah direvitalisasi menjadi ruang publik aktif yang memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi malam berbasis komunitas, retail, dan kegiatan kreatif.

Untuk menghitung potensi perputaran ekonomi malam di lokasi ini digunakan pendekatan makro sederhana:

$$E = (V \times S \times F) + (H) + (A)$$

Keterangan variabel:

E = total perputaran ekonomi malam per tahun (Rp)

V = rata-rata jumlah pengunjung per event

S = rata-rata pengeluaran per orang per event
(makanan, minuman, retail, transportasi, hiburan)

F = jumlah event aktif per tahun

H = nilai transaksi sektor hospitality (akomodasi, penginapan, restoran, kafe)

A = pengeluaran tambahan yang terkait dengan aktivitas malam hari
(transportasi daring, parkir, jasa hiburan, retail penunjang)

Seluruh parameter yang digunakan dalam perhitungan ini seperti jumlah pengunjung, rata-rata pengeluaran, jumlah event aktif, nilai transaksi sektor hospitality, dan pengeluaran tambahan disusun berdasarkan asumsi konservatif yang disesuaikan dari data sekunder dan referensi terkait. Nilai E yang dihasilkan merupakan proyeksi atau simulasi, bukan perolehan dari data primer. Oleh karena itu hasil pada kajian ini dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi potensi ekonomi malam secara konseptual. Pengembangan lebih lanjut dan model statistik tidak termasuk dalam cakupan kajian ini.

Asumsi Simulasi

Asumsi yang digunakan bersifat konservatif dan disesuaikan dengan kondisi Blok M serta hasil studi ekonomi malam di kota-kota Asia lainnya.

Rata-rata pengunjung event besar (V)	= 5.000 orang.
Rata-rata pengunjung event reguler akhir pekan	= 3.000 orang.
Pengeluaran rata-rata per orang (S)	= Rp100.000.
Jumlah event aktif (F)	= 12 event besar dan 104 event akhir pekan, total 116 kegiatan per tahun.
Proporsi pengunjung yang menginap	= 5 persen, dengan pengeluaran rata-rata (A) Rp600.000 per tamu.

Dengan memasukkan variabel tersebut, maka total perputaran ekonomi malam tahunan di Taman Martha Tiahahu dapat dihitung sebagai berikut.

Pertama, menghitung belanja pengunjung ($V \times S \times F$) yang mencerminkan total konsumsi langsung di lokasi. Nilai transaksi hospitality ($H + A$) yang merepresentasikan pengeluaran tamu menginap dan pengeluaran lainnya.

Hasil penjumlahan keduanya memberikan estimasi total E, yaitu nilai perputaran ekonomi malam tahunan.



Hasil Estimasi Makro

Berdasarkan perhitungan tersebut, total E atau perputaran ekonomi malam di Taman Martha Tiahahu mencapai sekitar **Rp45,6 miliar per tahun** dari belanja langsung pengunjung.

Ketika memperhitungkan efek pengganda ekonomi atau multiplier sebesar 1,8, total dampak ekonomi meningkat menjadi **Rp82,0 miliar per tahun**. Angka multiplier ini mengacu pada hasil studi *Asian Development Bank (2023)* dalam *Working Paper No. 646 – Tourism, Regional Economic Growth, and Spillovers in Asia and the Pacific*, yang menunjukkan bahwa rata-rata tourism income multiplier di kawasan Asia dapat mencapai **1,8–1,96**, tergantung pada kedalaman rantai pasok dan intensitas belanja lokal.

Dengan rasio pendapatan per tenaga kerja sebesar **Rp60 juta per tahun**, aktivitas ini berpotensi menopang **760 pekerjaan penuh waktu (*Full Time Equivalent*)** di sektor retail, jasa makanan, transportasi, dan kegiatan kreatif.

Komponen	Nilai & Satuan	Keterangan
Rata-rata pengunjung (V)	3.000–5.000 orang	Bergantung pada skala event
Pengeluaran per orang (S)	Rp100.000	Termasuk makanan, retail, hiburan
Event per tahun (F)	116	12 event besar dan 104 event reguler
Proporsi menginap	5% pengunjung	Rata-rata belanja Rp600.000
Total belanja langsung (V×S×F)	Rp45.570.000.000	Direct expenditure tahunan
Total dampak ekonomi (multiplier 1,8)	Rp82.026.000.000	Termasuk efek tidak langsung dan induced
Estimasi PAD (2%)	Rp1.640.520.000	Potensi penerimaan daerah
Potensi pekerjaan (FTE)	±760 orang	Setara tenaga kerja penuh waktu

Simulasi makro ini memperlihatkan bahwa ruang publik seperti Taman Martha Tiahahu bukan hanya area rekreasi, tetapi juga simpul ekonomi malam yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

Dengan sirkulasi uang puluhan miliar rupiah per tahun, aktivitas malam berpotensi menghidupkan ekosistem usaha kecil, memperpanjang jam produktif kota, serta menambah basis pajak daerah tanpa memerlukan investasi infrastruktur besar. Model perhitungan yang sama dapat diterapkan pada empat polar utama ekonomi malam Jakarta, yaitu Blok M, Sabang HI Dukuh Atas, Glodok Kota Tua, dan Kemang.

Setiap kawasan dapat disimulasikan dengan variabel yang disesuaikan dengan karakter pengujung, jenis kegiatan, dan frekuensi event.

Hasil dari masing-masing polar kemudian dapat digabungkan untuk membentuk **Owl Economy Index**, yaitu indikator gabungan yang menggambarkan potensi dan kinerja ekonomi malam Jakarta secara keseluruhan.



Best Practice Perputaran Ekonomi Kreatif Malam

Mengamati dinamika kota-kota dunia menunjukkan bahwa **ekonomi kreatif malam** bukan sekadar urusan hiburan, tetapi strategi tata kota untuk memperpanjang jam produktif, memperkuat ekosistem kreatif, dan menghidupkan ruang publik di luar jam kerja. Kota-kota seperti Seoul, Amsterdam, London, Taipei, dan Singapore menjadi referensi penting karena keberhasilannya menyeimbangkan antara nilai ekonomi, keamanan, dan inklusivitas sosial.

Seoul: Bamdokkaebi Night Market dan Konsep “Living Streets”

Seoul mengembangkan ekonomi malam berbasis komunitas dengan Bamdokkaebi Night Market sejak 2015. Program ini beroperasi di enam titik kota Yeouido, Dongdaemun, Cheonggyecheon, Banpo, dan lainnya menggabungkan konsep mobile market dengan festival budaya.

Hasilnya impresif: lebih dari **5 juta pengunjung per tahun** dan omzet sekitar **USD 100 juta** (\pm Rp1,6 triliun), menciptakan lebih dari **1.000 pekerjaan temporer** setiap musim. Kuncinya terletak pada kurasi vendor lokal (90% UMKM muda di bawah 35 tahun), **Dukungan transportasi malam** seperti Owl Bus dan metro 24 jam di akhir pekan, dan **Desain ruang adaptif** yang memungkinkan transformasi plaza publik menjadi pasar malam dalam waktu singkat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa mobilitas malam dan creative vending bisa menjadi strategi revitalisasi ruang publik tanpa investasi fisik besar.



Sumber : HallyuSG

Taipei: Shilin Night Market dan Ekonomi Mikro Berbasis Komunitas

Taipei menjadi ikon Asia dalam hal ekonomi malam berbasis tradisi kuliner. Shilin Night Market, dengan lebih dari **2.800 pedagang aktif**, menghasilkan omzet tahunan lebih dari **USD 13 miliar** (sekitar Rp203 triliun). Rata-rata pedagang memperoleh pendapatan sekitar **Rp70 juta per bulan** di musim puncak.

Taipei menjadi ikon Asia dalam hal ekonomi Pemerintah kota berperan menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kualitas hidup warga dengan cara **regulasi jam operasional dan kebersihan yang ketat, subsidi perizinan** bagi pedagang baru yang lolos kurasi, dan **penguatan digitalisasi pembayaran** untuk transparansi pajak daerah.

Shilin menjadi bukti bahwa ekosistem informal dapat terintegrasi dengan sistem kota tanpa kehilangan karakter lokalnya prinsip yang bisa diadopsi untuk kawasan seperti Glodok atau Sabang di Jakarta.



Sumber: TripAdvisor

Jepang: Urban Narrative

Shinjuku dan Yokohama adalah dua wajah malam Jepang yang berbeda namun saling melengkapi.

Shinjuku dikenal dengan **Omoide Yokocho**, lorong sempit penuh izakaya kecil yang menjadi simbol human-scale nightlife. Meski ruangnya terbatas, efek ekonominya besar lebih dari **USD 1,2 miliar** per tahun dalam sektor F&B mikro dan pariwisata malam lokal. Faktor utamanya adalah **kedekatan dengan stasiun utama dan ritme warga kota yang tetap produktif hingga malam.**

Yokohama menjadi contoh lain dengan **Akarenga Warehouse District**, area tepi laut yang diubah menjadi pusat festival malam seperti Akarenga Christmas Market dan Seaside Movie Theater. Dalam satu musim saja, kegiatan ini menarik lebih dari **3 juta pengunjung** dan menciptakan dampak ekonomi sekitar **USD 120 juta** (\pm Rp1,9 triliun). Model Yokohama menunjukkan bahwa bangunan bersejarah bisa dihidupkan kembali sebagai ruang budaya malam tanpa kehilangan integritas arsitektural



Sumber: Tiket.com

Vietnam dan Thailand

Kawasan seperti **Hoi An (Vietnam)** dan **Chiang Mai (Thailand)** menjadi rujukan penting untuk pengembangan Night Culture Plaza. Hoi An berhasil menjaga keseimbangan antara pelestarian warisan dan ekonomi malam melalui lantern night festival, yang setiap tahun menarik lebih dari **1 juta pengunjung** dan menciptakan omzet sekitar **USD 120 juta**.

Chiang Mai bahkan lebih besar, seperti Loi Krathong Festival pada 2023 menghasilkan dampak ekonomi lebih dari **USD 350 juta** (sekitar Rp5,4 triliun) hanya dalam satu minggu, dengan 50 persen pengeluaran datang dari wisatawan internasional.

Keduanya menegaskan **bahwa ekonomi malam berbasis budaya lokal** bisa menjadi motor ekonomi pariwisata yang berkelanjutan, bukan sekadar hiburan, melainkan perayaan identitas kota.



Sumber: Worldmatetravel

Tabel 1. Komparasi Perputaran Ekonomi Kreatif Malam Kota-Kota Dunia

Kota / Kawasan	Program / Lokasi	Ciri Utama	Jumlah Pengunjung / Tahun
Seoul, Korea Selatan	Bamdokkaebi Night Market	Pasar malam mobile berbasis komunitas muda (6 lokasi)	±5 juta
Taipei, Taiwan	Shilin Night Market	Ekonomi mikro berbasis kuliner tradisional	±20 juta
Shinjuku, Jepang	Omoide Yokocho	Lorong kuliner mikro berskala manusia	±3 juta
Yokohama, Jepang	Akarenga Warehouse District	Revitalisasi bangunan kolonial jadi ruang festival malam	±3 juta / musim
Hoi An, Vietnam	Lantern Night Festival	Festival budaya malam berbasis warisan	±1 juta
Chiang Mai, Thailand	Loi Krathong Festival	Festival tradisi & ekonomi malam	±2 juta / minggu festival

Estimasi Dampak Ekonomi	Ciri Pengelolaan/ Strategi Kunci	Relevansi untuk Jakarta
±USD 100 juta (Rp1,6 triliun)	90% UMKM di bawah 35 tahun, dukungan Owl Bus & metro malam, ruang publik adaptif	Model transportasi malam dan pemberdayaan UMKM urban di Bundaran HI & Blok M
±USD 13 miliar (Rp203 triliun)	Regulasi jam operasional, kurasi pedagang, digitalisasi pembayaran	Inspirasi untuk integrasi UMKM & ekonomi informal Glodok–Sabang
±USD 1,2 miliar (Rp18 triliun)	Akses transportasi utama, izin usaha kecil, densitas tinggi	Model human-scale untuk revitalisasi kuliner malam Sabang & Blok M
±USD 120 juta (Rp1,9 triliun)	Aktivasi tepi laut, event tematik musiman, konservasi arsitektur	Relevan untuk desain ulang Kota Tua dan aktivitas malam berbasis sejarah
±USD 120 juta (Rp1,9 triliun)	Event tematik bulanan, promosi warisan lokal	Referensi Night Culture Plaza di Kota Tua
±USD 350 juta (Rp5,4 triliun)	50% pengunjung internasional, promosi budaya & wisata	Model pariwisata event-based tahunan Jakarta (Hajatan / Christmas)

BAB 4

REKOMENDASI

A INTERVENSI SPASIAL

i. Polar ASEAN- Blok M - Cipete

Tahapan Pengembangan Zona Wisata Urban

Tahap 1 – Identifikasi Karakter District

Wilayah	Karakter Distrik
ASEAN	Diplomasi & Institusional Heritage
Blok M	Komersial – Kreatif Urban
Cipete	Kreatif – Kuliner Lokal

Tahap 2- Mapping Komunitas & Pelaku Industri Lokal

Lokasi	Komunitas	Industri Lokal
ASEAN	Komunitas budaya ASEAN, duta pelajar	Galeri, resto, kantor diplomatik
Blok M	Komunitas musik, UMKM, <i>start-up</i> kreatif	M Bloc Space, street food, ritel kreatif
Cipete	Komunitas kopi, ilustrator, yoga	Kafe artisan, butik, studio desain

Tahap 3 - Public Activation Plan

Kegiatan	Lokasi	Tujuan
Pop-up Market	Halaman parkir M Bloc, taman Cipete	Wadah UMKM, artisan lokal, komunitas kreatif
Car-Free Night	Jalan Melawai, Cipete Raya	Kuliner malam, pertunjukan seni, live music
Light Festival	Koridor ASEAN - Blok M - Cipete	Membentuk "jalur wisata malam" tematik, menarik pengunjung urban & turis luar

Tahap 4 - Pengembangan Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur	Lokasi Prioritas	Keterangan
Penerangan Jalan	Cipete & gang kecil	Tambah lampu hemat energi (solar)
Signage Wisata	MRT ASEAN, Blok M, Cipete Raya	Petunjuk arah, QR scan map, narasi sejarah kawasan
CCTV & WiFi Publik	Blok M & Cipete	Tingkatkan rasa aman dan akses digital
Transportasi Malam	Koridor MRT - kawasan kuliner	Shuttle akhir pekan, koneksi MRT malam sampai 23.00-24.00

Tahap 5 - Monitoring & Evaluasi Berbasis Data Pengunjung

Sistem Pemantauan:

- Sensor pedestrian (jumlah pejalan kaki harian).
- QR check-in di titik wisata & event publik.
- Statistik transaksi UMKM & tenant wisata.

Evaluasi Rutin:

- Survei wisatawan & warga lokal.
- Feedback digital via media sosial & QR form.
- Laporan triwulan dampak ekonomi & sosial.

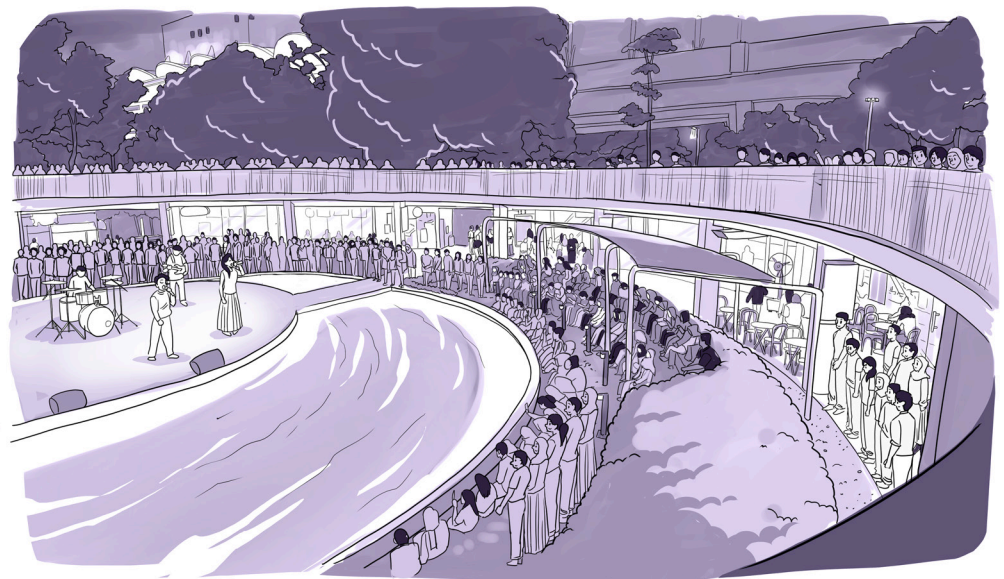
Kesimpulan & Rekomendasi

Kawasan **Gedung ASEAN – Blok M – Cipete** adalah koridor strategis yang memadukan **diplomasi, budaya, ekonomi kreatif, dan gaya hidup urban**. Potensinya sangat besar untuk dikembangkan sebagai **Zona Wisata Urban Tematik** yang mengedepankan integrasi:

- **ASEAN** → Heritage Diplomasi
- **Blok M** → Lifestyle Kreatif
- **Cipete** → Kuliner & Komunitas Urban

Rekomendasi Strategis:

- **Tetapkan identitas kawasan tematik** dan integrasikan melalui jalur wisata MRT.
- **Aktifkan ruang publik** melalui event kreatif berbasis komunitas.
- **Bangun infrastruktur pendukung ringan** namun berdampak (lampu, signage, transportasi malam).
- Perbaiki isu **transportasi malam, pencahayaan, dan manajemen parkir**.
- **Fokus pada pemberdayaan UMKM & komunitas lokal** sebagai penggerak utama wisata.



ii. Polar Bundaran HI

Tahap 1 – Identifikasi Karakter District

- **Bundaran HI:** distrik **komersial & modern.**
- **Sabang:** distrik **kuliner malam.**

Tahap 2 – Mapping Komunitas & Industri Lokal

- **Bundaran HI:** identifikasi komunitas olahraga, pejalan kaki (retail, hotel, kafe)
- **Sabang:** pemetaan UMKM **kuliner malam**, PKL (warung, restoran, street food)

Tahap 3 – Rancang Aktivasi Publik

- **Pop-up Market:** diadakan di area Sabang di akhir pekan, bisa digabung dengan Light Festival dan bekerja sama dengan pelaku usaha di Bundaran HI.
- **Car-Free Night:** Jalan Sabang tiap Sabtu malam, diisi pertunjukan seni jalanan & kuliner lokal. Pernah diusulkan sebelumnya akan tetapi mendapat reaksi keras dari komunitas local di Jalan Sabang.

Tahap 4 – Pengembangan Infrastruktur Pendukung

- Pemasangan **signage wisata & penunjuk arah** berbasis kawasan.
- **CCTV & WiFi publik** di titik-titik ramai.
- Penyediaan **transportasi malam** (shuttle mini bus) khusus untuk wisatawan hingga pukul 23.00.

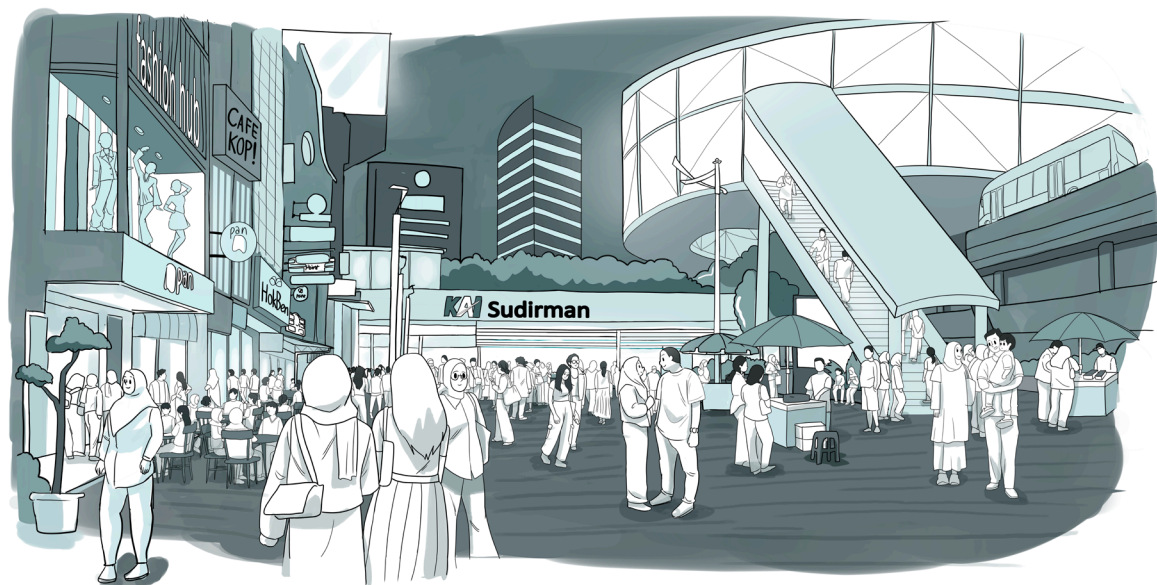
Tahap 5 – Monitoring & Evaluasi

Pemetaan data pengunjung melalui:

- Sensor pejalan kaki.
- QR check-in pada spot wisata.
- Survei kepuasan wisatawan.

Evaluasi triwulan:

- Kinerja infrastruktur.
- Dampak ekonomi terhadap UMKM lokal.
- Feedback dari komunitas.



Kesimpulan & Rekomendasi

Kawasan Bundaran HI – Sabang memiliki potensi kuat sebagai **Zona Wisata Urban Terintegrasi** dengan karakter berbeda namun saling melengkapi. Pengembangan kawasan harus berbasis pada kekuatan lokal: **kuliner malam dan modernitas kota**. Intervensi yang disarankan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan kultural, mendorong partisipasi komunitas dan pelaku lokal.

Rekomendasi Strategis:

- Fokus pada **branding tematik tiap kawasan**.
- Penguatan **aksesibilitas malam hari**.
- Aktivasi **event rutin** berbasis komunitas.
- Penataan ulang **fasilitas umum & PKL secara terintegrasi**.

iii. Polar Glodok Kota Tua

Tahapan Pengembangan Zona Wisata Urban

Tahap 1 – Identifikasi Karakter District

- **Kota Tua:** *heritage district* → fokus pelestarian sejarah museum.
- **Glodok:** kuliner & pecinan kreatif → fokus gastronomi dan festival budaya.
- **Petak 9:** zona transisi kreatif & komersial → ruang untuk *start-up, co-working, pop-up market*.

Tahap 2 – Mapping Komunitas & Industri Lokal

- Pemetaan UMKM kuliner Glodok (warung legendaris, kopi, jajanan khas).
- Identifikasi seniman & komunitas di Kota Tua (lukis, musik, teater jalanan).
- Potensi industri kreatif di Petak 9 (desain, *fashion, co-working*).

Tahap 3 – Rancang Aktivasi Publik

- **Pop-up market:** festival makanan khas pecinan di Glodok.
- **Car-free night:** penutupan jalan tertentu di malam minggu untuk aktivitas seni, musik, kuliner.
- **Light festival:** pencahayaan artistik bangunan *heritage* Kota Tua.

Tahap 4 – Pengembangan Infrastruktur Pendukung

- Penerangan kota (*smart lighting*, lampu tematik).
- *Signage* wisata dwibahasa (Indonesia–Inggris, plus Mandarin untuk Glodok).
- CCTV & pengelolaan parkir terintegrasi.
- Transportasi malam (*shuttle bus* dari pusat kota ke Kota Tua & Glodok).

Tahap 5 – *Monitoring & Evaluasi*

- Data pengunjung berbasis digital (sensor, ticketing, aplikasi wisata).
- Survei kepuasan pengunjung & UMKM.
- Evaluasi dampak ekonomi lokal & kualitas ruang publik.

Kesimpulan

Kota Tua, Glodok, dan Peta 9 memiliki potensi kuat sebagai **zona wisata urban terpadu** dengan karakter saling melengkapi: heritage, kuliner, dan kreatif. Dengan strategi **aksesibilitas yang lebih baik, aktivasi publik yang beragam, serta infrastruktur pendukung yang terintegrasi**, kawasan ini dapat berkembang sebagai destinasi wisata sejarah–kuliner–kreatif utama di Jakarta.



B REKOMENDASI REGULASI

i. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah diperlukan dengan tujuan utama yaitu membentuk dasar dan payung hukum untuk seluruh aktivitas ekonomi malam, memastikan kegiatan ekonomi, sosial, dan kreatif yang berlangsung malam hari punya legitimasi hukum dan tata kelola tetap.

i.i. Perda tentang Penyelenggaraan Ekonomi Malam Jakarta (Owl Economy Framework)

Diperlukan peraturan daerah (perda) khusus yang berfungsi menjadi dasar hukum utama, yang menetapkan penyelenggaraan keberadaan zona ekonomi malam sebagai bagian resmi dari perencanaan kota dan kebijakan pariwisata DKI.

Substansi utama:

- **Penetapan Zona Ekonomi Malam:**
Penetapan Zona Ekonomi Malam diperlukan paling tidak untuk tiga zona utama (Blok M–Cipete, HI–Sabang–Dukuh Atas, Glodok–Kota Tua) dan empat zona sekunder. Setiap zona punya jam operasional, aktivitas utama, dan karakter kawasan.
- **Prinsip Pengelolaan:**
Setiap zona ekonomi malam menganut asas keamanan 24 jam, inklusivitas warga, konektivitas transport, dan tanggung jawab lingkungan.
- **Governance System:**
Diperlukan pembentukan kelembagaan lintas dinas untuk membangun *Night-Time Governance System* (NTGS), yang terdiri dari Disparekraf, Dishub, Satpol PP, Bina Marga, UMKM, dengan mekanisme koordinasi rutin.
- **Hak & Kewajiban:**
Pemerintah bertanggung jawab atas keamanan dan fasilitas dasar; pelaku usaha wajib bersertifikasi, menjaga kebersihan, mematuhi jam operasional; serta masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan dan kawasan.
- **Penegakan Hukum:**
Adanya sanksi administratif hingga penutupan bagi pelaku usaha yang melanggar aturan keselamatan dan jam operasional.

Arah implementasi disusun dan disiapkan bersama DPRD DKI, diintegrasikan ke RPJMD dan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

i.ii. Perda Penyesuaian RTRW/RDTR

Perda penyusunan penyesuaian RTRW/RTDR bertujuan untuk menguatkan kerangka spasial zona ekonomi malam.

Substansi meliputi:

- Penambahan kategori fungsi malam (*night-use zones*) dalam RDTR Jakarta.
- Legalitas penggunaan ruang publik malam (*car-free night, light festival, pasar malam kreatif*).
- Integrasi desain pencahayaan kota (*city lighting plan*) dan standar keamanan pedestrian malam.
- Penetapan aturan reklame & signage malam, termasuk larangan LED berlebih di kawasan heritage.

Arah implementasi yaitu melakukan revisi RTRW/RDTR oleh Bappeda, didukung kajian spasial dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.



ii. Peraturan Gubernur (Pergub)

Pergub bertujuan untuk menjabarkan Perda dan menurunkan kebijakan strategis ke dalam mekanisme teknis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

ii.i. Pergub Penyelenggaraan Ekonomi Malam

Pergub penyelenggaraan zona ekonomi malam menjadi payung pelaksanaan turunan Perda yang mengatur operasional teknis, mengatur seputar zonasi, jam operasional, dan standar amenities malam.

Substansi utama:

- Penetapan Zona Prioritas & Indikator 3A+1C: aksesibilitas, amenities, atraksi, komunitas.
- Jam Operasional Berdiferensiasi:
 - Zona hiburan & kuliner: hingga 02.00
 - Zona campuran (komersial–residensial): hingga 00.00
 - Zona heritage: maksimal 23.00 dengan izin khusus.
- Standar Amenitas Malam:
 - Meliputi pencahayaan, CCTV, kebersihan, toilet, parkir, dan keamanan lingkungan yang memadai.
- Kebijakan Transport Malam:
 - Meliputi jam operasional transportasi umum MRT/LRT diperpanjang sampai 01.00 untuk zona prioritas; TransJakarta rute malam; dan *microtrans last-mile*.
- *Noise & Social Management*:
 - Meliputi sistem pengendalian kebisingan, manajemen sampah, dan perlindungan warga sekitar agar tidak terganggu karena ada aktivitas ekonomi di malam hari.
- Klasifikasi Event:
 - Membedakan event sesuai dengan tujuan dan acaranya, yaitu komersial, komunitas, budaya, olahraga, dengan standar izin berbeda.

Arah implementasi yaitu pihak Disparekraf bertindak sebagai koordinator, sedangkan Dishub dan Satpol PP sebagai pelaksana teknis.

ii.ii. Pergub *One-Stop Night Permit System*

Pergub *One-Stop Night Permit System* berfungsi untuk menyeragamkan dan menyatukan perizinan kegiatan malam ke dalam satu kanal digital, terintegrasi dengan Polri agar izin kegiatan diperoleh dengan efisien dan efektif.

Substansi utama:

- Sistem daring “*Night Permit Jakarta*” untuk izin *event*, usaha kuliner malam, dan atraksi ruang publik.
- Integrasi data dengan Polri.
- Proses izin maksimal 5 hari kerja dengan hasil transparan dan terpublikasi.
- Penilaian risiko wajib seperti crowd control, kebersihan, dan keamanan.

Arah implementasi *One-Stop Night Permit System* dapat dikembangkan oleh Diskominfo bersama Dinas PTSP.

ii.iii. Pergub *Kolaborasi Pengelolaan Kawasan (Co-Management Unit)*

Fungsi dari pergub kolaborasi pengelolaan kawasan adalah membentuk *night economy management unit* per zona, membuat model tata kelola bersama antara pemerintah, swasta, dan komunitas.

Substansi meliputi:

- Pembentukan *Night Economy Management Unit* (NEMU) di tiap polar.
- Beranggotakan Disparekraf, Jakpro/MRTJ, komunitas, pelaku usaha, dan RW setempat.
- Fungsi:
 - Kurasi *event* bulanan,
 - Monitoring keamanan & kebersihan,
 - Koordinasi perizinan lokal,
 - Promosi digital kawasan.

Arah implementasi pengelolaan kawasan ini adalah format yang serupa dengan “*Jakarta Experience Board*”, namun dibedakan per zona secara lengkap.

iii. Keputusan Gubernur (Kepgub)

Tujuan utama dari Kepgub yaitu operasionalisasi Pergub dalam bentuk penetapan resmi, pendelegasian tugas, dan roadmap aksi.

iii.i. *Kepgub Penetapan Zona & Roadmap 2025–2030*

Kepgub Penetapan Zona & Roadmap 2025–2030 berguna untuk penegeasan 3 polar utama & 4 polar sekunder, dengan timeline pengembangan sebagai berikut

- 2025–2026: pilot Blok M–Cipete (*Continuing*).
- 2027–2028: deklarasi HI–Sabang (*Commencing*).
- 2029–2030: launching Glodok–Kota Tua (*Preparing*).

Pergub ini memiliki target *outcome*: peningkatan kunjungan malam sebesar 20% dan penyerapan tenaga kerja malam sebesar 15%.

iii.ii. *Kepgub Penugasan OPD / Task Force*

Kepgub Penugasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / *Task Force* berguna untuk membagi tanggung jawab mulai dari *event*, transportasi, UMKM, infrastruktur, pengawasan, dan publikasi digital, dengan pembagian sebagai berikut:

- Disparekraf → penyusunan kalender event malam, sertifikasi usaha.
- Dishub → transport malam, rekayasa lalu lintas.
- Dinas UMKM → fasilitasi PKL dan UMKM kuliner malam.
- Bina Marga → infrastruktur pedestrian & penerangan.
- Satpol PP → patroli malam preventif (bukan represif).
- Kominfo → publikasi digital & monitoring sentimen publik.

iii.iii. Kegub Penataan PKL Malam

Kegub Penataan PKL (pedagang kaki lima) malam berguna untuk mengatur aturan *layout*, sertifikasi, pajak, serta model penataan PKL dengan detail sebagai berikut:

- Penetapan cluster PKL malam resmi (Sabang, Blok M, Cipete, Kota Tua).
- Standar layout: trotoar bebas 2 meter, jalur sampah, dan zona duduk.
- Sertifikasi kebersihan & pajak ringan berbasis omzet.
- Model: “*Food Street License*” (terinspirasi Bangkok/ Seoul).

iii.iv. Kegub Standar Event Malam

Kegub Standar Event Malam dapat menjadi pedoman dan panduan operasional teknis untuk pengadaan, penyelenggaraan, serta pasca-event, dengan detail sebagai berikut:

- Mengatur standar operasional event malam publik seperti HI Night Run, Sabang Feast, Kota Tua *After Hours*.
- Mengatur dan memiliki kriteria dan standar yang sama dari segi kapasitas, pencahayaan, *crowd control*, kebersihan, *noise limit*.
- Memiliki peraturan kewajiban bagi penyelenggara event untuk memberikan laporan pasca-event yang berguna menjadi evaluasi sosial & ekonomi.



アトカラ
アトカ



iv. Peraturan Dinas

Peraturan dinas berfungsi menjadi pedoman operasional internal antar-dinas agar tidak saling tumpang tindih. Diperlukan peraturan dinas yang saling melengkapi, jelas, dan mengatur.

iv.i. Peraturan Dinas Perhubungan

Peraturan dinas yang sebaiknya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan meliputi:

- Standar teknis transportasi malam (frekuensi, jalur aman, pos transit).
- Sistem parkir malam dengan *e-ticketing* tanpa pungutan liar.
- Program “*Safe Walk Route*”, yaitu trotoar terang dengan emergency call point yang secara mudah dapat diakses oleh pejalan kaki dan pengunjung lain.

iv.ii. Peraturan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan dinas yang sebaiknya dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi:

- Mekanisme kurasi & lisensi event malam, agar *event* yang diselenggarakan adalah *event* yang sesuai dengan tujuan, sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang memenuhi standar keamanan masyarakat.
- Panduan *hospitality* malam mencakup pelatihan staf, manajemen *crowd*, *customer safety* agar aktivitas ekonomi malam berjalan dengan lancar dan aman.
- Pendaftaran “*Creative Night Venues*” dengan sistem rating.
- Pemberian *incentive label* bagi usaha ramah lingkungan dan komunitas.

iv.iii. Peraturan Dinas Bina Marga & Cipta Karya

Peraturan dinas yang sebaiknya dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya meliputi:

- Standar yang aman dan memadai untuk *city lighting plan* tiap zona dengan warna lampu khas kawasan.
- Ketentuan *signage & wayfinding*, yaitu *readable, bilingual, non-cluttered*.
- Pedestrian malam wajib punya area duduk di setiap 200 meter.

iv.iv. Peraturan Dinas KUMKM

Peraturan dinas yang sebaiknya dikeluarkan oleh Dinas UMKM meliputi:

- Skema *Night Market License* untuk UMKM.
- Pelatihan *hygiene, food safety*, dan *digital payment*.
- Rotasi tenant tiap 3 bulan agar menjamin inklusivitas.
- Skema kredit ringan melalui Bank DKI untuk UMKM malam.

v. Petunjuk Teknis (Juknis)

Instruksi teknis bertujuan bagi pelaksana lapangan, event organizer, panitia event, dan pengelola zona.

v.i. Juknis Manajemen Event Malam

Meliputi:

- Panduan izin, perizinan durasi & kapasitas.
- SOP keamanan: *exit point*, *crowd flow*, *sound level*, dan petugas medis.
- Format *Risk Assessment Form* wajib diisi sebelum event.
- Prosedur *emergency (blackout, evakuasi, kebakaran, dan sebagainya)*.

v.ii. Juknis Kurasi Pelaku Usaha & UMKM

Meliputi:

- Kriteria pemilihan *tenant*, dari segi kualitas produk, kebersihan, serta desain *booth*.
- SOP penggunaan energi, air, dan sampah.
- Skema rotasi usaha: 70% bagi usaha lokal, 30% bagi emerging brand.
- Template *layout booth & signage*.

v.iii. Juknis Operasional Kawasan Malam

Meliputi:

- Jadwal patroli keamanan kolaboratif (Satpol PP + komunitas).
- SOP pembersihan jalan & pengelolaan sampah malam.
- Penempatan PKL non-intrusif: trotoar minimal 3 meter, tidak menutup jalur sepeda.
- Penerapan *City Night Ambassadors* dari warga sekitar.

v.iv. Juknis Komunikasi Publik

Meliputi:

- Template info event malam (*layout, tone, logo kota*).
- Panduan kampanye digital melalui kanal media sosial seperti Instagram dalam format Instagram Reels, TikTok, dan live update.
- Sistem *QR signage* untuk menampilkan sejarah kawasan dan agenda event.
- Standar respon publik di media sosial untuk krisis meliputi *noise*, kebersihan, dan keamanan.

Usulan Khusus: Car-Free Night Jakarta

Sebagai pelengkap, diusulkan program *Car-Free Night* (CFN) yang dilakukan secara berkala di tiga zona utama:

- Sabang – Sarinah (setiap Jumat minggu pertama)
- Blok M – M Bloc – Little Tokyo (setiap Jumat minggu kedua)
- Glodok – Pancoran Chinatown Point – Fatahillah (setiap Jumat minggu ketiga)

Format ini menjadi wadah bagi UMKM kuliner, pelaku seni jalanan, dan komunitas kreatif untuk berinteraksi langsung dengan publik.

Selain meningkatkan keamanan dan kenyamanan malam hari, CFN juga berfungsi sebagai *living lab* untuk mengukur pergerakan ekonomi malam dan pola pengunjung secara *real-time*.



C REKOMENDASI RENCANA AKSI

Jakarta sedang berdiri di titik peralihan penting. Setelah melewati fase panjang sebagai pusat administrasi dan ekonomi nasional, kini kota ini menghadapi tantangan baru: membangun identitas global yang relevan, berkarakter, dan berkesinambungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta telah melahirkan beragam inisiatif, dari Jakarta Hajatan, *Christmas Carol*, hingga Jakarta *Future Festival*, namun seluruhnya masih berdiri sendiri tanpa benang merah yang kuat. Inilah tantangan utama branding kota saat ini: bagaimana *Enjoy Jakarta* dapat berevolusi dari sekadar slogan menjadi identitas global *tourism hub* yang hidup dan terukur.

Transformasi dari Slogan menjadi Ekosistem

“Enjoy Jakarta” perlu dimaknai ulang, bukan sebagai ajakan pasif untuk menikmati, tetapi sebagai pernyataan aktif bahwa kota ini layak dijelajahi, diulang, dan diingat.

Sebagaimana I amsterdam menanamkan rasa kepemilikan dan *Seoul My Soul* menciptakan kedekatan emosional, *Enjoy Jakarta* dengan **“Enjoy the Neighborhood”** sebuah payung naratif yang menekankan keunikan tiap kawasan polar: gaya hidup urban di Blok M, kreativitas transit di Dukuh Atas, dan pesona budaya di Glodok–Kota Tua.

Setiap kawasan akan memiliki pola visual, aksen warna, dan sistem signage khas menjadikan branding ini bukan sekadar kampanye, tetapi pengalaman kota yang nyata.

Arah Strategi dan Rencana Aksi

a. Pengembangan Quick Wins (2025–2026)

Langkah paling cepat adalah memperkuat **polar Blok M** sebagai episentrum ekonomi kreatif Jakarta Selatan. Kawasan ini sudah memiliki infrastruktur yang siap — MRT, ruang publik, serta basis komunitas yang aktif. Tugas berikutnya adalah **memperbanyak event malam**, memperpanjang jam buka ruang publik, dan memperkuat konektivitas pejalan kaki dari stasiun MRT hingga ruang-ruang aktivitas.

b. Fase Pertumbuhan (2026–2028): Bundaran HI – Dukuh Atas – Sabang

Membangun episentrum baru yang menghubungkan **fasilitas transportasi modern dengan ruang publik kota**. Koridor “cincin donat” Dukuh Atas menjadi panggung urban 24 jam, dari pekerja sore di SCBD yang bergeser menikmati kopi di Sabang, hingga musisi jalanan dan pameran malam di terowongan Kendal. Pembangunan ruang transisi antara moda (MRT, LRT, TransJakarta) harus disertai dengan street activation yang berorientasi pada pejalan kaki dan pengalaman malam.

c. Fase Regenerasi (2028–2029): Glodok – Kota Tua

Dengan rencana pemindahan Institut Kesenian Jakarta dan pengembangan kantor Dinas Parekraf di kawasan ini, Kota Tua siap menjadi laboratorium ekonomi kreatif berbasis sejarah.

Program “*Soul of Heritage Melting Pod*” bisa menjadi narasi besar, memadukan Pancoran Chinatown Point, Pasar Asemka, hingga pelabuhan Sunda Kelapa dalam satu ekosistem destinasi budaya malam.

Kolaborasi dan Ekosistem Pendukung

Transformasi Jakarta tidak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan jejaring kolaborasi lintas sektor yang konkret:

- **Pemerintah Pusat dan BUMN** untuk optimalisasi aset publik seperti lahan TOD, bangunan heritage, dan ruang milik negara di kawasan prioritas.
- **Swasta dan pengembang kawasan**, misalnya kolaborasi dengan PIK Tourism Board untuk membuka pelabuhan baru menuju Kepulauan Seribu, memperkuat integrasi antara pulau dan daratan Jakarta.
- **Komunitas dan UMKM** lokal, untuk memastikan bahwa setiap pengembangan ekonomi malam tidak kehilangan karakter lokalnya.

Narasi Publik dan Peraturan Penunjang

Sebuah kota global membutuhkan **public narrative yang berkesinambungan**. Narasi ini tidak dibangun dari baliho atau iklan, tetapi dari keseharian: dari minum kopi Tuku di Cipete selepas jam kerja, mencicipi manisnya Lil Salt Bread di Cikini, atau makan gurihnya gulai Tikungan sambil melihat lampu kota dari atas Up Thamrin Nine.

Untuk menopang keberlanjutan ekosistem ini, perlu disiapkan:

- **Rencana Daerah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta** sebagai legal framework pengembangan destinasi kota 24 jam.
- **Peraturan jam operasional fleksibel** bagi usaha F&B, ruang publik, dan retail malam hari di kawasan prioritas.
- **Sistem insentif dan izin sederhana** bagi event kota malam (musik, desain, kuliner) yang berbasis komunitas.

Prinsip Pengembangan dan Kurasi Calendar of Events Jakarta

Prinsip ini disusun untuk menjawab dinamika pelaku usaha dan komunitas kreatif yang semakin aktif menghidupkan ruang kota melalui kegiatan ekonomi malam. Pendekatannya bersifat *ground-up*, berangkat dari aspirasi masyarakat dan ekosistem kreatif yang telah terbentuk secara organik di berbagai kawasan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan mitra kolaboratif yang mendorong kegiatan sesuai dengan semangat *Global Tourism Hub* serta visi *Enjoy Jakarta*. Penyusunan *calendar of events* diarahkan untuk memperkuat sinergi antara sektor publik, swasta, dan komunitas, sehingga tercipta kontinuitas kegiatan yang berakar pada identitas lokal namun memiliki daya saing internasional. Setiap prinsip dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan, inklusivitas, dan dampak ekonomi nyata bagi warga. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi panduan strategis dalam menata Jakarta sebagai kota yang hidup siang dan malam, serta mampu memadukan nilai budaya, ekonomi, dan inovasi secara seimbang.



Prinsip 1: Signifikansi terhadap Branding Kota

Setiap kegiatan yang tercantum dalam *calendar of events* harus memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan posisi Jakarta sebagai **Global Tourism Hub** dan penguatan narasi **Enjoy Jakarta**. Kegiatan diseleksi berdasarkan kontribusinya terhadap peningkatan daya tarik wisata, promosi citra kota, serta kemampuannya menarik pengunjung domestik dan internasional. Fokus diarahkan pada program yang memiliki dampak luas terhadap ekonomi kota dan mendukung reputasi Jakarta sebagai kota yang hidup sepanjang hari. Contohnya adalah *Jakarta Light Festival*, *Christmas Carol Jakarta*, dan *Jakarta Marathon* yang memperlihatkan kombinasi antara promosi budaya, inovasi kota, dan daya saing destinasi metropolitan di Asia Tenggara.

Prinsip 2: Kolaborasi dengan Stakeholder Champion

Agenda tahunan dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif bersama pemangku kepentingan utama atau *stakeholder* champion seperti **Jakarta Marathon, ICAD Kemang, Jakarta Fashion Week, dan PIK Tourism Board**. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengarah dalam membentuk kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan komunitas kreatif. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan keselarasan arah program, memperkuat *co-branding*, serta memastikan kesinambungan agenda dari tahun ke tahun. Prinsip kolaboratif ini juga mendorong efisiensi sumber daya, integrasi promosi lintas kawasan, dan perluasan jaringan partisipasi industri kreatif kota.



Prinsip 3: Penguatan Narasi Lokal dan Kawasan

Setiap kegiatan harus dirancang berdasarkan identitas kawasan, karakter sosial budaya, serta potensi komunitas yang ada. Pendekatan ini memastikan setiap event mencerminkan keberagaman Jakarta dan mengangkat kekhasan ruang publiknya. Contoh penerapan dapat ditemukan pada *Festival Jalan Sabang* di Menteng yang mengedepankan budaya kuliner urban, *Lintas Melawai* di Blok M yang menampilkan seni jalanan dan musik komunitas, serta *Pasar Baru Cultural Night* yang menyoroti warisan arsitektur dan ekonomi kreatif berbasis lokal. Prinsip ini menekankan pentingnya ekonomi malam yang tumbuh dari narasi lokal, bukan semata aktivitas konsumtif, melainkan penguatan identitas kawasan sebagai bagian dari citra kota secara keseluruhan.

Prinsip 4: Inklusivitas dan Aksesibilitas Publik

Setiap event yang dikembangkan harus bersifat inklusif, mudah diakses, dan mampu menampung berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan di ruang publik dirancang agar dapat dinikmati oleh keluarga, pelajar, pekerja, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, serta wisatawan. Desain acara menekankan kenyamanan, keamanan, serta konektivitas dengan sistem transportasi publik seperti MRT, TransJakarta, dan jalur pejalan kaki yang memadai. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap lokasi event memiliki dukungan fasilitas dasar seperti pencahayaan, sanitasi, dan keamanan lingkungan yang baik. Pendekatan ini menjadikan ruang kota bukan sekadar tempat berlangsungnya acara, tetapi juga medium interaksi sosial yang terbuka bagi semua warga.

Prinsip 5: Kolaborasi Antar Kota dan Sister City

Pengembangan *calendar of events* harus dilakukan dalam konteks jejaring kerja sama antar kota di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperkuat kemitraan dengan kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Denpasar, Surabaya, dan Makassar untuk mengembangkan pertukaran program budaya dan promosi bersama. Pada tingkat internasional, kolaborasi dengan *sister city* seperti Singapore, Kuala Lumpur, Seoul, dan Tokyo diarahkan untuk membangun sinergi dalam promosi pariwisata malam, pertukaran pelaku kreatif, dan penyelenggaraan event lintas kota. Prinsip ini bertujuan menciptakan **jejaring intercity cultural corridor** yang menempatkan Jakarta sebagai pusat kolaborasi budaya dan ekonomi malam di kawasan Asia Tenggara.

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) KEBERHASILAN OWL ECONOMY

Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai tolok ukur objektif untuk menilai keberhasilan dan pencapaian tujuan strategis, dalam konteks ini di bidang ekonomi perkotaan. Metrik Key Performance Indicator (KPI) diterapkan untuk memberikan gambaran dan hasil objektif mengenai kinerja, aspek-aspek yang berpengaruh dalam berjalannya Owl Economy, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Owl Economy, dan membantu para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan performa.

Kebijakan dan implementasi Owl Economy di Jakarta membutuhkan KPI yang secara langsung dapat mengukur dampak ekonomi, keterlibatan UMKM, integrasi transportasi, dan keamanan masyarakat. Hasil penelitian ini menggabungkan model perhitungan dengan dimensi strategis berbasis kota global untuk menyusun satu KPI komprehensif yaitu Owl Economy Index.

Sebagaimana telah dibahas pada subbab **Panduan Perhitungan Dampak Ekonomi Malam**, *Owl Economy Index* dihitung berdasarkan perputaran ekonomi langsung dari aktivitas malam, dikalikan dengan multiplier efek ekonomi, serta memperhatikan inut sosial dan infrastruktur kota. Rumus utama Owl Economy Index adalah:

$$E = (V \times S \times F) + (H \times A)$$

Keterangan:

E = total perputaran ekonomi malam (Rp/tahun)

V = rata-rata pengunjung per bulan

S = rata-rata pengeluaran per orang

F = jumlah event aktif per tahun

H = nilai transaksi sektor hospitality

A = pengeluaran tambahan (retail, transport, hiburan)

Multiplier effect sebesar 1,8 digunakan sesuai temuan Asian Development Bank (2023), yang menunjukkan dampak Owl Economy tidak terbatas pada belanja langsung, namun juga memiliki dampak tidak langsung dan induced effect dalam ekosistem kota.

Selain KPI utama Owl Economy Index dari rumus tersebut, ada beberapa dimensi strategis dan KPI pendukung lainnya untuk menilai keberhasilan Owl Economy di Jakarta yang dapat diterapkan dan diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

a. Kontribusi PDRB dari Owl Economy

Pengukuran kontribusi PDRB dari sektor *Owl Economy* (perhotelan, ritel, pasar informal, makanan dan minuman, event dan yang lainnya). Ekonomi kreatif di Jakarta berhasil menyumbang 10,5% terhadap PDRB kota yaitu mencapai Rp 362 triliun. Dengan adanya *Owl Economy*, dapat dilihat akumulasi kontribusinya terhadap PDRB kota Jakarta selanjutnya.

b. Night-time Light

Night-time light merupakan teknologi berbasis satelit untuk memberikan informasi terkait aktivitas manusia di malam hari, mencakup ekonomi, pemukiman, konflik, bencana, dan lingkungan. NTL dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan kota dan aktivitas Owl Economy. Pada satelit akan terlihat wilayah dengan cahaya malam yang terang memiliki kegiatan ekonomi yang kuat dan sebaliknya.

c. Pekerjaan di Sektor Owl Economy

Meningkatnya jumlah lapangan kerja di sektor Owl Economy, baik lapangan kerja formal dan informal seperti pada sektor perhotelan, ritel, transportasi, keamanan, dan hiburan juga turut menjadi indikator keberhasilan Owl Economy. Dengan jumlah lapangan kerja yang bertambah, berarti jumlah tenaga kerja yang terserap akan semakin banyak. Hal ini sejalan dengan kajian dari Kearney Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia Buku 3: Masyarakat & Tenaga Kerja.

d. Mobilitas dan Penggunaan Transportasi Umum Malam

Data tentang mobilitas dan penggunaan transportasi umum mencakup data jumlah penumpang, cakupan layanan, serta efisiensi layanan transportasi umum malam, seperti MRT, KRL commuter line, TransJakarta, maupun layanan ride-hailing setelah pukul 18.00. Indikator mobilitas dan penggunaan transportasi umum malam akan menunjukkan bagaimana aksesibilitas dan kenyamanan transportasi malam berperan mendukung aktivitas Owl Economy, dan meningkatkan keamanan dan kualitas hidup masyarakat di malam hari.

e. Jumlah dan Keragaman Pengunjung

Selain itu, penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap jumlah, keragaman, dan profil pengunjung Owl Economy, mencakup warga lokal, wisatawan domestik, maupun internasional juga diperlukan. Hal ini akan memberikan wawasan tentang daya tarik, inklusivitas, keragaman aktivitas Owl Economy, consumer behavior dari para pengunjung, serta menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pemasaran dan pengelolaan aktivitas Owl Economy lainnya.

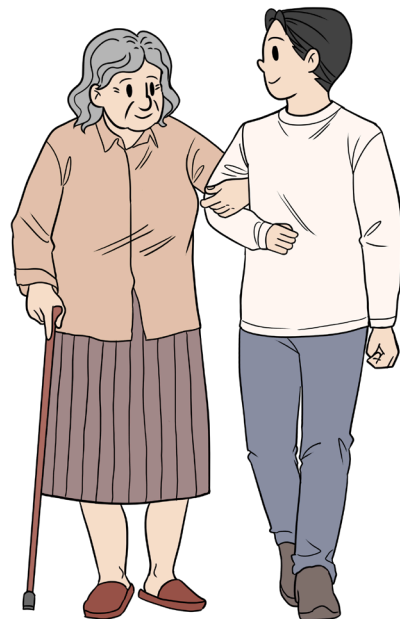
f. Aktivasi Sosial dan Budaya

Keragaman serta frekuensi diadakannya aktivasi, seperti event, festival, serta aktivitas sosial dan budaya publik yang diadakan pada malam hari turut mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan identitas budaya dan sosial kota Jakarta pada malam hari.



POLAR SEKUNDER DAN INKLUSIVITAS WILAYAH

Bersama Suku Dinas Parekraf wilayah, pengembangan **polar sekunder** perlu dilakukan di tiap kota administratif untuk menciptakan pemerataan ekonomi kreatif.
Kemang dengan karakter ekspatriat dan art gallery;
PIK dengan kawasan wisata tepi laut;
Kelapa Gading dengan wisata kuliner keluarga;
dan Tanjung Duren dengan energi muda dan kampus – semuanya dapat menjadi champion nodes di luar tiga polar utama.



PENUTUP: KOTA YANG LAYAK 24/7

Owl Economy bukan sekadar gagasan tentang ekonomi malam, melainkan tentang **cara kota bernafas lebih panjang.**

Tentang Jakarta yang tak berhenti ketika matahari terbenam, tetapi justru menemukan dirinya di antara kopi malam, cahaya jalan, dan suara warga yang tertawa di trotoar.

Jika langkah-langkah ini dijalankan konsisten dengan arah, koordinasi, dan empati pada warganya maka Enjoy Jakarta tidak lagi menjadi slogan promosi, melainkan **reputasi kota yang hidup.**

Sebuah kota yang siap terbang, bagi mereka yang siap terjaga.

Early bird catches the worm

Night owls catches the rest

Everyone can be happy and prosperous

Jakarta: city of opportunity for those who is ready to fly



REFERENSI

Ashworth, G. J., & Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. *Tourism Management*, 32(1), 1–15.

Bishop, P., & Williams, L. (2012). *The Temporary City*. Routledge.

Conzen, M. R. G. (2004). *Thinking about urban form: Papers on urban morphology, 1932–1998*. Peter Lang.

de las Obras-Loscertales Sampériz, J., García-Palomares, J. C., Ramiro-Fariñas, D., Martín-Caro, M. S., & Gutiérrez, J. (2025a). Consumption after dark exploring spatio-temporal patterns of spending in the night-time economy. *Cities*, 159, 105726. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.105726>

Evans, G. (2009). Creative cities, creative spaces, and urban policy. *Urban Studies*, 46(5-6), 1003–1040.

Fan, Y., Chen, M., Chen, W., & Ke, J. (2024). Welcome to the night: Nighttime amenities, travel to consume, and urban economic spillover. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4990817>

Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class*. Basic Books.

Haidlir, B. M., Musthofa, B. M., Mukhlis, B. M. (2024). Analysis of global tourism and creative economy trends to support urban development. *Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies*. 28(1), 45–58.

Kearney. (2025). *Jakarta Rise#20: Langkah Menuju 20 Kota Teratas. Buku 1: Visi & Misi*. Bappeda Jakarta.

Kearney. (2025). *Jakarta Rise#20: Langkah Menuju 20 Kota Teratas. Buku 2: Bisnis & Ekonomi*. Bappeda Jakarta.

Kearney. (2025). *Jakarta Rise#20: Langkah Menuju 20 Kota Teratas. Buku 3: Masyarakat & Tenaga Kerja*. Bappeda Jakarta.

Kearney. (2025). *Jakarta Rise#20: Langkah Menuju 20 Kota Teratas. Buku 4: Pariwisata & Penjenamaan Kota (Branding)*. Bappeda Jakarta.

Kearney. (2025). *Jakarta Rise#20: Langkah Menuju 20 Kota Teratas. Buku 5: Lingkungan & Keberlanjutan*. Bappeda Jakarta.

Kearney. (2025). *Jakarta Rise#20: Langkah Menuju 20 Kota Teratas. Buku 6: Infrastruktur & Mobilitas*. Bappeda Jakarta.

Kearney. (2025). Jakarta Rise#20: Langkah Menuju 20 Kota Teratas. Buku 7: Litbang & Inovasi. Bappeda Jakarta.

Kearney. (2025). Jakarta Rise#20: Langkah Menuju 20 Kota Teratas. Buku 8: Tata Kelola, Kelembagaan, & Pembiayaan. Bappeda Jakarta.

Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global Dunia.

Keputusan Gubernur Nomor 588 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Urban.

Landry, C. (2000). *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*. Earthscan.

N. Giriwati, R. Homma, & K. Iki. (n.d.). Urban tourism: designing a tourism space in a city context for social sustainability. <https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/SC13/SC13014FU1.pdf>

Pendlebury, J. (2009). *Conservation in the Age of Consensus*. Routledge.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme.

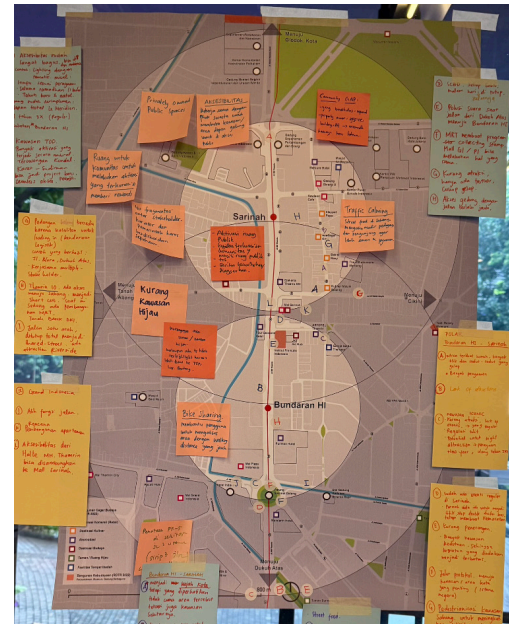
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal.

Project for Public Spaces. (2005). *What Makes a Successful Place*. PPS Report.

Roberts, M., & Eldridge, A. (2009). *Planning the Night-time City*. Routledge.

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

UNWTO. (2018). *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations*. World Tourism Organization.



Kegiatan city Hackaton dihadiri oleh pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah dengan prinsip pengembangan tetrahelix. Kegiatan city hackaton dihadiri oleh Staf Khusus Gubernur Jakarta, Bapak Chicco Hakim dan berlangsung secara semi formal dengan mendorong partisipasi aktif peserta dan mengembangkan jejaring interaksi antar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta. Dokumentasi FGD menjadi data dalam tahap pengembangan kajian ini.





DOKUMENTASI

KUNJUNGAN PULAU SERIBU



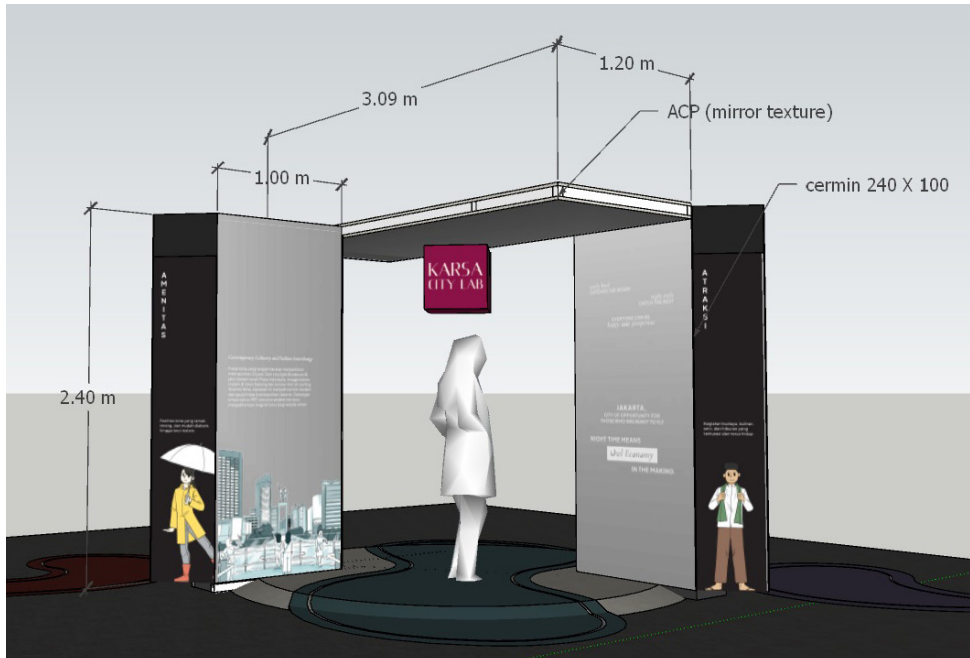


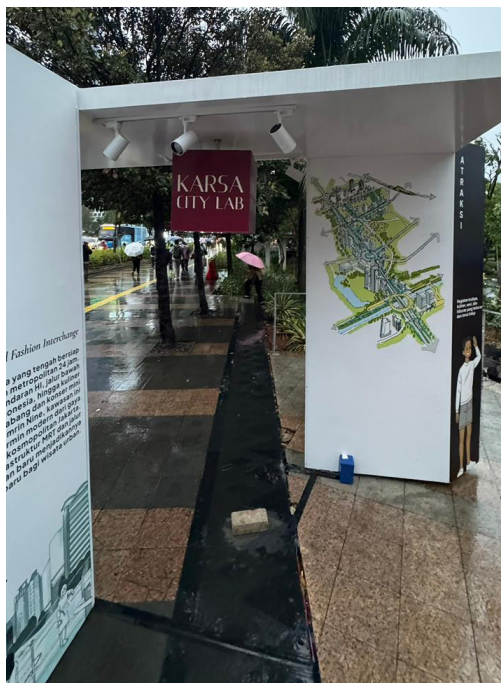
Kegiatan kunjungan Pulau Seribu dilakukan sebagai bagian dari kajian yang mengedepankan prinsip inklusifitas dalam pengembangan zona ekonomi kreatif malam hari di Jakarta. Visitasi ke Pulau Resor Asha, Pulau Resort Sepa dan Homestay Pulau Pramuka menemukan bahwa pengembangan pulau Seribu sebagai core of natural tourism Jakarta, lebih eksklusif karena keterbatasan akses transportasi namun dapat menjadi supporting pengembangan pariwisata Jakarta. Signifikansi resort Pulau Sepa dapat diliput dalam media- media seperti Tatler Homes maupun Monocle dengan global standard hospitality resort di Jakarta, dengan tetap mengembangkan segmentasi pariwisata yang lebih budget friendly seperti pengembangan homestay di pulau penduduk.



DOKUMENTASI

INSTALASI LUAR RUANG
SEBAGAI BAGIAN DARI JIF
(JAKARTA INNOVATION DAY)





Instalasi luar ruang di Simpang Temu Dukuh Atas ini menjadi bagian dari Jakarta Innovation Day (JIF), menampilkan interpretasi visual dari konsep Owl Economy ekonomi malam yang hidup, inklusif, dan berkelanjutan. Karya ini mengundang publik untuk merasakan atmosfer kota yang terus bergerak bahkan setelah matahari terbenam. Melalui cahaya, refleksi, dan interaksi, instalasi ini menggambarkan dinamika warga kota yang bekerja, berkreasi, dan berbagi ruang hingga malam hari. Ia menjadi simbol transformasi Jakarta menuju kota 24 jam yang aman, kreatif, dan manusiawi.

